

MENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL LINGKUNGAN BERBASISKAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

MANAGING ENVIRONMENTAL SOCIAL RESPONSIBILITY
BASED ON THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

LAPORAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) **2020**
PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM REPORT



PENJELASAN TEMA

Theme Explanation

Mengelola Tanggung Jawab Sosial Lingkungan berbasis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Managing Environmental Social Responsibility based on the Sustainable Development Goals



Sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit yang telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun, PT Jamkrindo selalu berusaha untuk menjalankan bisnisnya secara harmonis dengan masyarakat.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan tantangan yang sangat besar bagi Perusahaan dan juga masyarakat sekitar pada umumnya. Oleh karena itu, pada kondisi seperti ini, bantuan dan dukungan perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi semakin penting. Perusahaan menyadari bahwa sinergi yang harmonis antara proses bisnis yang dijalankan oleh Perusahaan dengan masyarakat akan mendukung Perusahaan dalam upaya mencapai keberlanjutan.

Melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Perusahaan berusaha menjalankan dan mengelola bisnisnya secara profesional dengan menerapkan strategi keberlanjutan yang kuat. Pengelolaan kegiatan PKBL dilakukan sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang dilakukan dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Kami berharap program-program yang didesain dalam kegiatan PKBL ini dapat memperkuat hubungan baik Perusahaan dengan masyarakat dan menjadikan masyarakat di sekitar Perusahaan lebih sejahtera secara ekonomi dan sosial, dan menjadi bentuk tanggung jawab Perusahaan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

As a Credit Guarantee Company with more than 50 years of experience, PT Jamkrindo always strives to run its business in harmony with society.

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 presents a very big challenge for the Company and also the surrounding community in general. Therefore, in these conditions, company assistance and support for community welfare becomes increasingly important. The Company realizes that a harmonious synergy between the business processes carried out by the Company and the community will support the Company in its efforts to achieve sustainability.

Through the Partnership and Community Development Program (PKBL), the Company strives to run and manage its business professionally by implementing a strong sustainability strategy. The management of PKBL activities is carried out as part of the Corporate Social and Environmental Responsibility carried out to support the achievement of the Sustainable Development Goals. We hope that the programs designed in this PKBL activity can strengthen the Company's good relationship with the community and make the community around the Company more prosperous economically and socially, and become a form of the Company's responsibility to achieve the Sustainable Development Goals.

DAFTAR ISI

Table of Content

Penjelasan Tema <i>Explanation of Themes</i>	2
Daftar Isi <i>Table of contents</i>	3



Highlights 2020 *Highlights 2020*

Ikhtisar Pencapaian <i>Highlights of Achievements</i>	6
Ikhtisar Kinerja PKBL <i>PKBL Performance Highlights</i>	6
Peristiwa Penting <i>Significant Events</i>	8
Penghargaan <i>Awards</i>	12



Pernyataan Tanggung jawab dan Sambutan Direktur Utama *Greetings from President Director*

Pernyataan Tanggung Jawab <i>Responsibility Statement</i>	18
Sambutan Direktur Utama <i>Greetings from President Director</i>	20



Tentang Jamkrindo *About Jamkrindo*

Informasi Umum dan Identitas Perusahaan <i>General Information and Company Identity</i>	26
Kilas Sejarah Jamkrindo <i>History of Jamkrindo</i>	28
Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, Values and Culture</i>	31
Aktivitas Bisnis dan Bidang Usaha <i>Business Activities and Line of Business</i>	35
Produk dan Jasa <i>Product and Services</i>	39
Pasar yang Dilayani dan Wilayah Operasional <i>Market Served and Operational Areas</i>	46
Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	52
Skala Organisasi <i>Organization Scale</i>	54
Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	55



PKBL di Jamkrindo *PKBL at Jamkrindo*

Landasan Hukum dan Kebijakan Kegiatan PKBL <i>The Legal and Policy Basis for PKBL</i>	60
Susunan Pengurus dan Sumber Daya Manusia PKBL <i>Management Structure and Human Resources of The Partnership and Community Development Program</i>	62
Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan <i>Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Unit</i>	63
Kegiatan Unit PKBL <i>Partnership and Community Development Program Unit Activities</i>	65
Rencana Kerja PKBL <i>Partnership and Community Development Program Work Plan</i>	65
Sasaran, Kebijakan, dan Strategi Penyaluran Program Kemitraan <i>Target, Policy, and Distribution Strategy of The Partnership Program</i>	65
Sasaran, Kebijakan, Strategi Penyaluran Program Bina Lingkungan <i>Targets, Policies, And Distribution Strategies of Community Development Programs</i>	67
Sumber Dana PKBL <i>Source of Funds of Partnership and Community Development Program</i>	67
Penggunaan Dana PKBL <i>Use of Partnership and Community Development Program Fund</i>	68
Mekanisme Penyaluran Dana PKBL <i>Distribution Mechanism of Partnership and Community Development Program Fund</i>	69



Realisasi Program PKBL *Realization of PKBL Program*

Gambaran Umum <i>General Description</i>	76
Penyaluran Program Kemitraan <i>Distribution of The Partnership Program</i>	77
Efektivitas Pembinaan <i>Effectiveness of The Postering Program</i>	81
Kisah Sukses Mitra Binaan <i>Success Stories of Foster Partners</i>	84
Realisasi Program Bina Lingkungan <i>Realization of the Community Development Program</i>	90



Penutup *Closing*

Opini Audit atas Laporan Keuangan PKBL <i>Audit Opinion on PKBL Financial Statements</i>	98
Tantangan dan Solusi Pelaksanaan PKBL <i>Challenges and Solutions for the Implementation of PKBL</i>	98



Lampiran - Laporan Keuangan PKBL *PKBL Financial Report*



HIGHLIGHT 2020

2020 Highlight



IKHTISAR PENCAPAIAN

Highlights of Achievements

Pada tahun 2020, penyaluran dana pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan adalah sebesar Rp16.261.627.391. Bantuan untuk Program Kemitraan sebesar Rp4.372.000.000 dan Rp11.889.627.391 untuk Program Bina Lingkungan. Adapun 152 mitra binaan yang mendapatkan bantuan dari Program Kemitraan Jamkrindo.

In 2020, the distribution of funds for the Partnership and Community Development Program is IDR16,261,627,391. Assistance for the Partnership Program of IDR4,372,000,000 and IDR11,889,627,391 for the Community Development Program. There are 152 fostered partners who received assistance from the Jamkrindo Partnership Program.

Realisasi Program Kemitraan tahun 2020 Realization of the Partnership Program in 2020

Rp4.372.000.000

Menurun 14,8% dibandingkan tahun 2019
Decreased by 14.8% compared to 2019

Realisasi Program Bina Lingkungan tahun 2020 Realization of the Community Development Program in 2020

IDR11,889,627,391

Meningkat 124,23% dibandingkan tahun 2019
Increased by 124.23% compared to 2019

IKHTISAR KINERJA PKBL

PKBL Performance Highlights

Program Kemitraan Jamkrindo/Jamkrindo Partnership Program

Uraian Description	2020		2019	
	Mitra Binaan (MB) Foster Partner (FP)	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Mitra Binaan (MB) Foster Partner (FP)	Jumlah (Rp) Total (IDR)
Sektor Perdagangan Trade Sector	76	2.452.000.000	29	1.059.000.000
Sektor Jasa Service Sector	27	715.000.000	7	275.000.000
Sektor Peternakan Livestock Sector	14	420.000.000	15	750.000.000
Sektor Pertanian Agricultural Sector	21	395.000.000	23	1.115.000.000
Sektor Perikanan Fisheries Sector	11	330.000.000	-	-
Sektor Industri Industrial Sector	3	60.000.000	47	1.932.500.000
Jumlah Total	152	4.372.000.000	121	5.131.500.000

Program Bina Lingkungan Jamkrindo/Jamkrindo Community Development Program

No.	Uraian Description	2020 (Rp/IDR)	2019 (Rp/IDR)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
1.	Bantuan sosial kemasyarakatan <i>Social Community Assistance</i>	4.000.358.220	2.973.553.093	34,53%
2.	Bantuan korban bencana alam dan non alam <i>Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters</i>	2.697.807.445	237.032.782	1038,16%
3.	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan <i>Educational and/or Training Assistance</i>	2.029.064.103	1.001.117.503	102,68%
4.	Bantuan Sarana Ibadah <i>Worship Facilities Assistance</i>	1.477.647.000	517.951.600	185,29%
5.	Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam Karena Wabah <i>Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters due to Epidemic</i>	815.610.623	-	-
6.	Bantuan pengembangan prasarana <i>Public Infrastructure Assistance</i>	584.710.000	233.414.000	150,50%
7.	Bantuan peningkatan kesehatan dan/atau sarana umum <i>Health Improvement /or Facilities Development Assistance</i>	166.680.000	201.539.566	(17,30%)
8.	Bantuan pelestarian alam <i>Nature Preservation Assistance</i>	117.750.000	137.793.333	(14,55%)
Jumlah/Total		11.889.627.391	5.302.401.877	124%

PERISTIWA PENTING

Significant Events



Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2019 dan Pembukaan BEI Tahun 2020 (IDX)

IDX Trading Closing in 2019 and IDX opening in 2020 (IDX)



Jakarta, Januari 2020

Jakarta, January 2020



Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrindo

General Meeting of Shareholders of PT Jamkrindo



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Live Berita Satu TV (Kesiapan Perusahaan Menghadapi COVID-19)

Live on Berita Satu TV (Company's Readiness to Deal with COVID-19)



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Sosialisasi Value BUMN AKHLAK

Socialization of Value of BUMN AKHLAK



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrindo dan PT Askrindo dengan Penjamin terkait Penjaminan KMK PEN

Signing of Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Askrindo with Guarantors related to KMK PEN Guarantee



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Peluncuran Logo BUMN dan Slogan BUMN

Launch of SOEs Logo and Slogan



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Seremoni HUT ke-50 Tahun PT Jamkrindo

50th Anniversary Ceremony of PT Jamkrindo



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Webinar Jamkrindo Talk

Webinar Jamkrindo Talk



Jakarta, Agustus 2020

Jakarta, August 2020



Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kemenkop dan KBUMN

Signing of Joint Agreement with the Ministry of Cooperatives and the Ministry of SOEs



Jakarta, Agustus 2020

Jakarta, August 2020



Ceremonial Penandatanganan PKS Penjaminan Program PEN dengan BPD Kalsel

Ceremonial Signing of Cooperation Agreement for PEN Program Guarantee with Local Development Bank in South Kalimantan



Jakarta, September 2020

Jakarta, September 2020



Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)

Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)



Jakarta, September 2020

Jakarta, September 2020



Webinar Penjaminan KMK PEN untuk Pemulihan Ekonomi Terdampak COVID-19

Webinar on KMK PEN Guarantee for Economic Recovery Impacted by COVID-19



Jakarta, Oktober 2020

Jakarta, October 2020



Ngopi Bareng Indonesia Financial Group (IFG)

Ngopi Bareng with Indonesia Financial Group (IFG)



Jakarta, Oktober 2020

Jakarta, October 2020



Penandatanganan Komitmen AKHLAK bersama PT BPUI

Signing of AKHLAK Commitment with PT BPUI



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Live Streaming Peluncuran IFG

Live Streaming of IFG Launch



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Program Pengenalan Direksi

Orientation Program for Directors



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Webinar Jamkrindo UMKM Appreciation Awards 2020

Webinar Jamkrindo MSMEs Appreciation Awards 2020



Jakarta, Desember 2020

Jakarta, December 2020



Kunjungan Kerja komisi VI DPR RI

Working Visit of Commission VI DPR RI



Banjarmasin, Desember 2020

Banjarmasin, December 2020

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards And Certifications



31 Mei / May

European Award for Best Practices 2020 European Award for Best Practices 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Gold Category Best Practices
Gold Category Best Practices

Acara/Event

BUMN Marketeers Awards 2019
BUMN Marketeers Awards 2019

oleh/by

European Society Quality Research
European Society Quality Research

09 Juli / July

Emerging Stated Owned Enterprise Emerging Stated Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Terbaik II
Best II

Acara/Event

9th Anugerah BUMN 2022
9th BUMN Award 2022

oleh/by

BUMNTrack
BUMNTrack



01 Juli / July

Rekor MURI Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Perusahaan dengan Pergantian Badan Hukum Terbanyak
Companies with the Most Legal Entity Changing

Acara/Event

Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by

MURI
MURI

01 Juli / July

Rekor MURI Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Perusahaan dengan Proses Perubahan Badan Hukum Tercepat
Companies with the Fastest Legal Entity Change Process

Acara/Event

Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by

MURI
MURI





29 Juli / July

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
 The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Acara/Event

GRC & Performance Excellence Award 2020
 GRC & Performance Excellence Award 2020

oleh/by

Businessnews
 Businessnews

16 September / September

The Most Promising Company in Strategic Marketing
The Most Promising Company in Strategic Marketing

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Bronze Winner
 Bronze Winner

Acara/Event

BUMN Marketeers Award 2020
 BUMN Marketeers Award 2020

oleh/by

BUMN Marketeers Club
 BUMN Marketeers Club



23 September / September

Excellence in Brand Among Indonesia Millenials in 2020
Excellence in Brand Among Indonesia Millenials in 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Gold Winner
 Gold Winner

Acara/Event

BUMN Brand Award 2020
 BUMN Brand Award 2020

oleh/by

RRI dan Economics
 RRI dan Economics



07 Oktober / October

Top GRC Awards 2020 #Star4
Top GRC Awards 2020 #Star4

Deskripsi Penghargaan/Award Description

#Star4
 #Star4

Acara/Event

Top Governance, Risk & Compliance 2020
 Top Governance, Risk & Compliance 2020

oleh/by

Top Business
 Top Business



03 November / November

The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise
The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019
 Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019

Acara/Event

11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020"
 11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020"

oleh/by

Infobank
 Infobank





05 November / November

Corporate Communication Terbaik
Best Corporate Communication

Deskripsi Penghargaan/Award Description
Corporate Communication Terbaik
Best Corporate Communication

Acara/Event
BUMN Branding & Marketing Award 2020
BUMN Branding & Marketing Award 2020

oleh/by
BUMNTrack
BUMNTrack

25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020
The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020

Acara/Event
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards

oleh/by
Businessnews
Businessnews



25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Acara/Event
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards

oleh/by
Businessnews
Businessnews



08 Desember / December

The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Deskripsi Penghargaan/Award Description
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Acara/Event
Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, dan
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
*Data Center and Tempo Analysis (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, and
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*

oleh/by
Tempo Country Contributor
Award 2020
*Tempo Country Contributor
Award 2020*



2020

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia
Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving Entrepreneurship & SME in Indonesia

Acara/Event

TOP CSR PKBL of The Year 2020
TOP CSR PKBL of The Year 2020

oleh/by

Trans Co Indonesia dan Info Brand
Trans Co Indonesia dan Info Brand



Sertifikasi Yang Berlaku Di Tahun 2020

Valid Certification in 2020

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi Certification Release Date	Jenis Sertifikat Certificate Type	Deskripsi Sertifikasi Certification Description	Dikeluarkan Oleh Issued by	Masa Berlaku Hingga Validity Period
2 Mei 2018 May 2, 2018	Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 2015 Quality Management Certification	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan standar bertaraf Internasional yang bertujuan untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu Perusahaan Quality Management System Certification with international standard that aims to guarantee the products or services produced by a Company	Sucofindo	1 Mei 2021 May 1, 2021
5 Agustus 2020 August 5, 2020	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016 2016 Anti-Bribery Management System (SMAP) Certification	Sertifikasi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyuapan yang terjadi di lingkungan Perusahaan. Certification to take preventive measures to prevent, detect, or address bribery occurring in an enterprise environment	PT SAI Global Indonesia	4 Agustus 2023 August 4, 2023
21 Desember 2020 December 21, 2020	Sertifikasi Pemeringkatan AA+ dari Pefindo AA+ Rating Certification from Pefindo	Sertifikasi terhadap Perusahaan atas Risiko Kredit Certification of Companies for Credit Risk	PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO)	1 Desember 2021 December 1, 2021



Pernyataan Tanggung jawab dan Sambutan Direktur Utama

Responsibility Statement and Greetings from President Director



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Responsibility Statement

PT Jamkrindo menyadari bahwa dalam menjalankan bisnisnya dibutuhkan sinergi antara strategi bisnis dengan strategi keberlanjutan. Strategi keberlanjutan kami terapkan untuk menitikberatkan perhatian perusahaan tidak hanya pada aspek ekonomi saja tetapi juga pada aspek lingkungan dan sosial. Perhatian pada ketiga pilar keberlanjutan tersebut menjadi perhatian Jamkrindo untuk terus maju dan membangun sinergi dengan berbagai pihak pemangku kepentingan. Jamkrindo menyadari bahwa kehadiran perusahaan menjadi penting dalam rangka peran dan fungsinya untuk dapat mengembangkan dan memajukan masyarakat.

Dalam kerangka itulah, Perusahaan melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Pelaksanaan PKBL dilingkungan Jamkrindo pada tahun 2020 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan di Jakarta tanggal 20 Juli 2017. Kemudian, diubah dalam Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020. Penyaluran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo juga mengacu kepada Peraturan Direksi No.02/Per-Dir/1/II/2021 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan PT Jamkrindo dan Surat Edaran Direksi Nomor: 113/SE/1/XII/2020 Tentang Kebijakan Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Ruang lingkup pelaksanaan program PKBL terbagi atas dua program utama. Pertama, pembinaan oleh Perusahaan BUMN terhadap pelaku usaha mikro dan menengah untuk meningkatkan kualitas usahanya melalui program Kemitraan, Kedua, kegiatan bantuan langsung maupun tidak langsung yang bersifat pelestarian lingkungan, sosial kemasyarakatan atau penanggulangan bencana dalam program Bina Lingkungan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan kedua program utama tersebut sehingga tepat sasaran dan tepat program, melalui Ketetapan Direksi Jamkrindo Nomor 01/KD/1/V/2018 menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada di Direktorat Utama.

PT Jamkrindo realizes that running its business requires a synergy between a business strategy and a sustainability strategy. Our sustainability strategy is implemented to emphasize the company's attention not only on economic aspects but also on environmental and social aspects. Attention to the three pillars of sustainability has become Jamkrindo's attention to keep going and building synergies with various stakeholders. Jamkrindo realizes that the presence of a company is important in terms of its role and function to be able to develop and advance society.

Within that framework, the Company implements the Partnership and Community Development Program (PKBL). The implementation of PKBL within the Jamkrindo environment in 2019 refers to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program of State-Owned Enterprises with Small Businesses and the Community Development Program, which was amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises which was promulgated in Jakarta on July 20, 2017. Then, it was amended in the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises as stated in PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020. The distribution of the Jamkrindo Partnership and Community Development Program also refers to the Board of Directors Regulation No.02/Per-Dir/1/II/2021 concerning Guidelines for Delegating Administrative Authority and Policies of PT Jamkrindo and Circular Letter of the Directors Number: 113/SE/1/XII/2020 concerning Accounting Policies and Standard Operating Procedures (SOP) for Partnership Programs and Community Development.

The scope of implementing the PKBL program is divided into two main programs. First, coaching by state-owned companies to micro and medium enterprises to improve the quality of their business through the Partnership program; second, direct and indirect assistance activities that are environmental, social or disaster management in the Community Development program.

To optimize the implementation of the two main programs so that the program is right on target and right, through the Decree of the Board of Directors of Jamkrindo Number 01/KD/1/V/2018 is part of the Corporate Secretary who is in the Main Directorate.

Sejalan dengan spirit pembangunan berkelanjutan yang saat ini digelorkan oleh pemerintah, maka PKBL yang diselenggarakan oleh Jamkrindo tidak terbatas pada kegiatan filantropi, namun meningkat pada level *corporate community development*. Dengan demikian, program-program yang ada semaksimal mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap kemandirian Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta menopang pemberdayaan kondisi sosial masyarakat.

Selama tahun 2020, Jamkrindo telah melaksanakan kegiatan Kemitraan melalui pembinaan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di seluruh wilayah Indonesia melalui kantor-kantor cabang Perusahaan. Kami menyadari bahwa Perusahaan memiliki tanggung jawab yang besar dalam melakukan kegiatan tersebut dalam mendukung penguatan UMKM & Koperasi di Indonesia.

Selain itu pada tahun 2020 Jamkrindo juga telah melaksanakan beberapa program Bina Lingkungan sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Perusahaan terhadap masyarakat di sekitar perusahaan beroperasi. Berbeda dengan Program Kemitraan yang sifatnya pinjaman dana dengan jasa administrasi yang sangat ringan, penyaluran dana Program Bina Lingkungan bersifat bantuan, atau kegiatan filantropi. Bantuan antara lain disalurkan untuk korban bencana alam, pendidikan dan/atau pelatihan, sarana ibadah dan bantuan sosial kemasyarakatan.

Sebagai bentuk akuntabilitas Jamkrindo, semua program atau kegiatan PKBL selama tahun pelaporan terangkum dalam Laporan Keuangan PKBL Jamkrindo tahun 2020. Laporan meliputi informasi mengenai penanggungjawab program, besaran dana yang dimiliki, rencana program serta realisasi penyaluran dana tersebut.

Perusahaan berharap dengan menjalankan program dengan baik dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Laporan Keuangan PKBL Jamkrindo telah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (terafiliasi dengan Price Waterhouse and Coopers/ PwC). Audit telah dilakukan atas laporan posisi keuangan, laporan kegiatan dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Pendapat auditor atas Laporan Keuangan PKBL Jamkrindo disajikan pada bagian akhir Laporan ini. Seluruh informasi dalam Laporan Tahunan Jamkrindo 2020 telah dimuat secara lengkap dan kami bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan dan laporan keuangan Perseroan.

In line with the spirit of sustainable development currently being promoted by the government, the PKBL organized by Jamkrindo is not limited to philanthropic activities, but increases at the corporate community development level. Thus, the existing programs can contribute as much as possible to the independence of Micro, Small and Medium Enterprises, as well as support the empowerment of the social conditions of the community.

During 2020, Jamkrindo has carried out Partnership activities through fostering Micro, Small and Medium Enterprises players throughout Indonesia through the Company's branch offices. We realize that the Company has a big responsibility in carrying out these activities in supporting the strengthening of MSMEs & Cooperatives in Indonesia.

In addition, in 2020 Jamkrindo has also implemented several Community Development programs as a form of the Company's concern and concern for the communities around the company operating. In contrast to the Partnership Program, which is a loan fund with very light administrative services, the distribution of funds for the Community Development Program is in the form of assistance, or philanthropic activities. Assistance, among others, is distributed to victims of natural disasters, education and / or training, religious facilities and social assistance.

As a form of Jamkrindo's accountability, all PKBL programs or activities during the reporting year are summarized in the Jamkrindo PKBL Financial Report for 2020. The report includes information on the person in charge of the program, the amount of funds held, program plans and the realization of the distribution of these funds.

The company hopes that by running the program well, it can make a meaningful contribution to improving the welfare of the Indonesian people. Jamkrindo PKBL Financial Statements have been audited by an independent auditor from the Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (affiliated with Price Waterhouse and Coopers/ PwC) Public Accountants Firm. An audit was carried out on the financial position report, activity report and cash flow statement for the year ended December 31, 2020. The auditor's opinion on the Jamkrindo PKBL Financial Report is presented at the end of this Report. All information in the 2020 Jamkrindo Annual Report has been fully published and we are fully responsible for the accuracy of the contents of the annual report and the Company's financial statements.

SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Greetings from President Director



Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama

President Director

Para Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenananNya, di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak pada perusahaan tetapi juga seluruh lapisan masyarakat, kami dapat menjalankan berbagai kegiatan dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Implementasi kegiatan PKBL tahun ini menjadi sangat penting bagi kami karena dalam kondisi yang tidak mudah bagi masyarakat pada umumnya, kami menyadari adanya kebutuhan yang sangat tinggi atas komitmen perusahaan untuk menjaga perekonomian masyarakat dan menjalankan kontribusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan.

Melalui kegiatan PKBL ini, Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan komitmennya dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat guna memajukan dan membangun Indonesia yang lebih baik terus dilakukan baik. Pelaksanaan kegiatan PKBL oleh Jamkrindo merupakan wujud ketaatan perusahaan terhadap amanah konstitusi seperti tertuang dalam UU No.19 Tahun 2003 pasal 2 ayat 1 huruf e yang berbunyi bahwa perusahaan dituntut untuk berkontribusi secara aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lebih dari itu, pelaksanaan kegiatan PKBL ini merupakan bentuk komitmen Jamkrindo untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat 3. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Jamkrindo meyakini bahwa upaya yang dilakukan melalui kegiatan PKBL ini tidak hanya merupakan bentuk dari ketaatan terhadap peraturan tetapi sebagai bagian dari usaha Perusahaan untuk menjalankan tiga pilar keberlanjutan untuk memastikan bahwa Perusahaan dapat maju dan bertumbuh dengan menjaga sumber daya bagi generasi mendatang. Melalui kegiatan PKBL, Jamkrindo berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan mitra binaan dan melakukan *community development* yang berdampak pada perbaikan tingkat perekonomian masyarakat yang terkena dampak langsung dari krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi ini.

Dear Stakeholders,

Our gratitude goes to the presence of God Almighty because with His permission, in the midst of the COVID-19 pandemic which affects not only the company but also all levels of society, we are able to carry out various activities in the Partnership and Community Development Program (PKBL). The implementation of PKBL activities this year is very important for us because in conditions that are not easy for the community in general, we realize that there is a very high need for the company's commitment to safeguarding the community's economy and making real contributions to improving welfare.

Through this PKBL activity, Jamkrindo continues to strive to increase its commitment to improving people's lives in order to advance and build a better Indonesia. The implementation of PKBL activities by Jamkrindo is a manifestation of the company's obedience to the constitutional mandate as stated in Law No.19 of 2003 article 2 paragraph 1 letter e which states that companies are required to contribute actively in efforts to improve the welfare of the community. Moreover, the implementation of this PKBL activity is a form of Jamkrindo's commitment to participate in sustainable economic development in line with Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies Article 1 paragraph 3. This is also expected to improve the quality of life and the environment that is beneficial, both for the Company itself, the local community, and society in general.

Jamkrindo believes that the efforts made through this PKBL activity are not only a form of compliance with regulations but as part of the Company's efforts to implement the three pillars of sustainability to ensure that the Company can advance and grow by preserving resources for future generations. Through PKBL activities, Jamkrindo strives to improve the welfare of foster partners and carry out community development which has an impact on improving the economic level of the people who are directly affected by the economic crisis caused by this pandemic.

Kinerja dan Realisasi PKBL

Ditengah pandemi COVID-19 yang berdampak tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan tetapi juga pada aspek ekonomi yang tentunya juga berdampak pada industri penjaminan kredit. Jamkrindo pada tahun 2020 masih dapat membukukan laba positif sebesar Rp456,13 miliar. Selaras dengan hal tersebut, pelaksanaan kegiatan PKBL juga masih dijalankan sesuai dengan komitmen Perusahaan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar dan berkembang harmonis bersama masyarakat dan lingkungan.

Melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Jamkrindo terus memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan dan kemandirian masyarakat maupun lingkungan hidup serta, pada saat bersamaan, memastikan keberlanjutan Jamkrindo di tahun-tahun mendatang. Bagi Jamkrindo, keberhasilan PKBL sangat penting karena mencerminkan kedekatan dan manfaat Perusahaan bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Di tengah kompetisi yang semakin ketat, citra positif sangat diperlukan dalam memupuk kepercayaan (*trust*) dari para pemangku kepentingan, baik eksternal maupun internal. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab Jamkrindo untuk mendukung Pemerintah dalam program pembangunan nasional guna menyejahterakan bangsa.

Selama tahun 2020, dapat kami laporkan bahwa realisasi dana Program Kemitraan yang disalurkan adalah sebesar Rp4,37 miliar. Kami menyadari bahwa nilai penyaluran tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun dari segi jumlah mitra binaan, dana kemitraan dapat disalurkan untuk mitra binaan yang lebih banyak. Pada tahun 2020, jumlah mitra binaan Jamkrindo mencapai 152 mitra binaan yang meningkat sebesar 25,62% dari tahun sebelumnya. Kami selalu berusaha bahwa dana yang disalurkan dapat secara efisien meningkatkan kesejahteraan mitra binaan dan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan pemetaan/*assessment* potensi usaha mitra binaan.

Realisasi penyaluran dana kemitraan tersebut terdiri dari penyaluran ke beberapa sektor, yaitu sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan jasa. Bentuk lain dari komitmen perusahaan untuk membesarkan mitra binaan adalah melalui kegiatan-kegiatan seperti pameran produk mitra binaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas mitra binaan.

Sedangkan dana Bina Lingkungan yang telah disalurkan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp11,88 miliar. Dalam menghadapi pandemic COVID-19 ini kami berfokus pada Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan.

PKBL Performance and Realization

In the midst of the COVID-19 pandemic which has an impact not only on the health aspect but also on the economic aspect which of course also has an impact on the credit guarantee industry. Jamkrindo in 2020 can still book a positive profit of IDR456.13 billion. In line with this, the implementation of PKBL activities is also still being carried out in accordance with the Company's commitment to prosper the surrounding community and develop in harmony with the community and the environment.

Through the implementation of the Partnership and Community Development Program, Jamkrindo continues to make a positive contribution to the welfare and independence of the community and the environment and, at the same time, ensures the sustainability of Jamkrindo in the years to come. For Jamkrindo, the success of PKBL is very important because it reflects the Company's closeness and benefits to the community and the surrounding environment. In the midst of increasingly fierce competition, a positive image is needed in fostering trust from stakeholders, both external and internal. This is a form of Jamkrindo's responsibility to support the Government in national development programs for the welfare of the nation.

*During 2020, we can report that the realization of the Partnership Program funds disbursed was IDR4.37 billion. We are aware that the value of this distribution has decreased compared to the previous year. However, in terms of the number of fostered partners, partnership funds can be channeled to more fostered partners. In 2020, the number of Jamkrindo fostered partners reached 152 partners, an increase of 25.62% from the previous year. We always strive that the funds channeled can efficiently improve the welfare of the fostered partners and distribution has been carried out in accordance with the mapping/*assessment* of the foster partner's business potential.*

The realization of the distribution of the partnership fund consists of distribution to several sectors, namely the industrial, trade, agriculture, livestock, plantation, fishery and service sectors. Another form of the company's commitment to raising the fostered partners is through activities such as foster partner product exhibitions, training and capacity building of the fostered partners.

Meanwhile, Community Development funds that have been disbursed during 2020 amounted to IDR11.88 billion. In dealing with the COVID-19 pandemic, we focus on Social Affairs in the Context of Poverty Alleviation.

Selain itu pada tahun 2020 kami memberikan Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam Karena Wabah yang tidak dialokasikan pada tahun sebelumnya. Realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan meliputi 8 (delapan) sektor bidang bantuan, yaitu sosial kemasyarakatan sebesar Rp4,00 miliar, bencana alam dan non alam sejumlah Rp2,69 miliar, pendidikan dan pelatihan sejumlah Rp2,03 miliar, sarana ibadah Rp1,477 miliar, korban bencana alam dan non alam karena wabah sebesar Rp815 juta, pengembangan prasarana sebesar Rp584 juta, bantuan peningkatan kesehatan Rp167 juta, dan bantuan pelestarian alam sebesar Rp117 juta.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan PKBL ini, kami juga telah melakukan audit atas Laporan Keuangan PKBL. Berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (terafiliasi dengan Price Waterhouse and Coopers/ PwC), menyatakan bahwa Laporan Keuangan PKBL tahun buku 2020 disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Melalui pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, Jamkrindo terus memberikan kontribusi positif bagi kesejahteraan dan kemandirian masyarakat dan lingkungan, sekaligus berupaya untuk menjamin keberlanjutan Jamkrindo di tahun-tahun mendatang.

Apresiasi Kami

Akhir kata, Kami ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan yang terlibat atas dukungannya dalam mewujudkan kinerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo tahun 2020. Kiranya sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin baik selama ini terus ditingkatkan agar kita bersama-sama dapat mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan PKBL pada tahun-tahun mendatang, kami berharap agar dukungan dan kerja sama, juga kritik dan masukan, senantiasa diberikan. Dengan demikian, kehadiran program PKBL Jamkrindo semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan lingkungan di sekitar Perusahaan beroperasi.

In addition, in 2020 we provide assistance for victims of natural and non-natural disasters due to outbreaks that were not allocated in the previous year. The realization of the distribution of Community Development funds includes 8 (eight) sectors in the field of assistance, namely social community amounting to IDR4.00 billion, natural and non-natural disasters of IDR2.69 billion, education and training of IDR2.03 billion, religious facilities of IDR1.477 billion, victims of natural and non-natural disasters due to outbreaks of IDR815 million, infrastructure development of IDR584 million, assistance for health improvement of IDR167 million, and assistance for nature conservation of IDR117 million.

As a form of accountability for the implementation of this PKBL, we have also conducted an audit of the PKBL Financial Statements. Based on the results of the audit conducted by the Public Accounting Firm, Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (affiliated with Price Waterhouse and Coopers/ PwC), Stated that the PKBL Financial Statements for the 2020 financial year presented fairly in all material respects. Through the implementation of the Partnership and Community Development Program, Jamkrindo continues to make a positive contribution to the welfare and independence of the community and the environment and, at the same time, seeks to ensure the sustainability of Jamkrindo in the years to come.

Our Appreciation

Finally, we would like to express our gratitude to all stakeholders involved for their support in realizing the performance of the Jamkrindo Partnership and Community Development Program in 2020. We hope that the synergy and collaboration that have been well established so far will continue to be improved so that together we can achieve the goals of sustainable development. in Indonesia. To improve the quality of PKBL implementation in the coming years, we hope that support and cooperation, as well as criticism and input, will always be provided. Thus, the presence of the Jamkrindo PKBL program is increasingly beneficial for the community and the environment in which the Company operates.



TENTANG JAMKRINDO

About Jamkrindo



INFORMASI UMUM TENTANG JAMKRINDO

General Information About Jamkrindo



Nama Perusahaan
Company Name

PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat menjadi **PT Jamkrindo**

*PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated to **PT Jamkrindo***



Bentuk dan Status Badan Usaha
Form and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT)

Limited Liability Company



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

1 Juli 1970

July 1, 1970



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment

Akta Pendirian No.25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat serta telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 Nomor AHU-0066418.AH.01.11.Tahun 2020

Deed of Establishment No.25 dated February 24, 2020, and was last amended by Deed of Decree of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) regarding Amendment to Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary in Central Jakarta and received the Establishment Ratification of a Limited Liability Company from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 9, 2020, Number AHU-0066418.AH.01.11.of 2020



Bidang Usaha Line of Business

Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.

Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEC), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.



Jaringan Usaha Business Network

9 (sembilan) Kantor Wilayah, 56 (lima puluh enam) Kantor Cabang dan 16 (enam belas) Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia

9 (nine) Regional Offices, 56 (fifty six) Branch Offices dan 16 (sixteen) Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia



Kepemilikan Ownership

Saham Seri A Dwiwarna

Pemerintah Republik Indonesia (0,0000001787%)

Series A Dwiwarna Shares

The Government of Republik Indonesia (0,0000001787%)

Saham Seri B

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

(99,9999998213%)

Series B Shares

PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)

(99.9999998213%)



Karyawan Tetap Permanent Employee

965 orang di tahun 2020 / 965 people in 2020



Alamat Address

Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp. : +62 21 6540335
Fax. : +62 21 6540344, 6540348
Email : contact@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id



@pt_jamkrindo



@pt_jamkrindo



Jamkrindo



PT Jamkrindo

KILAS SEJARAH JAMKRINDO

History of Jamkrindo

PT Jaminan Kredit Indonesia, atau disebut juga dengan Jamkrindo merupakan perusahaan yang memiliki bidang usaha Penjaminan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya. Sebagai anak Perusahaan BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya menyejahterahkan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui pemberian jaminan kredit bersifat langsung maupun tidak langsung, serta pemberian bantuan konsultasi manajemen kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.

Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) melalui Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PKK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PKK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PKK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PKK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKM dan Koperasi melalui pola bagi hasil, tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

PT Jaminan Kredit Indonesia, or also known as Jamkrindo, is a company that which has the business activities of Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEC), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees. As a subsidiary of the BUMN Holding Insurance and Guarantee Indonesia Financial Group (IFG), Jamkrindo is fully committed to implementing and supporting Government policies and programs in the national economy and development field in an effort to improve the life of the nation. The implementation of these commitments was carried out through the activities of providing direct and indirect credit guarantees, as well as providing management consulting assistance to Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). In an effort to improve the economy of the community equally and facilitate accessibility, Jamkrindo continues to develop its work network to all corners of the country as well as make improvements and development on service quality.

Jamkrindo was established in the mid-1970s as the Cooperative Credit Guarantee Institution/ Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). At that time, the development of cooperatives was still behind compared to state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to Cooperative Financial Development Public Corporation/ Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK) through Government Regulation No.51 of 1981 dated December 23, 1981, which was perfected by Government Regulation No.27 of 1985 dated May 31, 1985, concerning Public Corporation of Cooperative Financial Development.

The successful implementation of the functions and duties of Perum PKK in developing cooperatives through credit guarantee activities has made the Government expand the service coverage of Perum PKK to be limited to cooperatives and include MSMEs. For this effort, the Government again issued a policy aimed to strengthen the role of Perum PKK through the issuance of Government Regulation No.95 of 2000 dated November 7, 2000, which at the same time changed the name of Perum PKK to become Public Corporation of Business Development Facility/Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

In 2008, the Government issued Presidential Regulation No.2 of 2008 dated January 26, 2008, concerning the Guarantee Institution. With regard to business changes, the Company no longer provides loans directly to MSMEs and Cooperatives through profit-sharing patterns. However, it focuses on the MSMEs and Cooperative credit guarantee business, Perum SPU was renamed into the Jaminan Kredit Indonesia Public Corporation/ Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) based on Government Regulation No.41 of 2008 dated May 19, 2008.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No.KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan guna meningkatkan peran Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada tahun 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00011484. AH..01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo. Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jamkrindo ditandatangani di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian di 9 April 2020, Akta Pendirian PT Jamkrindo No.25 tanggal 24 Februari 2020 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan PT Jamkrindo tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 9 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo. Dengan adanya akta tersebut pemegang saham PT Jamkrindo berubah menjadi:

- a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.365.160,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah)

As a follow up to the implementation of the Presidential Regulation, the Government through the Ministry of Finance strengthened the legal basis for the establishment of the Company and other companies with a similar line of business through the Minister of Finance Regulation (PMK) No.222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008, as amended in the Minister of Finance Regulation No.99/PMK.010/2011 dated July 8, 2011, concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. Through the regulation, Jamkrindo was required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued a Decree (KMK) No.KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009, which stipulated the business license of Jamkrindo as a Credit Guarantee Company.

In 2016, the Government launched Law No.1 of 2016 dated January 19, 2016, concerning Guarantees, as a form of the Government's seriousness in covering and institutionalizing the guarantee industry that continued to develop in line with the growth of financial services in Indonesia.

In 2018, the Government issued Government Regulation No.35 of 2018 concerning Public Company Jaminan Kredit Indonesia. This regulation was issued in order to increase the role of Jamkrindo in the national guarantee industry to succeed in Government policies and programs in the national economy and development sector. The Government viewed Jamkrindo as necessary to develop its business by adding the Company's business activities according to current developments and needs, to support Government policies and programs in the national economy and development.

In 2020, President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, officially changed the legal entity of Jaminan Kredit Indonesia Public Company or Jamkrindo to a Limited Liability Company through PP No.11/2020 which was promulgated on February 17, 2020. This decision was upheld through the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-00011484.AH..01.01 of 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Legal Entity of a Limited Liability Company of PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo. The deed of establishment of PT Jamkrindo was signed at the building of the Ministry of SOEs, Jakarta, on February 24, 2020.

Then on April 9, 2020, the Deed of Establishment of PT Jamkrindo No.25 February 24, 2020, amended with the issuance of Deed of Decision of the Shareholders of PT Jamkrindo concerning the amendment to Article of Association No.2 dated April 9, 2020, which changed the status and name of Jamkrindo into PT Jamkrindo. With this deed, the shareholders of PT Jamkrindo changed to:

- a. The Republic of Indonesia as much as 1 (one) Dwiwarna series A share, with a total nominal value of IDR1,365,160 (one million three hundred sixty-five thousand one hundred sixty Rupiah)*

- b. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebanyak Rp7.638.732,- (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp7.638.732.000.000,- (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah)

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan yang saat ini merupakan anggota *holding* Indonesia Financial Group (IFG) dengan induk *holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Perubahan Nama Perusahaan

Kronologi proses perubahan nama Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985.
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2000.
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008.
- Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No.25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero).
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo. (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.

- b. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as much as IDR7,638,732,- (seven million six hundred thirty - eight thousand seven hundred thirty - two) series B shares, each with a nominal value of IDR1,000,000,- (one million Rupiah), so that the whole amounted to IDR7,638,732,000,000,- (seven trillion six hundred thirty-eight billion seven hundred thirty-two million Rupiah)

PT Jamkrindo is a guarantee company which is currently a member of the holding of the Indonesia Financial Group (IFG) with the holding company of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

The Change Of Company's Name

The chronology of the name change process of Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- The company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No.51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No.27 of 1985.
- The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No.95 of 2000.
- The company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No.41 of 2008.
- In order to change the form of Perum Jamkrindo legal entity from Public Corporation (PERUM) to Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No.11/2020 which has been enacted on February 17, 2020. To comply with the provisions of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company signed the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) namely Deed No.25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020 and has been ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484. AH.01.01 Year 2020 Concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero).
- Based on Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the Deed of Amendment to the Articles of Association No.2 dated April 9, 2020 which was ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02 Year 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding under the name of PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as PT Jamkrindo.

VISI, MISI, NILAI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Vision, Mission, Values and Corporate Culture

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No.S-286/MBU/05/2019 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamkrindo Tahun Buku 2019-2023.

In order to guarantee the implementation of professional business activities based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No.S-34/MBU/2014 concerning the Approval and Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP), for the 2019-2023 Fiscal Year.



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

To become a Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development



Misi Mission

Meningkatkan **Aksesibilitas** finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang **Inovatif, Kompetitif** dengan pelayanan **Profesional, Efektif** dan **Efisien** secara **Berkelanjutan**.

*Improving The Financial **Accessibility** Of Msme Through The Provision Of Innovative, Competitive Guarantees With **Professional, Effective And Efficient Services** In A **Sustainable Manner**.*

Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi Perusahaan

Visi, Misi & Nilai Perusahaan telah mendapatkan dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan, berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No.S-286/MBU/05/2019 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamkrindo Tahun Buku 2019-2023.

The Key Management Approval of the Company's Vision and Mission

The Company's Vision, Mission & Values have received support and joint approval from the Board of Supervisor Council and Board of Directors of the Company, based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No.S-286/MBU/05/2019 concerning the Corporate Long-Term Plan (RJPP) of Jamkrindo for the 2019-2023 Fiscal Year.

Budaya Perusahaan

Nilai Perusahaan di atas kemudian diturunkan dalam budaya Perusahaan dan budaya perusahaan juga mengacu pada arahan Kementerian BUMN kepada seluruh perusahaan BUMN. Budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 6 (enam) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "AKHLAK". Dengan penjelasan sebagai berikut:

Corporate Culture

The value of the company above is then derived in the corporate culture and the corporate culture also refers to the direction of the Ministry of BUMN to all BUMN companies. Jamkrindo's corporate culture consists of 6 (six) points of the Company's cultural values, namely the "AKHLAK" culture. With the following explanation:



Adapun, perusahaan yang tergabung ke dalam BUMN Holding Perasuransian dan Penjaminan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Anak Perusahaan Pasar Modal dan Jasa Keuangan:
 - PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), bergerak di bidang manajemen investasi
 - PT Bahana Sekuritas, bergerak dibidang penjamin emisi efek dan perantara perdagangan efek,
 - PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), yang bergerak di bidang pembiayaan modal ventura dan bertugas membina sektor UMKM di Indonesia
 - PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), bergerak dalam bidang investasi dan jasa penasehat keuangan (advisory)
 - PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), bergerak dibidang pemilikan, pengelolaan, dan penyewaan Gedung.
2. Anak Perusahaan Asuransi
 - PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") yang melaksanakan usaha di bidang jasa asuransi kredit dan asuransi umum,
 - PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") yang melayani penjaminan, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada bank ataupun non-bank.
 - PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja ("Jasa Raharja") bergerak dibidang asuransi sosial
 - PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") bergerak di bidang asuransi umum

Perubahan Nama Perusahaan

Kronologi proses perubahan nama PT Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985.
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2000.
- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008.
- Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perum Jamkrindo dari Perusahaan Umum (PERUM) menjadi Perseroan Terbatas (PT), Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17

Meanwhile, the companies that are members of the BUMN Holding Insurance and Guarantee are as follows:

1. Capital Market and Financial Services Subsidiaries:
 - PT Bahana TCW Investment Management ("BTIM"), is engaged in investment management
 - PT Bahana Sekuritas, is engaged in securities underwriting and securities trading brokerage
 - PT Bahana Artha Ventura ("BAV"), which is engaged in venture capital financing and is tasked with fostering the MSME sector in Indonesia
 - PT Bahana Kapital Investa ("BKI"), is engaged in investment and financial advisory services (advisory)
 - PT Graha Niaga Tata Utama ("GNTU"), is engaged in building ownership, management, and rental.
2. Insurance Subsidiary
 - PT Asuransi Kredit Indonesia ("Askrindo") which carries out business in the field of credit insurance and general insurance services
 - PT Jaminan Kredit Indonesia ("Jamkrindo") which provides guarantees, either directly or indirectly, to banks or non-banks.
 - PT Asuransi Jasa Raharja ("Jasa Raharja") is engaged in social insurance
 - PT Asuransi Jasa Indonesia ("Jasindo") is engaged in general insurance

The Change of Company's Name

The chronology of the name change process of PT Jamkrindo since its inception until now as described above is as follows:

- The company was originally established under the name of Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), established in accordance with Government Regulation No.51 of 1981 which was a merger of Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No.27 of 1985.
- The Company name was changed to Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) based on Government Regulation No.95 of 2000.
- The company name was changed again, becoming Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of Government Regulation No.41 of 2008.
- In order to change the form of Perum Jamkrindo legal entity from Public Corporation (PERUM) to Limited Liability Company (PT), the Government issued Government Regulation No.11/2020 which has been enacted on February 17, 2020. To

Februari 2020. Untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dilakukan penandatanganan akta pendirian PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) yaitu Akta No.25 tanggal 24 Februari 2020 di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020 dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero).

comply with the provisions of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the Company signed the deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) namely Deed No.25 dated February 24, 2020 at the Ministry of SOEs building, Jakarta on February 24, 2020 and has been ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-00011484.AH.01.01 Year 2020 Concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of Limited Liability Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero).

- Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) dan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.2 Tanggal 9 April 2020 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02.Tahun 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) resmi menjadi anak perusahaan dari *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan nama PT Jaminan Kredit Indonesia disingkat PT Jamkrindo.
- Based on Government Regulation No.20 of 2020 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) and the Deed of Amendment to the Articles of Association No.2 dated April 9, 2020 which was ratified based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0028854.AH.01.02 Year 2020, PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) officially became a subsidiary of the Insurance and Guarantee holding under the name of PT Jaminan Kredit Indonesia abbreviated as PT Jamkrindo.*

1970 - 1981

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk

Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit

1981 - 2000

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT

Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Sapi Perah Credit, Padi Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT

2000 - 2008

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah

Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product

2020 - Sekarang

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2008 - 2020

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

AKTIVITAS BISNIS DAN BIDANG USAHA

Business Activities and Line of Business

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar: Penerima Jaminan

Berdasarkan Akta No.2, tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya
 - c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan
 - d. Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - e. Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - f. Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *surety bond* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi

Business Activities Based on Articles Of Association: Guarantee Recipients

According to Deed No.2, April 9, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association in Article 3, the Purpose and Objectives and Business Activities are stated as follows:

1. The Company has the purpose and objectives to carry out business guarantee activities for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantee for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, and optimizing the utilization of Company resources based on the Corporate Governance principles.
2. To carry out the purpose and objectives as referred to in paragraph (1), the Company carries out the main business activities as follows:
 - a. Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives
 - b. Loan guarantee channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit for its members
 - c. Credit guarantee and/or partnership program loans are distributed by state-owned enterprises in partnership and community development programs
 - d. Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - e. Guarantee of goods purchase in installments made to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - f. Guarantee of trade transactions carried out to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - g. Guarantee of the procurement of *surety bond* goods and/or services carried out for Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - h. Guarantee of Bank Guarantees (Counter-the Bank Guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - i. Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives

- j. Penjaminan *letter of credit* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - k. Penjaminan kepabeaian (*Custom bond*) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - l. Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - m. Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (*start up business*) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - n. Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - o. Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perseroan dengan badan usaha milik negara lain
 - p. Penjaminan Kredit Berbasis Resi Gudang
 - q. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan
 - r. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan
 - s. Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi
 - t. Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya
3. Kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s.
 4. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan
- j. *Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives*
 - k. *Customs guarantees (Custom bonds) carried out to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives*
 - l. *Excise guarantees carried out to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives*
 - m. *Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives*
 - n. *The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives*
 - o. *Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises*
 - p. *Warehouse Receipt Based Credit Guarantee*
 - q. *Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals according to the purposes and objectives of the Company*
 - r. *Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;*
 - s. *Rating, management consulting, management services, assistance/ empowerment, along with other services for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives*
 - t. *Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions according to their authority.*
3. *The main business activities of the Company can be carried out in the form of a joint guarantee (co-guarantee) except for the main business activities, as referred to in paragraph (2) point r and s.*
 4. *In addition to the main business activities, as referred to in paragraph (2), the Company can carry out business activities to optimize the utilization of the Company's resources.*

No.	Kegiatan Activities	Telah/ Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
1	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Credit guarantee, conservative financing, or Sharia Principles-based financing provided by financial institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Penjaminan Program PEN <i>Available on the General Credit Guarantee, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee, National Economic Recovery (PEN) Program Guarantee products</i>
2	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya <i>Loan guarantees distributed by savings and loan cooperatives or cooperatives with savings and loan business unit to its members</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK <i>Available on the Credit to National Institutions (KKLK) Multipurpose Credit Guarantee products</i>
3	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan <i>Credit Guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs</i>	✓	Penyaluran program kemitraan <i>Distribution of partnership programs</i>
4	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Debt securities guarantee to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✗	belum/tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
5	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of the purchase of goods in installments done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO <i>Available on OTO Credit Guarantee products</i>
6	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Trade transactions guarantee done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang <i>Available on Goods Distribution Guarantee products</i>
7	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa <i>surety bond</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of surety bond goods and/or services procurement done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk <i>Surety Bond</i> , <i>Surety Bond Co-Guarantee</i> , Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa <i>Available on Surety Bond, Surety Bond Co-Guarantee, Construction Credit Guarantee and Procurement of Goods/Services products</i>
8	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi <i>Co-Guarantee</i> <i>Available on Counter Bank Credit Guarantee, Counter Bank Credit Co-Guarantee products</i>
9	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; <i>Guarantee of domestic documented letters of credit done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives;</i>	✗	belum/tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
10	Penjaminan <i>letter of credit</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Letter of credit guarantees done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✗	belum/tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>

No.	Kegiatan Activities	Telah/ Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
11	Penjaminan kepabeanaan (<i>Custom Bond</i>) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Custom Bonds done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond</i>
12	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Excise Guarantees done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond products</i>
13	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (<i>start up business</i>) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Financing guarantees for start-up businesses which meets the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on General Credit Guarantee and Micro Credit Guarantee products</i>
14	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; <i>Guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on Micro Credit Guarantee products</i>
15	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan BUMN lain <i>Guarantee in the context of synergy between the Company with other state-owned enterprises</i>	✓	Terdapat dalam produk <i>Surety Bond</i> , Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan Invoice <i>Available on Surety Bond, Co-Guarantee for People's Business Credit, Invoice Financing Guarantee products</i>
16	Penjaminan sistem resi gudang <i>Warehouse receipt system guarantees</i>	✗	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Subsidi Resi Gudang <i>Available on the Warehouse Receipt Subsidy Credit Guarantee products</i>
17	Penjaminan Kredit Berbasis Resi Gudang <i>Warehouse Receipt-based Credit Guarantees</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Skema Subsidi Resi Gudang dan Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Available on Warehouse Receipt Subsidy Scheme Guarantee and Warehouse Receipt Credit Guarantee products</i>
18	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan <i>Credit Guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purpose and objectives of the Company</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Arrum <i>Available on Multipurpose Credit Guarantee, Arrum Credit Guarantee products</i>
19	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan <i>Provision of management consulting services related to Guarantee business activities</i>	✓	Dilakukan oleh korporasi <i>Conducted by the Corporation</i>
20	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Ranking, management consulting, management services, assistance/ empowerment, and other services for Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives; and</i>	✓	Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM <i>Conducted by Risk Management and SMEs Ranking Management Consulting (PUKM) Division</i>

No.	Kegiatan Activities	Telah/ Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
21	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. <i>Other main business activities after obtaining approval from Financial Services Authority and/or other related institutions in accordance with their authorities</i>	✓	Penjaminan Bersama KUR <i>Co-Guarantee for People's Business Guarantee</i>

✓ = sudah dijalankan | ✗ = belum/tidak dijalankan
✓ = has been performed | ✗ = has not been performed

Kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf r dan huruf s. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

The main Company business activities written above are able to be conducted in the form of co-guarantee unless it is a main business activity mentioned in paragraph 2 letter r and letter s. Apart from the main business activities mentioned in paragraph 2, the Company may conduct business activities in order to optimize the utilization of Company resources.

PRODUK DAN JASA

Product and Services

Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit (terjamin) kepada penerima jaminan. Proses penjaminan kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut penerima jaminan, debitur kredit yang disebut terjamin, dan perusahaan penjamin kredit yang disebut penjamin.

Credit Guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit providing business entity called the Guarantee Recipient, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.

Prinsip dasar penjaminan kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sampai penerima jaminan menyatakan kredit terjamin tersebut lunas.

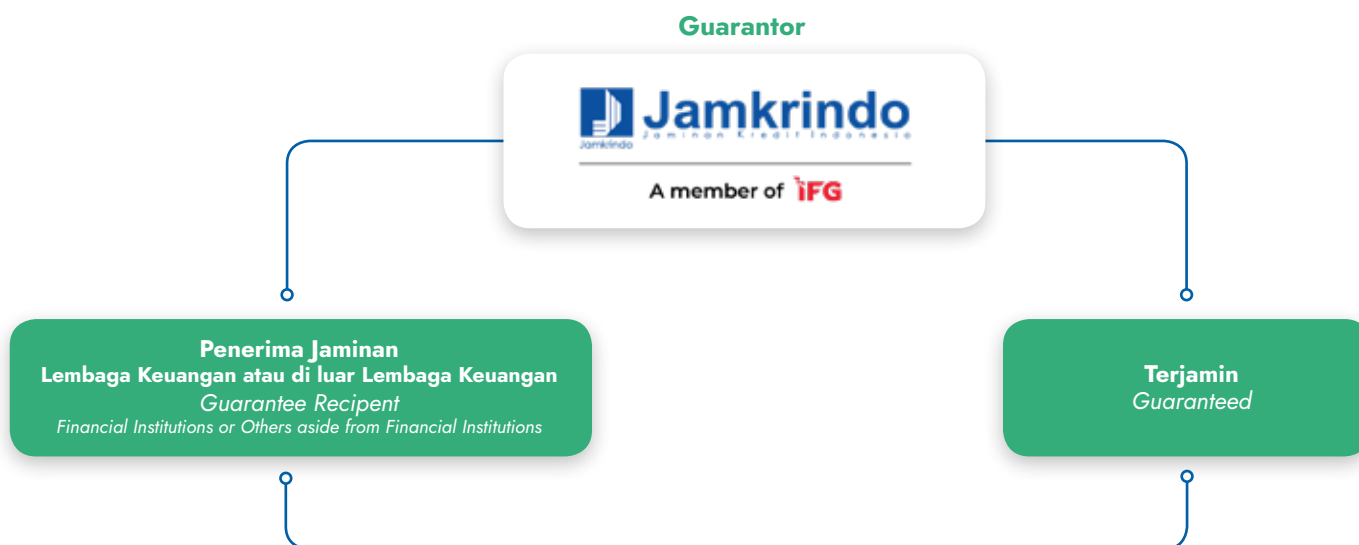
The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Guarantee Recipient but does not eliminate the guaranteed's financial obligations to the Guarantee Recipient until the Guarantee Recipient states the Guaranteed Credit is paid off.

Penjaminan kredit diperlukan oleh penerima jaminan pada saat permohonan kredit dari terjamin dinyatakan layak oleh penerima jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Recipient when the loan application from the Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Recipient but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of the fulfillment of the collateral adequacy (unbankable).

Proses Penjaminan Kredit

Credit Guarantee Process



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Recipient of Guarantee but does not eliminate guaranteed financial obligations to the Recipient of Guarantee until the Recipient of Guarantee states the Guaranteed Credit is paid off.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is required by the Guarantee Receiver when the loan application from Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Receiver but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of unbankable fulfillment of collateral.

Jenis-jenis Produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

The types of guarantee business products include the following:

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Guarantee of People's Business Credit (KUR)</i>	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. <i>Credit/Financing of Working Capital and/or investment to MSMEs and Cooperatives in a productive and feasible, but not yet bankable business field, which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help the development of productive businesses.</i>

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
Penjaminan KPR Sejahtera FLPP <i>Sejahtera Mortgage Guarantee - Housing Financing Liquidity Facility</i>	Penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerjasama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. <i>Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed instalments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.</i>
Penjamin Sistem Resi Gudang <i>Guarantee on the Warehouse Receipt System</i>	Kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang <i>Guarantee activities that protect the rights of Warehouse Receipt Holders and/or Guarantee Rights Recipients in the event of failure, inability and/or bankruptcy of the Warehouse Manager in carrying out their obligations as well as maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System</i>
Penjaminan Kredit Umum <i>Guarantee on General Credit</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) <i>Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Beneficiary to the Guaranteed for the purposes of additional Working capital and/or Investment in order to increase and develop the Guaranteed business (The guarantee process is carried out on a case by case basis)</i>
Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Produktif, yang jumlah plafond kredit sesuai dengan ketentuan kredit mikro di Penerima Jaminan, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara otomatis bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>). <i>Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).</i>
Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa <i>Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bouwheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional. <i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bouwheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.</i>

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
Penjaminan Kredit Multiguna <i>Multipurpose Credit Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan Lainnya (<i>Non Bank</i>) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif. <i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/ Government agency) whose distribution is done directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.</i>
Penjaminan Distribusi Barang <i>Goods Distribution Guarantee</i>	Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrik (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan <i>case by case</i>) <i>Credit guarantees for credit/financing of distribution which is provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case-by-case basis)</i>
Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi <i>Guarantee on Guarantee/Counter-Bank Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan Penjamin (Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi <i>A guarantee given by the Guarantor (Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted</i>
Surety Bond	Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i> , maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut <i>A three-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Bondee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations</i>
Payment Bond	Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan. <i>Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the payment of the Guaranteed to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver.</i>

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
Customs Bond	Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & import dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada <i>Obligee</i> (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya <i>Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations</i>
Penjaminan Keagenan Kargo <i>Cargo Agency Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>. <i>Guarantee given to the Guarantee Beneficiary/Obligee (Transportation Service Provider Company) for the obligations of the Guaranteed/Principal (Cargo Agent) in making the payment of freight charges to the Beneficiary of the Guarantee/Obligee.</i>
Penjaminan Invoice Financing <i>Guarantee of Invoice Financing</i>	Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh penerima jaminan <i>Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients</i>
Penjaminan Supply Chain Financing <i>Guarantee of Supply Chain Financing</i>	Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari Perusahaan Inti tertentu berupa KMK <i>pre-financing</i>, KMK <i>Post Financing</i> dan KMK Distributor. <i>Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain Core Companies in the form of KMK Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.</i>
Penjaminan Kemaritiman/Jaring <i>Maritime/Fisheries Guarantee</i>	Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan. <i>Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries.</i>
Penjaminan Pembiayaan Otomotif <i>Automotive Financing Guarantee</i>	Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna. <i>Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose.</i>
Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang <i>Credit Guarantee on Subsidy Scheme of Warehouse Receipt</i>	Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan Non-Bank Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No.9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya <i>The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks/Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No.9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments.</i>

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Warehouse Receipt Credit Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No.9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau Oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/CMA</i>). <i>Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management.</i>
Penjaminan Fintech <i>Fintech Guarantee</i>	Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada borrower. <i>Guarantee on information technology-based money lending services that are channelled by the lenders through the organizer (peer to peer lending) to the borrower.</i>
Penjaminan KPR <i>Guarantee of Home Ownership Loans</i>	Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (<i>Non-Bank</i>) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/ apartemen, rumah kantor, rumah toko. <i>Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse.</i>
Penjaminan Capital Management Guarantee (CMG) <i>Guarantee on Capital Management Guarantee (CMG)</i>	Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. <i>Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.</i>
Penjaminan Program PEN <i>PEN Program Guarantee</i>	Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease 2019</i> (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional <i>Guarantees provided in the context of implementing Government Regulations concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or facing threats that endanger the National Economy and or Financial System Stability and National Economic Rescue.</i>

KOMPETENSI INTI

Core Competence

Kompetensi inti berpotensi besar dalam memperkuat *competitive advantage*. namun demikian, *competitive advantage* yang kuat masih dapat terhalangi oleh faktor-faktor dinamis dalam persaingan pasar, seperti kurangnya kesetiaan pelanggan dan tidak adanya *customer relationship*. Saat ini dan masa yang akan datang, Perusahaan memiliki beberapa tantangan strategis berkaitan dengan faktor-faktor dinamika persaingan pasar yang terkait dengan potensi *moral hazard* pada customer.

Core competencies have a great potential in strengthening competitive advantage. However, strong competitive advantage can still be hampered by dynamic factors in market competition, such as lack of customer loyalty and lack of customer relationships. At present and in the future, the Company has several strategic challenges related to the dynamics of market competition factors related to the moral hazard potential of the customer.

Kriteria Identifikasi Identification Criteria	Accessibility	Perluasan pasar melalui kolaborasi BUMN dan peningkatan efisiensi melalui kolaborasi Holding. <i>Market expansion through the collaboration of SOEs and increased efficiency through the collaboration of Holding.</i>	
	Unik/Langka <i>Unique/Rare</i>	Satu-satunya BUMN yang bergerak di bidang penjaminan khusus untuk UMKM. <i>The only state-owned enterprise engaged in special guarantees for MSMEs.</i>	
	Value Creation	Mengoptimalkan reputasi dan citra terpercaya sebagai anggota Holding BUMN Perasuransian dan Penjaminan untuk membentuk <i>brand preference</i> di mata pelanggan. <i>Optimizing reputation and trusted image as a member of SOE's Holding in Insurance and Guarantee to form brand preference in the eyes of customers.</i>	
Risiko <i>Risk</i>	1. Target bisnis tidak tercapai 2. Penularan COVID-19 pada SDM Perusahaan 3. Ketidaksesuaian data pada sistem ICPR 4. Penyelesaian klaim tidak sesuai SLA 5. Kehilangan aset Perusahaan 6. Rasio klaim penjaminan yang tinggi 7. Subrogasi tidak tertagih 8. Bisnis penjaminan terhambat 9. Terhambatnya pembayaran klaim 10. Kesalahan pelaporan perpajakan.	1. <i>Business target not achieved</i> 2. <i>Transmission of COVID-19 in the Company's Human Resources</i> 3. <i>Data discrepancies in ICPR systems</i> 4. <i>Settlement of claims not in accordance with SLA</i> 5. <i>Loss of Company assets</i> 6. <i>High guarantee claim ratio</i> 7. <i>Uncollectible subrogation</i> 8. <i>Guarantee business is hampered</i> 9. <i>Claims payments are hampered</i> 10. <i>Tax reporting errors.</i>	
Kendala <i>Obstacles</i>	1. Kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan hambatan pada kinerja Perusahaan. 2. Adanya kesulitan meningkatkan pendapatan subrogasi karena adanya kesulitan pada mitra bank dalam proses penagihan. 3. Persaingan usaha yang semakin ketat. 1. <i>The condition of the COVID-19 pandemic hinders the Company's performance.</i> 2. <i>There is difficulty in increasing subrogation revenue due to difficulties in billing process at bank partners.</i> 3. <i>Business competition is getting tighter.</i>		

Sesuai kriteria identifikasi di atas dan hasil pengembangan model bisnis Perusahaan, kompetensi inti Perusahaan adalah sebagai berikut:

In accordance with the above identification criteria and the results of the development of the Company's business model, the Company's core competencies are as follows:

- Kapasitas penjaminan terhadap UMKM sangat besar
- Jamkrindo lebih memahami UMKM
- Memiliki keahlian dan reputasi yang baik dalam bidang penjaminan kredit UMKM
 - Kecepatan pembayaran klaim penjaminan kredit
 - Melayani produk sesuai dengan kebutuhan mitra kerja (*customized product*)
- Memiliki modal yang besar dan dukungan yang besar dari pemerintah
- Sistem informasi yang terintegrasi secara internal maupun eksternal dengan mitra kerja.
- Penguatan model bisnis dengan bergabung dalam Holding Perasuransian dan Penjaminan.

- The guarantee capacity of MSMEs is very large*
- Jamkrindo better understands MSMEs*
- Having good expertise and reputation in the field of MSMEs credit guarantee.*
 - Speed of payment of credit guarantee claims.*
 - Serving products according to the needs of partners (customized products).*
- Having large capital and great support from the Government*
- Information systems that are integrated internally and externally with partners.*
- Strengthening the business model by joining to the Insurance and Guarantee Holding*

PASAR YANG DILAYANI DAN WILAYAH OPERASIONAL

Market Served and Operational Areas



- | | | | |
|---|---------------------|---|-------------------------|
|  | Kanwil I Medan |  | Kanwil VI Surabaya |
|  | Kanwil II Palembang |  | Kanwil VII Denpasar |
|  | Kanwil III Jakarta |  | Kanwil VIII Banjarmasin |
|  | Kanwil IV Bandung |  | Kanwil IX Makassar |
|  | Kanwil V Semarang |  | KC (Kantor Cabang) |

Dalam memberikan pelayanan ke penjuru negeri, Jamkrindo hadir dengan Jaringan Layanan yang tersebar diseluruh Indonesia. Berikut adalah peta sebaran wilayah operasional Jamkrindo:

In providing services throughout the country, Jamkrindo comes with a Service Network spread throughout Indonesia. The following is a map of the distribution of Jamkrindo's operational areas:



KANTOR PUSAT

Head Office

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA

Gedung Jamkrindo

Jamkrindo Building

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Indonesia

KONTAK

Contact

+62 21 6540335
+62 21 6540344, 6540348
contact@jamkrindo.co.id
www.jamkrindo.co.id

ENTITAS ANAK

Subsidiaries

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH

Gedung Jamsyar

Jamsyar Building

Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4
Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat 10510
Indonesia

KONTAK

Contact

+62 21 6540386
+62 21 6540389
info@jamkrindosyariah.com
www.jamkrindosyariah.com

Kantor Wilayah/Regional Office

Kantor Wilayah Regional Office		Alamat Address
I	Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II	Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT) Kec. Kemuning Palembang 30127; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III	Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: (021) 6540335 Fax: (021) 6540387
IV	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung. Telp : (022) 7815088 Fax: (022) 7800891
V	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024) 7614138
VI	Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII	Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar-80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII	Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX	Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Telp: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus/Special Branch Office

Kantor Cabang Khusus Special Branch Office	Alamat Address
Kantor Cabang Khusus Jakarta Jakarta Special Branch Office	Gedung Lippo Kuningan Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan Jakarta Selatan 12920

Kantor Cabang/Branch Offices

Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827 / 4155767 Fax: (061) 4156775
	2 Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp: 0761-854311, 854870 Fax: 0761-848801
	3 Aceh	Jl. Syah Kuala No.10 A-B Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh 23126; Telp: (0651) 8016790 Fax: (0651) 8011094
	4 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165
	5 Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6 Telp: (0771) 316919
	6 Batam	Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah, Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No. 9, Batam Center Telp: (0778) 7495993
	7 Balige	Jl. Sisingamangaraja No.87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 Sumatera Utara Telp/Fax : (0632) 21501/ (0632) 21722
II	8 Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak no.188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398
	9 Jambi	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115
	10 Bengkulu	Jl. Ahmad Yani RT. 004 / RW. 001 No. 28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
	11 Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
	12 Pangkalpinang	Jl. A. Yani No. 11 H Pangkalpinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816

Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
III	13 Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610 Telp: (021) 6540409
	15 Pontianak	Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468
	16 Serang	Ruko Cipare Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No. 34, Serang, Banten - 42117, Telp/Fax : (0254) 228999/ (0254) 229247
	17 Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322
IV	18 Bandung	Jl. Soekarno Hatta KM 12 No. 722 Gedebage, Bandung Telp: (022) 7816267
	19 Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No. 10 B RT. 004 RW. 005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	20 Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 No. 55 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	21 Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No. 90 RT.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	22 Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya Telp: (0265) 314169
V	23 Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136 / 7610129 Fax: (024) 7614138
	24 Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288 / 5012323 Fax: (0274) 5012545
	25 Solo	Jl. Honggowongso No.141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Telp: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030
	26 Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	27 Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah – 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	28 Pekalongan	Komplek Ruko Diponegoro Jl. Diponegoro No. 38, Dukuh, Pekalongan Utara. Pekalongan – 51146; Telp: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777
	29 Surabaya	Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya; Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592
	30 Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881
VI	31 Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	32 Malang	Jl. Letjend S. Parman No. 56 Blok A-4 Malang; Telp: (0341) 4377377 Fax: (0341) 4378177
	33 Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun – 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249
VII	34 Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Telp: (0361) 286854
	35 Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Telp: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572
	36 Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp: 0371-2629239
	37 Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT. 20, RW. 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088

Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
VIII	38 Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	39 Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	40 Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No. 6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112 Telp/fax : (0536) 4264269/(0536) 3242394
	41 Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT. 04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
	42 Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033
	43 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Telp: (0411) 873031
	44 Gorontalo	Jl. HB Hasin (KH Agus Salim) No. 222 Gorontalo Telp: 0435-828003
	45 Mamuju	Jl. Marthadinata No.11 Telp : (0426) 2324878
	46 Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770
	47 Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Telp: (0921) 3122739
IX	48 Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura Ruko Pasifik Permai Blok H No. 17 Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara Telp: (0967) 524424
	49 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari Papua Barat Telp: (0986) 214184
	50 Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Sulteng 94121 Telp: (0451) 4131812
	51 Kendari	Jl. La Ode Hadi No. 56 B Kendari – 93118 Telp: (0401) 3196780
	52 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43 Manado Telp: (62-431) 865194/865198
	53 Bitung	Jl. Sam ratulangi No.1 Bitung, Sulawesi Utara Telp: (0438) 35939
	54 Pare-pare	Jl. Andi mappatola No. 30 c parepare, Sulawesi Selatan Telp: 0421-2914592
	55 Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	56 Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong - Papua Barat Telp: (0951) 329081

Kantor Unit Pelayanan (Kup)/Service Unit Offices (KUP)

Kantor Wilayah Regional Office	KUP KUP	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl. Jendral Sudirman No. 391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No. 04 Rantau Prapat Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3 Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4 Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No. 366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatera Selatan Telp: 0733 3281182
III	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Telp: (0251) 7564211
	6 Cibinong	Ruko Cibinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29 Cibinong Kab Bogor Telp: (021) 29335250
	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A No. 7 Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi

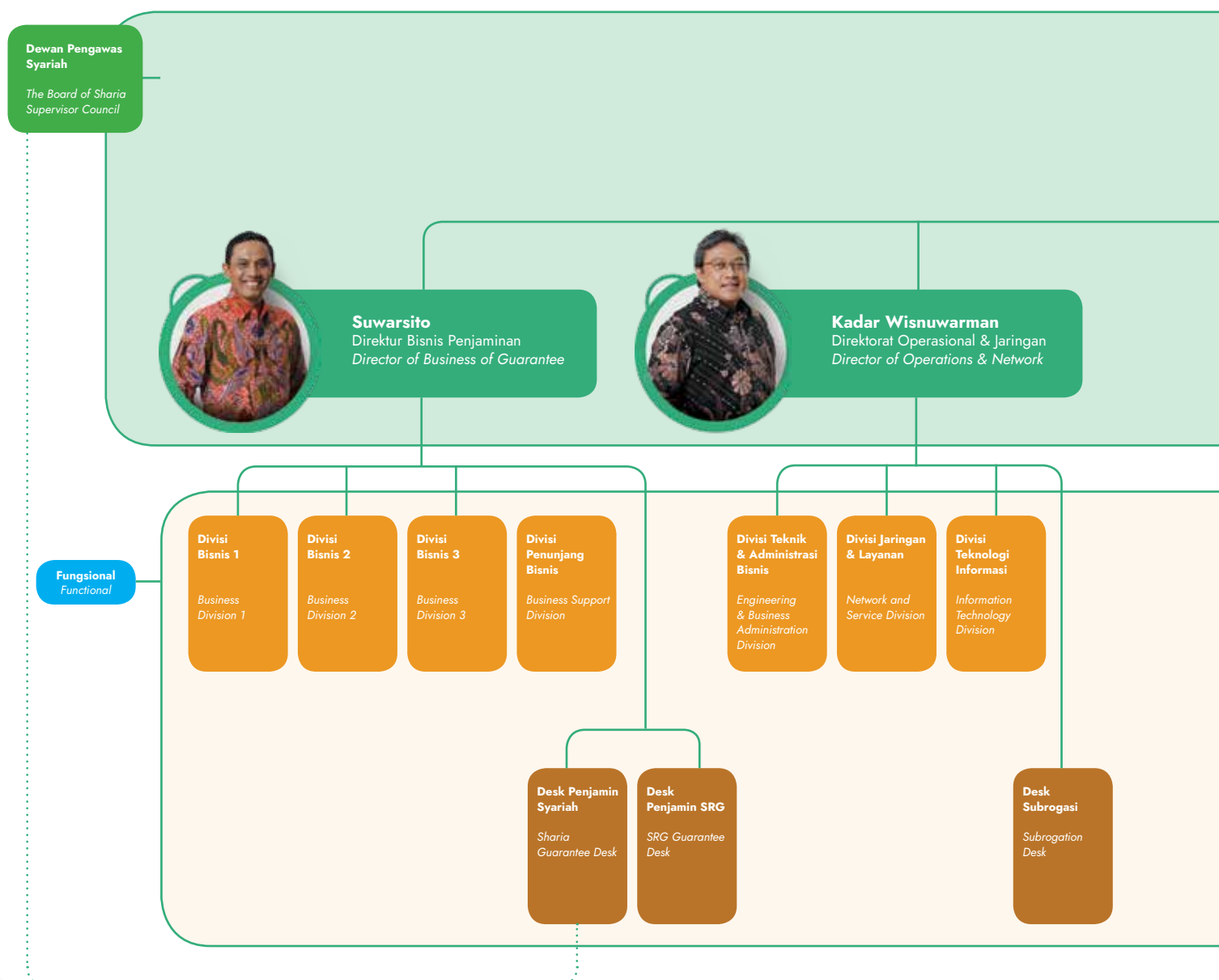
Kantor Wilayah Regional Office	KUP KUP	Alamat Address
IV	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah: Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	10 Cilacap	Jl Jend. Sudirman No. 17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
VI	11 Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 360 b. Surabaya; Telp: (031) 87858114 Fax: (031) 87858114
	12 Pamekasan	Jl Jokotole No. 26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Telp: 0324 - 3510118
	13 Jember	Jl. Gajah Mada No. 187 Jember Telp: 0331 - 4431044
	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
VIII	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113
IX	16 Watampone	Jalan Ahmad Yani No. 29 B Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kaba Watampone Provinsi Sulsel Telp: 0481 2921375

STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure

Struktur Organisasi PT Jamkrindo telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Berikut struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2020.

The organizational structure of PT Jamkrindo has been stipulated in the Decree of the Board of Directors No.01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018 concerning the Organizational Structure of Public Companies Jaminan Kredit Indonesia. The following is the Company's organizational structure as of December 31, 2020.





Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama
President Director



Sulis Usdoko
Direktur MSDM,
Umum, & Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs
and Compliance



I. Rusdonobanu
Direktorat Keuangan,
Investasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment
and Risk Management

**Sekretaris
Perusahaan**
Corporate
Secretary

**Satuan
Pengawasan
Intern**
Internal Control
Unit

**Divisi
Perencanaan
Strategis**
Strategic Planning
Division

**Divisi
Manajemen
Sumber Daya
Manusia(MSDM)**
HRM Division

Divisi Umum
General Affairs
Division

**Divisi
Hukum dan
Kepatuhan**
Legal and
Compliance
Division

**Divisi
Keuangan dan
Investasi**
Finance and
Investment
Division

**Divisi
Akuntansi**
Accounting
Division

**Divisi
Manajemen
Risiko (PUKM)**
Risk Management
(PUKM) Division

Divisi Klaim
Claim Division

Wilayah
Regional

Cabang Tipe A/B/C/D
Branch Type A/B/C/D

Unit Pelayanan
Service Unit

Kantor Cabang Khusus
Special Branch Office

SKALA ORGANISASI

Organization Scale

Jamkrindo memiliki 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan memiliki aset sebesar Rp19,38 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 10,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam menjalankan operasional Perusahaan sehari-hari, Jamkrindo didukung oleh 1.743 orang total karyawan pada tahun 2020, dengan 965 karyawan tetap. Skala perusahaan per tahun 2020, baik dari segi operasional maupun finansial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jamkrindo has 9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (Kantor Unit Pelayanan or KUP) throughout Indonesia. The company has assets of IDR19.38 trillion. This number increased by 10.47% compared to the previous year. Meanwhile, in carrying out the day-to-day operations of the Company, Jamkrindo is supported by 1,743 total employees in 2020. The scale of the company per 2020, both from an operational and financial perspective, can be seen in the following table:

Deskripsi <i>Description</i>	Satuan <i>Unit</i>	2020	2019
Jumlah Karyawan Tetap <i>Total Permanent Employee</i>	Orang <i>People</i>	965	965
Total Operasi <i>Total of Operation</i>	Unit Kantor <i>Office Unit</i>	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (Kantor Unit Pelayanan or KUP) throughout Indonesia</i>	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (Kantor Unit Pelayanan or KUP) throughout Indonesia</i>
Aset <i>Asset</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	19.122.829	16.770.270
Liabilitas <i>Liabilities</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	10.266.950	8.092.195
Ekuitas <i>Equity</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	8.855.879	8.678.075
Imbal jasa penjaminan bersih <i>Net Guarantee Revenue</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	2.633.393	2.152.072
Laba Bersih Tahun Berjalan <i>Profit for the Year</i>	Jutaan Rupiah <i>Million Rupiah</i>	456.133	198.911

PEMEGANG SAHAM

Shareholders

Rincian Pemegang Saham/Pemilik Modal

Perusahaan memiliki bentuk Perusahaan Perseroan. Kepemilikan Saham dari para Pemegang Saham dapat disampaikan sebagai berikut,

Detail of Shareholders/Capital Owners

The company has the form of a Company. Share Ownership from the Shareholders can be submitted as follow

Kepemilikan Saham pada PT Jamkrindo Per 31 Desember 2020

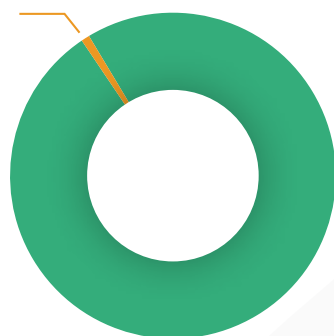
Jamkrindo's Ownership as of December 31, 2020

Pemilik Modal Shareholders	Jumlah Saham (lembar) Total Shares (Sheet)	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh (Rp) Paid-Up and Issued Capital (IDR)	Persentase Kepemilikan (%) Percentage of Ownership (%)
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	1	1.365.160	0,0000001787%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	7.638.732	7.638.732.000.000	99,9999998213%
Jumlah Total	7.638.733	7.638.733.365.160	100%

Komposisi Kepemilikan Jamkrindo

Jamkrindo's Ownership Composition

0,0000001787%%



PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
(Persero)

Negara Republik Indonesia
Republic of Indonesia

99,9999998213%

Informasi Tentang Pemegang Saham

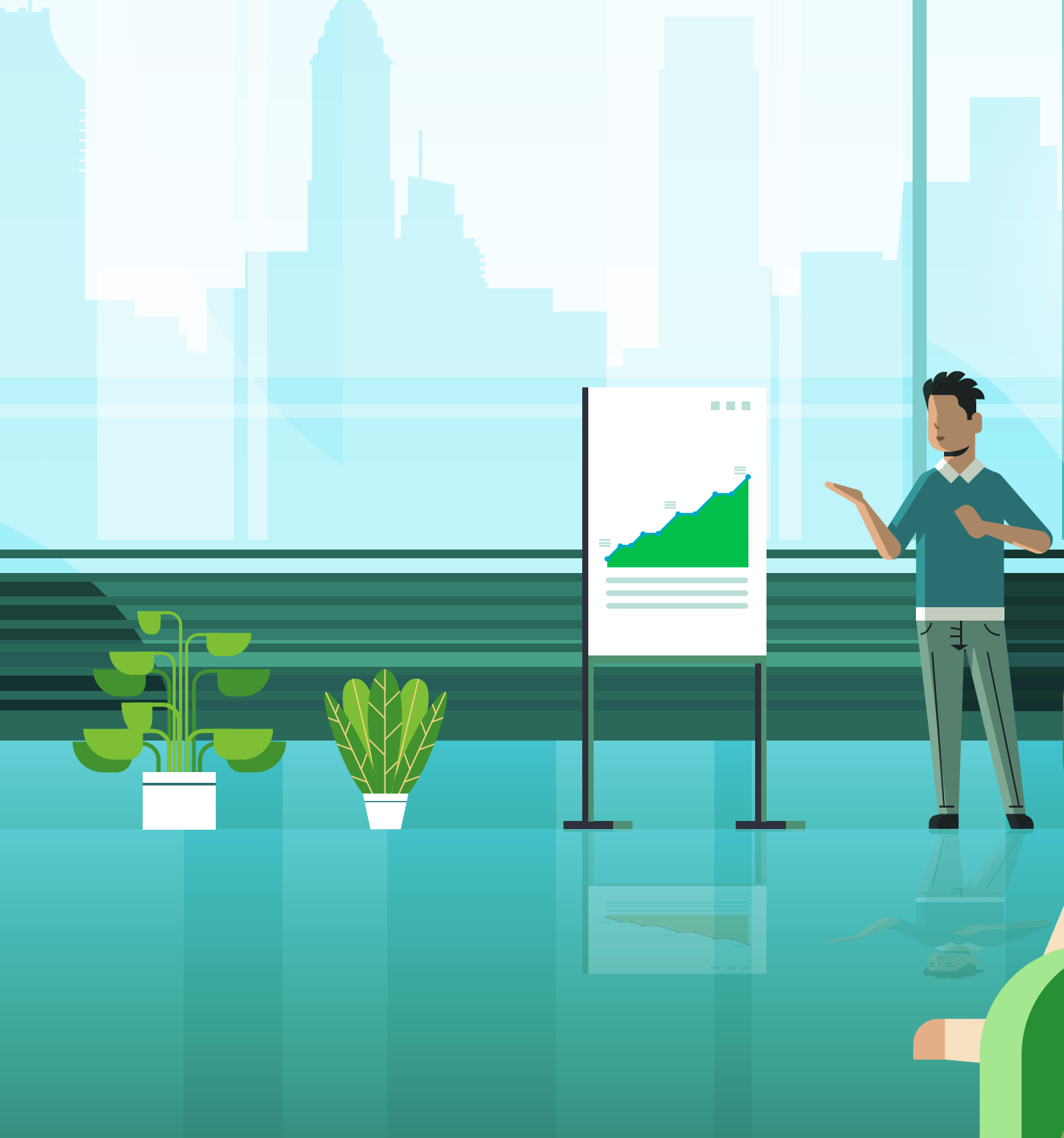
Pemegang saham utama Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar 0,0000001787%, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar 99,9999998213%.

Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, dan Program Kepemilikan Saham Manajemen. Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan modal sesuai dengan penjelasan diatas. Untuk itu, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

Information About Shareholders

The main shareholders of the Company are the State of the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/the Ministry of State-Owned Enterprises at 0.0000001787%, and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) at 99.9999998213%.

The company does not have an Employee Share Ownership Program and Management Share Ownership Program policies. The company also did not conduct an Initial Public Offering of shares which allowed public ownership of the Company's shares. All capital ownership is in accordance with the explanation above. For this reason, no Company official or employee owns the Company's shares.



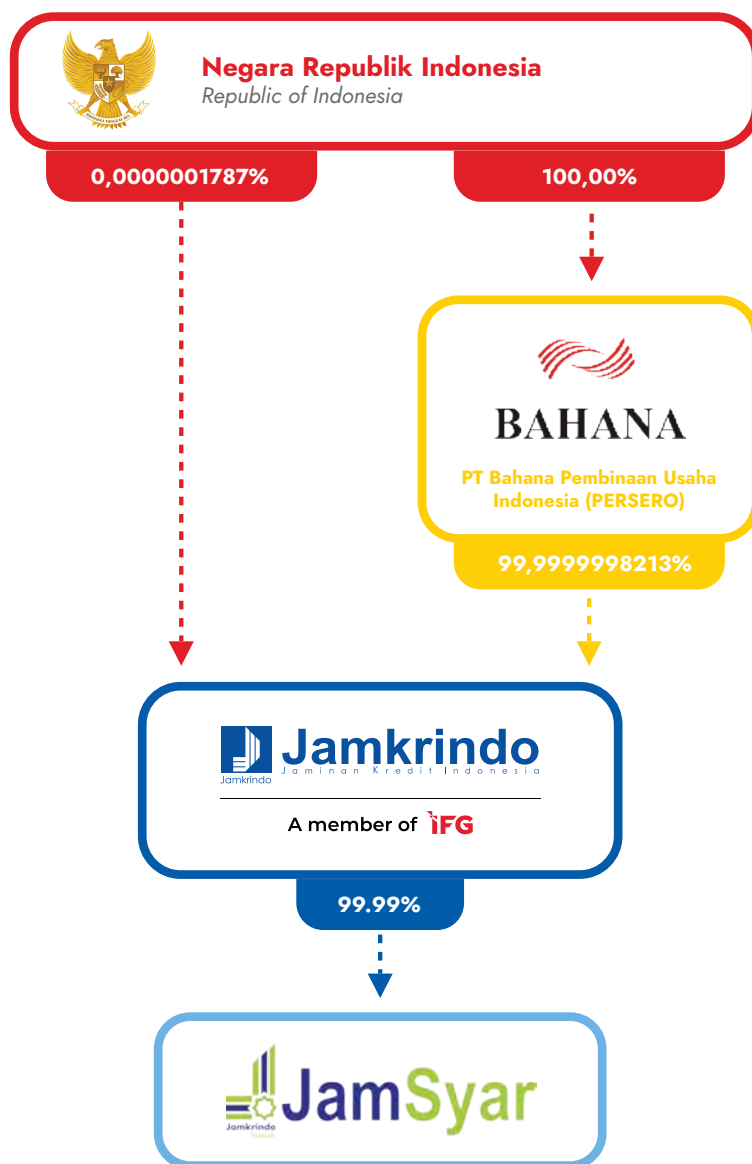
PKBL DI JAMKRINDO

PKBL at Jamkrindo



STRUKTUR GRUP DAN INFORMASI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

Group Structure and Information on Subsidiaries



Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (Jv)/Special Purpose Vehicle (Spv)

List of Subsidiaries and Associates/Joint Venture (Jv)/Special Purpose Vehicle (Spv)

Entitas Anak Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham Shares Ownership (%)		Jumlah Aset Total Assets (Rp-juta) (Rp- million)		Status Operasi Operational Status
					2020	2019	2020	2019	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Services	Jakarta	2014	2014	99,997%	99.996 %	1.573.879	1.184.644	Beroperasi Operating



PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No.68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No.S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung tagline "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, responsif, dan Inovatif".

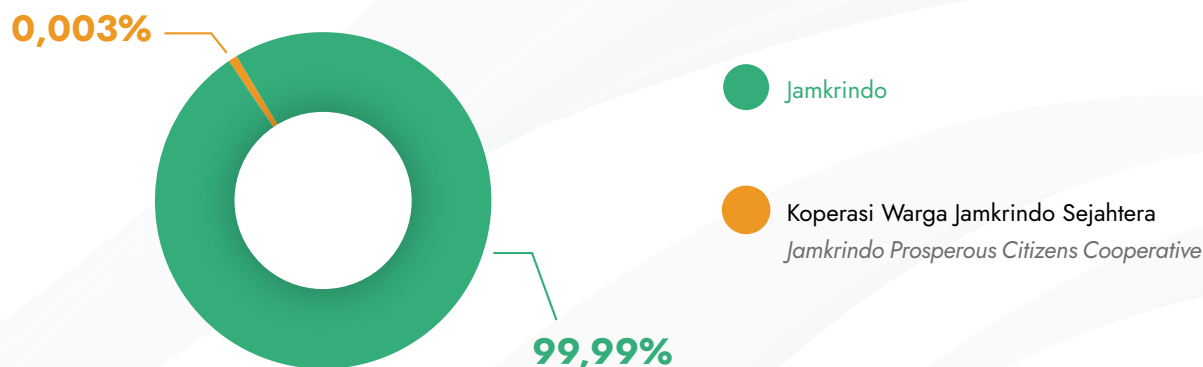
Informasi tentang kepemilikan, kinerja, dan manajemen Jamsyar adalah sebagai berikut,

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014, and obtained an operation permit on November 7, 2014. Jamsyar was formed through Notarial Deed No.68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014, which was registered with the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Justice and Human Rights No.AHU- 26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014, It received an operating permit from the Financial Services Authority (FSA) through the FSA letter No.KEP-134/d.05/2014 dated November 7, 2014, concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No.S-34/nB.223/2015 dated January 15, 2015, concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

Information about Jamsyar's ownership, performance, and management are as follows:

Kepemilikan Saham Jamsyar

Jamsyar Shares Ownership



LANDASAN HUKUM DAN KEBIJAKAN KEGIATAN PKBL

The Legal and Policy Basis for PKBL

PT Jamkrindo bergerak di bidang jasa keuangan non bank dengan maksud dan tujuan Perusahaan ini adalah untuk melakukan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik Negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang tertuang dalam Akta No.2 Tanggal 9 April 2020.

Jamkrindo mendapat penugasan untuk melaksanakan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) di wilayah kerja Jamkrindo. Program Kemitraan tersebut meliputi penyaluran dana dalam bentuk pinjaman dan dana pembinaan (hibah) kepada mitra binaan (usaha kecil dan koperasi) untuk mendorong dan mengembangkan kegiatan usahanya agar menjadi tangguh dan mandiri sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Sedangkan Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat dalam bentuk pemberian bantuan kepada masyarakat di sekitar wilayah kerja Jamkrindo.

Dana PKBL tersebut di atas bersumber dari bagian laba Jamkrindo yang setiap tahun dialokasikan untuk dana PKBL. Penyaluran pinjaman dan Dana Pembinaan (hibah) dari dana Program Kemitraan ditargetkan pada mitra binaan yang memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Dengan demikian, melalui penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya usaha kecil dan koperasi yang pada akhirnya mampu bermitra dengan lembaga keuangan formal (bank atau lembaga keuangan bukan bank).

Dasar Kebijakan PKBL

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) bertujuan guna mendorong kegiatan positif perusahaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dalam menjalankan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, PT Jamkrindo mengacu pada kebijakan-kebijakan berikut:

1. Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.
2. Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
3. Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

PT Jamkrindo is engaged in bank financial services with the intent and purpose of this Company being to carry out business activities of Guarantee for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantee for State-Owned Enterprises, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees as well as optimizing the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance as stated in Deed No.2 dated April 9, 2020.

Jamkrindo was assigned to implement the Partnership Program and Community Development Program (PKBL) in the work area of Jamkrindo. The Partnership Program includes channeling funds in the form of loans and coaching funds (grants) to fostered partners (small businesses and cooperatives) to encourage and develop their business activities to become resilient and independent so that they can improve people's lives. Meanwhile, the Community Development Program is an empowerment program for the social conditions of the community in the form of providing assistance to communities around the work area of Jamkrindo.

PKBL funds mentioned above come from the profit share of Jamkrindo which is allocated annually for PKBL funds. The distribution of loans and coaching funds (grants) from the Partnership Program funds is targeted at fostered partners who have good prospects for development. Thus, through the distribution of the Partnership Program loan funds, it is hoped that it can help the creation of small businesses and cooperatives that will eventually be able to partner with formal financial institutions (banks or non-bank financial institutions).

Basis of PKBL Policy

The Partnership and Community Development Program (PKBL) aims to encourage positive company activities that support people's economic growth. In carrying out the Partnership and Community Development Program, PT Jamkrindo refers to the following policies:

1. Government Regulation No.32 of 1998 concerning Guidance and Development of Small Business.
2. Law No.19 of 2003 concerning State Owned Enterprises.
3. Law No.20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises.

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-08/MBU/2013 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (Permen BUMN No.5/2007).
 5. Surat Edaran Menteri Negara BUMN No.SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Pebruari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (PKBL) Badan Usaha Milik Negara.
 6. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 7. PER-03/MBU/12/2016 tentang perubahan atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
 8. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017.
 9. Surat Edaran Direksi No.113/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Kebijakan Akuntansi dan SOP Program Kemitraan dan Bina Lingkungan
 10. Peraturan Direksi Jamkrindo No.02/Per-Dir/1/II/2021 tentang Pedoman Pendelegasian Kewenangan Administrasi dan Kebijakan PT Jamkrindo
 11. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 2 April 2020.
4. *Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No.PER-05/MBU/2007 of 2007 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small-scale Businesses and Community Development Programs as last amended by Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-08 / MBU / 2013 of 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No.PER-05/MBU/2007 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small Businesses and Community Development Programs (Permen BUMN No.5/2007).*
 5. *Circular of the Minister of State for SOEs No.SE-02/MBU/Wk/2012 dated February 23, 2012 concerning the Stipulation of Accounting Guidelines for Partnership Programs and Community Development Programs (PKBL) for State-Owned Enterprises.*
 6. *PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises.*
 7. *PER-03/MBU/12/2016 concerning amendments to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises.*
 8. *PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises dated July 20, 2017.*
 9. *Circular Letter of the Board of Directors No.113/SE/1/XII/2020 dated December 30, 2020 regarding Accounting Policies and SOPs for Partnership and Community Development Programs*
 10. *Jamkrindo Board of Directors Regulation No.02/Per-Dir/1/II/2021 concerning Guidelines for Delegating Administrative Authority and Policy of PT Jamkrindo*
 11. *PER-02/MBU/04/2020 concerning the Third Amendment to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and the Community Development Program for State-Owned Enterprises dated April 2, 2020.*

SUSUNAN PENGURUS DAN SUMBER DAYA MANUSIA PKBL

Management Structure and Human Resources of the Partnership and Community Development Program

Berawal dari tahun 2003, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.65/DIR/XII/1998 tanggal 21 Desember 1998 tentang Struktur Organisasi Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, menggantikan Surat Keputusan Direksi No.43/DIR/I/1998 tanggal 5 Januari 1998 dan No.31/KPTS/PPK.2/IX/1995 tanggal 27 September 1995 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi, manajemen unit PKBL Jaminan Kredit Indonesia masih dilaksanakan oleh Divisi Pembiayaan Usaha.

Selanjutnya, menindaklanjuti Peraturan Menteri BUMN No.PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Direksi Jaminan Kredit Indonesia membentuk unit tersendiri yang khusus menangani unit PKBL sebagaimana termuat dalam Keputusan Direksi No.36/DIR/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Pengembangan pada Divisi Pengendalian.

Kemudian di tahun 2010 terjadi perubahan struktur organisasi yang tertuang dalam Keputusan Direksi No.33/Kep-Dir/VII/2010 tanggal 1 Juli 2010 perihal Struktur Organisasi Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan di bawah Direktorat Penjaminan pada Divisi Penjaminan Syariah.

Pada tahun 2012 dengan adanya Keputusan Direksi No.78/Kep-Dir/XI/2012 tanggal 26 November 2012 Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan berada di bawah Direktorat Pengembangan. Selanjutnya, Pada Tahun 2018, Struktur organisasi PT Jamkrindo mengalami perubahan, unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada di Direktorat Utama. Hal ini berdasarkan Ketetapan Direksi PT Jamkrindo Nomor 01/KD/1/V/2018. Selanjutnya diikuti dengan penempatan Pejabat dan Pegawai, Deskripsi Jabatan dan Analisis Jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jamkrindo.

Starting from 2003, based on the Decree of the Board of Directors No.65/DIR/XII/1998 dated December 21, 1998 concerning the Organizational Structure of the Cooperative Financial Development Corporation, replacing the Decree of the Board of Directors No.43/DIR/I/ 1998 dated January 5, 1998 and No.31/KPTS/PPK.2/IX/1995 dated September 27, 1995 concerning the Organizational Structure of Public Companies for Cooperative Financial Development, the management of the PKBL unit of the Jaminan Kredit Indonesia is still being carried out by the Business Financing Division.

Furthermore, following up on the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007, the Board of Directors of the Jaminan Kredit Indonesia formed a separate unit that specifically handles PKBL units as contained in the Decree of the Board of Directors No.36/DIR/X/2006 dated October 19, 2006 regarding the Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program Unit under the Directorate of Development in the Control Division.

Then in 2010 there was a change in the organizational structure contained in the Decree of the Board of Directors No.33/Kep-Dir/VII/2010 dated July 1, 2010 regarding the Organizational Structure of the Partnership and Community Development Program Unit under the Directorate of Guarantee in the Sharia Guarantee Division.

In 2012 with the Board of Directors Decree No.78/Kep-Dir/XI/2012 dated November 26, 2012 The Partnership and Community Development Program Unit is under the Directorate of Development. Furthermore, in 2018, the organizational structure of PT Jamkrindo underwent a change, the Partnership and Community Development Program unit became part of the Corporate Secretary who is in the Main Directorate. This is based on the Decree of the Board of Directors of PT Jamkrindo Number 01/KD/1/V/2018. This is followed by the placement of Officers and Employees, Job Descriptions and Position Analysis as well as Standard Operating Procedures (SOPs) for the implementation of the Partnership and Community Development Program Unit of PT Jamkrindo.

Pada Tahun 2018, Struktur organisasi Jamkrindo mengalami perubahan, unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan melalui Ketetapan Direksi Jamkrindo Nomor 01/KD/1/V/2018 menjadi bagian dari Sekretaris Perusahaan yang berada di Direktorat Utama. Selanjutnya diikuti dengan penempatan Pejabat dan Pegawai, Deskripsi Jabatan dan Analisis Jabatan serta *Standard Operating Procedure* (SOP) untuk pelaksanaan Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jaminan Kredit Indonesia.

In 2018, the organizational structure of Jamkrindo has changed; the Unit for Partnership and Community Development Program through the Decree of Jamkrindo's Board of Directors Number 01/KD/1/V/2018 became part of the Corporate Secretary in the Main Directorate. Subsequently followed by the placement of Officials and Employees, Job Descriptions and Job Analysis and Standard Operating Procedure (SOPs) for the implementation of the Partnership and Community Development Program Unit of Jamkrindo.

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PROGRAM KEMITRAAN dan BINA LINGKUNGAN

Organizational Structure of Partnership and Community Development Program Unit

PKBL Jamkrindo dikelola oleh Unit PKBL Jamkrindo dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan PKBL dapat dilaksanakan secara optimal dan terfokus dengan memisahkan penanganan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, promosi dan sebagainya) dengan fungsi administrasi dan keuangan. Unit PKBL Jamkrindo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Jamkrindo secara keseluruhan.

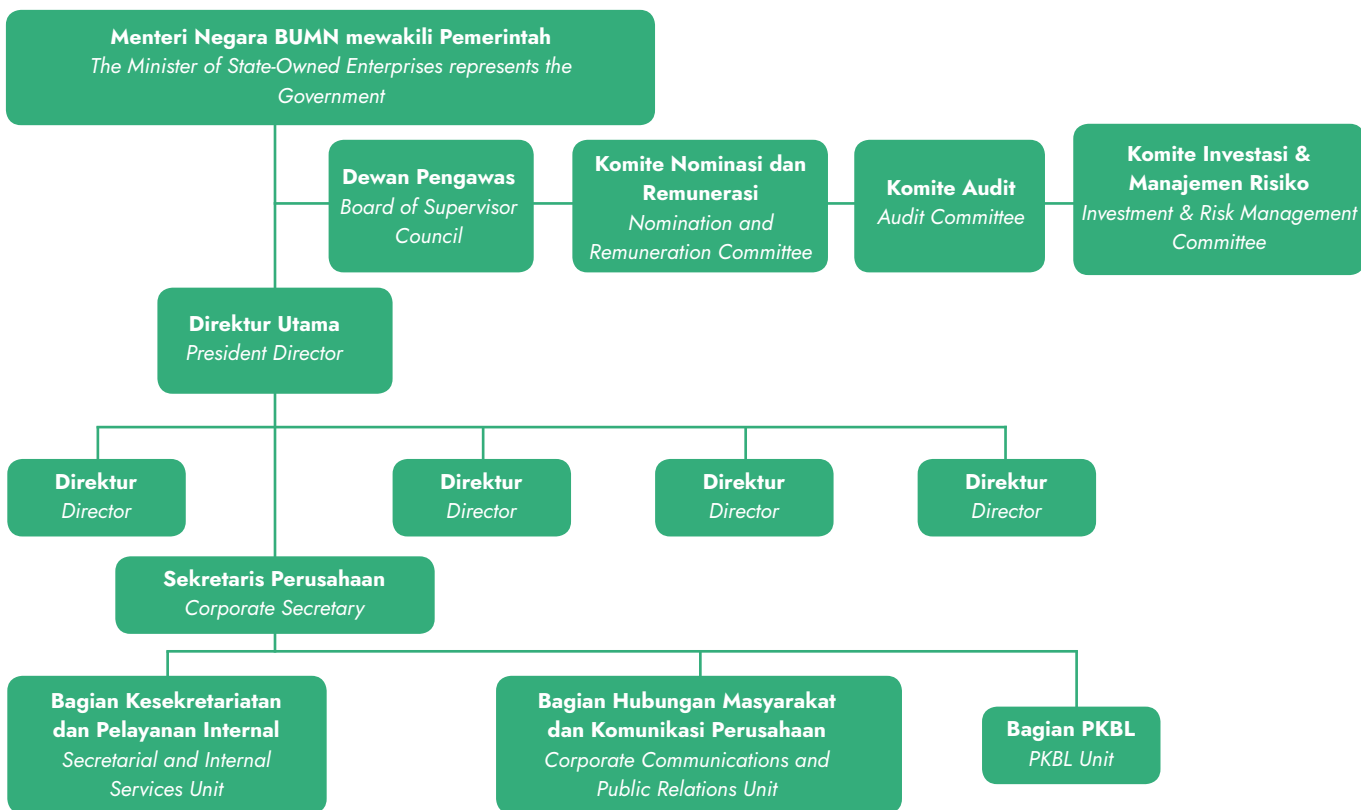
PKBL Jamkrindo is managed by the Jamkrindo PKBL Unit which is formed with the aim that PKBL management can be carried out optimally and focused by separating the handling of the guidance functions (evaluation, distribution, collection, training, promotion and so on) with administrative and financial functions. Jamkrindo's PKBL unit is an inseparable part of the overall Jamkrindo organizational structure.

Struktur Organisasi unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo pada saat Laporan Keberlanjutan ini di publikasikan adalah sebagai berikut:

The organizational structure of the Jamkrindo Partnership and Community Development Program unit at the time this Sustainability Report was published is as follows:

Direktur Board of Directors	Nama Name
Direktur Utama President Director	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Suwarnito
Direktur Operasional & Jaringan Director of Operations & Network	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan Director of HRM, General Affairs & Compliance	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko Director of Finance, Investment & Risk Management	I. Rusdonobanu

Staf Staff	Nama Name
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Abdul bari
Kepala Bagian PKBL Head of PKBL	Nenden Kania Puji Asri
Staf PKBL PKBL Staff	Retno Indriani



KEGIATAN UNIT PKBL

Partnership and Community Development Program Unit Activities

Pada tahun 2020, kegiatan unit PKBL PT Jamkrindo meliputi pengelolaan program kemitraan dan bina lingkungan. Program bina lingkungan dilaksanakan oleh 56 (lima puluh enam) cabang dan 9 (sembilan) kantor wilayah. Sedangkan, penyaluran pinjaman pada program kemitraan dilaksanakan di 31 (tiga puluh satu) cabang.

In 2020, PT Jamkrindo's PKBL unit activities include managing partnership programs and community development. The community development program is implemented by 56 (fifty-six) branches and 9 (nine) regional offices. Meanwhile, the distribution of loans in the partnership program is carried out in 31 (thirty-one) branches.

RENCANA KERJA PKBL

Partnership and Community Development Program Work Plan

Jamkrindo telah membuat rencana kerja untuk memastikan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan dapat dijalankan dengan baik. Rencana kerja tersebut memuat sasaran, strategi dan anggaran dari kegiatan program yang dicanangkan. Pada tahun 2020 berdasarkan perencanaan yang telah disusun oleh Perusahaan, anggaran untuk kegiatan kemitraan adalah sebesar Rp4,2 miliar. Sedangkan anggaran untuk kegiatan bina lingkungan dianggarkan sebesar Rp11,76 miliar.

Jamkrindo has made a work plan to ensure that the partnership and community development program can be run well. The work plan contains the objectives, strategies and budgets of the program activities launched. In 2020, based on the plans compiled by the Company, the budget for partnership activities is IDR4.2 billion. Meanwhile, the budget for community development activities is budgeted at IDR11.76 billion.

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN

Target, Policy, and Distribution Strategy of the Partnership Program

1. Sasaran

- Penyaluran dana program kemitraan di seluruh unit kerja PT Jamkrindo sesuai dengan Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp4.208.000.000
- Distribusi penyaluran ke seluruh kanca PT Jamkrindo

2. Strategi

- Intensifikasi Program Kemitraan dengan mengoptimalkan pelaksanaan Program Kemitraan agar mitra binaan menjadi lebih tangguh dan mandiri, antara lain:
 - Meningkatkan kemampuan manajemen dan produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam pelatihan manajemen dan keuangan serta memberikan bantuan konsultasi manajemen sesuai dengan kemampuan SDM perusahaan.

1. Goals

- Distribution of partnership program funds to all PT Jamkrindo work units in accordance with the 2020 work plan and budget of IDR4,208,000,000
- Distribution of distribution to all regions of PT Jamkrindo

2. Strategy

- Intensification of the Partnership Program by optimizing the implementation of the Partnership Program so that the fostered partners become more resilient and independent, including:
 - Improve the management and production capabilities of fostered partners by participating in management and financial training as well as providing management consulting assistance in accordance with the capabilities of the company's human resources.

- ii. Meningkatkan akses pemasaran hasil produksi mitra binaan dengan mengikutsertakan dalam kegiatan promosi/pameran serta melakukan upaya pemasaran hasil produksi mitra binaan melalui peran perusahaan berskala nasional.
- iii. Meningkatkan pembinaan yang berkesinambungan dengan melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra binaan secara kontinu untuk melakukan evaluasi dan melihat perkembangan usaha dan permasalahan yang dihadapi serta membantu memberikan saran/solusi perbaikan, dan mengintensifkan penagihan kepada mitra binaan dengan tetap memperhatikan kondisi mitra binaan.
- b. Ekstensifikasi Program Kemitraan dengan mencari calon mitra binaan yang potensial, berkualitas dan mempunyai prospek usaha yang menguntungkan melalui organisasi perdagangan dan industri milik pemerintah/swasta atau secara langsung oleh PT Jamkrindo.
- c. Melakukan sinergi dengan BUMN Pembina lain atau pihak lain dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan antara lain dengan PT Permodalan Nasional Madani.

- ii. Increase access to marketing of the products of fostered partners by participating in promotional/exhibition activities as well as making efforts to market the products of fostered partners through the role of national scale companies.
- iii. Increasing continuous coaching by making visits to the business locations of the fostered partners continuously to evaluate and see business developments and problems faced and to help provide suggestions/solutions for improvements, and intensify billing for the fostered partners while still paying attention to the conditions of the fostered partners
- b. Extensification of the Partnership Program by looking for potential, qualified and profitable business prospects through trade and industry organizations owned by the government/ private sector or directly by PT Jamkrindo.
- c. To synergize with other SOE Trustee or other parties in the distribution of Partnership Program funds, including with PT. Permodalan Nasional Madani.

KERJA SAMA PENYALURAN PROGRAM KEMITRAAN DENGAN SESAMA BUMN

1. Kerja sama dalam penyaluran Program Kemitraan dengan PT Permodalan Nasional Madani tertuang dalam Perjanjian Kerja sama No.37/Jamkrindo/Non-OP/XII/2017/348/PKS/PNM/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017 Perihal Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Mitra Binaan Kluster Kelompok Usaha Petani Kopi Sri Rejeki Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia di Desa Sabang, Kabupaten Bangli, Bali.
2. Kerja sama dalam penyaluran Program Kemitraan dengan PT. Permodalan Nasional Madani tertuang dalam Perjanjian Kerja sama No.24/PKS/Non-OP/XII/2018 dan 055/PKS/PNM/XII/2018 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Bagi Mitra Binaan Jamkrindo di 5 (Lima) Klaster Usaha Pada Sejumlah Daerah Di Indonesia.
3. Kerja sama dalam penyaluran Program Kemitraan dengan PT. Permodalan Nasional Madani tertuang dalam Perjanjian Kerja sama No.66/PKS/Non-OP/XII/2019 dan 156/PKS/PNM/XII/2019 tanggal 27 Desember 2018 Perihal Pengembangan Kapasitas Usaha Program Kemitraan Bagi Mitra Binaan Jamkrindo di 6 (enam) Kelompok Usaha Pada Sejumlah Daerah di Indonesia.

COOPERATION IN DISTRIBUTION OF PARTNERSHIP PROGRAMS WITH FELLOW SOEs

1. Cooperation in the distribution of the Partnership Program with PT Permodalan Nasional Madani is stated in the Cooperation Agreement No.37/Jamkrindo/NonOP/XII/2017/348/PKS/PNM/XII/2017 dated December 22, 2017 Regarding Business Capacity Development of Partnership Program Partnership Program Cluster Partners for Sri Rejeki Coffee Farmers Business Group Public Company Jaminan Kredit Indonesia in Villages Sabang, Bangli Regency, Bali.
2. Cooperation in the distribution of the Partnership Program with PT Permodalan Nasional Madani is stated in the Cooperation Agreement No.24/PKS/Non-OP/XII/2018 and 055/PKS/PNM/XII/2018 dated December 27, 2018 Regarding Business Capacity Development for Partnership Programs for Jamkrindo's Assisted Partners in 5 (Five) Business Clusters in a Number of Regions in Indonesia.
3. Cooperation in the distribution of the Partnership Program with PT Permodalan Nasional Madani is stated in the Cooperation Agreement No.66/PKS/Non-OP/XII/2019 and 156/PKS/PNM/XII/2019 dated December 27, 2018 Regarding Business Capacity Development for Partnership Programs for Jamkrindo's Assisted Partners in 6 (six) Business Groups in a Number of Regions in Indonesia.

SASARAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENYALURAN PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Targets, Policies, And Distribution Strategies of Community Development Programs

1. Sasaran

Penyaluran dana program bina lingkungan di seluruh unit kerja PT Jamkrindo sesuai dengan Rencana kerja dan Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp11.760.500.000 di sekitar wilayah PT Jamkrindo.

2. Strategi

Penyaluran dana BL dilaksanakan melalui kerja sama dengan sinergi BUMN, pemerintah setempat, yayasan, LSM, atau masyarakat.

1. Goals

Distribution of environmental development program funds to all PT Jamkrindo work units in accordance with the 2020 work plan and budget of IDR11,760,500,000 around the PT Jamkrindo area.

2. Strategy

The distribution of BL funds is carried out in collaboration with the synergy of SOE, local government, foundations, NGOs, or the community.

SUMBER DANA PKBL

Source of Funds of Partnership and Community Development Program

Dana PKBL tersebut di atas bersumber dari bagian laba PT Jamkrindo yang setiap tahun dialokasikan untuk dana PKBL. Penyaluran pinjaman dan Dana Pembinaan (hibah) dari dana Program Kemitraan ditargetkan pada mitra binaan yang memiliki prospek yang baik untuk berkembang. Dengan demikian, melalui penyaluran pinjaman dana Program Kemitraan tersebut diharapkan dapat membantu terciptanya usaha kecil dan koperasi yang pada akhirnya mampu bermitra dengan lembaga keuangan formal (bank atau lembaga keuangan bukan bank).

Secara lebih rinci, sumber dana di unit PKBL berasal dari:

1. Dana program kemitraan bersumber dari dana *revolving* tahun berjalan sehingga tidak diambil dari penyisihan laba bersih
2. Dana program bina lingkungan bersumber dari penyisihan sebagian laba bersih BUMN dengan persentase sebesar 1,75%

Pada tahun 2020, Jamkrindo menganggarkan penyaluran dana Program Kemitraan tahun 2020 adalah sebesar Rp4.208.000.000,-. Pelaksanaan Program Kemitraan tahun 2020 menggunakan dana *revolving*. Realisasi penyaluran dana di tahun 2020 adalah sebesar Rp4.372.000.000,- dari dana yang tersedia Rp4.208.000.000,-. Sedangkan alokasi Laba Perusahaan untuk Program Bina Lingkungan sebesar Rp11.760.500.000,-. Total jumlah dana yang disalurkan adalah sebesar Rp11.889.627.391,-

PKBL funds mentioned above come from the profit share of PT Jamkrindo which is allocated annually for PKBL funds. The distribution of loans and coaching funds (grants) from the Partnership Program funds is targeted at fostered partners who have good prospects for development. Thus, through the distribution of the Partnership Program loan funds, it is hoped that it can help the creation of small businesses and cooperatives that will eventually be able to partner with formal financial institutions (banks or non-bank financial institutions).

In more detail, the sources of funds in the PKBL unit come from:

1. *Funds for the partnership program come from revolving funds for the current year, so they are not taken from the net profit allowance*
2. *Funds for the community development program are sourced from a portion of the BUMN net profit with a percentage of 1.75%*

In 2020, Jamkrindo allocates IDR4,208,000,000,-. The implementation of the Partnership Program in 2020 uses revolving funds. Realization of disbursement of funds in 2020 is IDR4,372,000,000,- of the available funds IDR4,208,000,000,-. Meanwhile, the Company's profit allocation for the Community Development Program is IDR11,760,500,000,-. The amount of funds distributed was IDR11,760,500,000,-

Tabel Sumber Dana PKBL
Table of Sources of PKBL Funds

No.	Program Program	Sumber Dana Source of Funds	Jumlah Dana (Rp) Amount of Funds (IDR)
1	Kemitraan Partnership	Saldo Awal/Beginning balance	1.466.549.328
		Pengembalian Pinjaman/Loan Repayment	3.337.819.882
		Pendapatan Jasa Administrasi/Administration Service Revenue	207.596.019
2	Bina Lingkungan Community Development	Alokasi Penyisihan Laba yang Diterima/Allocation of profit provision	11.889.627.391

PENGUNAAN DANA PKBL

Use of Partnership and Community Development Program Fund

Penggunaan dana PKBL dibedakan atas:

- Dana Program Kemitraan, yang diberikan dalam bentuk pinjaman, yaitu:
 - Pinjaman: diberikan untuk membiayai modal kerja dan (atau) pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
 - Pinjaman Tambahan: diberikan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
 - Beban Pembinaan:
 - Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan
 - Beban Pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan;
 - Beban Pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.
- Jumlah pinjaman untuk setiap Mitra Binaan dari Program Kemitraan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Dana Program Bina Lingkungan, digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat kepada masyarakat di wilayah usaha BUMN dalam bentuk sebagai berikut:
 - Bantuan korban bencana alam
 - Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan
 - Bantuan peningkatan kesehatan
 - Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
 - Bantuan sarana ibadah
 - Bantuan pelestarian alam

The use of PKBL funds is divided into:

- Partnership Program Fund, which is provided in the form of loans, namely:
 - Loans: granted to finance working capital and (or) purchase of fixed assets in order to increase production and sales.
 - Additional Loans: given to finance short-term needs in order to fulfill orders from the Foster Partners' business partners.
 - Load Load:
 - To finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increasing the productivity of the Foster Partners as well as for studies/research related to the Partnership Program
 - Coaching Burden is a grant and the maximum amount is 20% (twenty percent) of the Partnership Program funds distributed in the current year
 - The Development Burden can only be given to or for the benefit of the Foster Partners.
- The amount of the loan for each Foster Partner from the Partnership Program is a maximum of IDR200,000,000.00 (two hundred million rupiah)
- The Community Development Program Fund, is used for the purpose of providing benefits to the community in the BUMN business area in the following forms:
 - Aid to Natural Disaster Victims
 - Educational assistance, can be in the form of training, educational infrastructure and facilities
 - Health improvement assistance
 - Development assistance for public infrastructure and/or facilities
 - Religious facilities assistance
 - Nature conservation assistance

- g. Bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - i. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik
 - ii. Penyediaan sarana air bersih
 - iii. Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK)
 - iv. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan
 - v. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - vi. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan atau
 - vii. Bantuan peralatan usaha.

- g. Community social assistance in the context of poverty alleviation, including for:
 - i. Electrification in areas that are not yet electrified
 - ii. Provision of clean water facilities
 - iii. Provision of bathing and washing toilet facilities (MCK)
 - iv. Education assistance, training, apprenticeship, promotion, and other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses other than Partnership Program Foster Partners
 - v. Home improvements for the poor
 - vi. Assistance for nurseries for agriculture, livestock and fisheries or
 - vii. Business equipment assistance

MEKANISME PENYALURAN DANA PKBL

Distribution Mechanism of Partnership and Community Development Program Fund

Secara umum dalam penyaluran dana PKBL menggunakan metode penyaluran sebagai berikut:

Metode Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan

- a. Pengajuan proposal/permohonan dari calon mitra binaan
- b. Verifikasi kelengkapan dokumen.
- c. Survei lapangan.
- d. Melakukan Analisa terhadap pengajuan pinjaman
- e. Persetujuan Pemberian Pinjaman.
- f. Penandatanganan Perjanjian.
- g. Pencairan Pinjaman.

In general, the distribution of PKBL funds uses the following distribution methods:

Partnership Program Lending Methods

- a. Submission of proposals/applications from prospective fostered partners
- b. Verify document completeness.
- c. Field survey.
- d. Analyze loan applications
- e. Loan Approval.
- f. Signing of the Agreement.
- g. Loan Disbursement.

Metode Penyaluran Bantuan Program Bina Lingkungan

- a. Atas dasar proposal yang masuk dilakukan peninjauan ke lapangan untuk melihat kondisi objek serta sekaligus melakukan wawancara dengan calon penerima bantuan agar pemberian bantuan tepat sasaran.
- b. Mengambil foto obyek berdasarkan proposal yang diajukan.
- c. Melakukan pengecekan atas kewajaran harga-harga material/ barang-barang dalam anggaran yang tertulis dalam proposal yang diajukan.
- d. Menentukan besaran bantuan dengan cara memilih item-item material/barang yang dibutuhkan sesuai pengajuan proposal.
- e. Pencairan/Penyerahan bantuan.

Method of Distribution of Community Development Program Assistance

- a. On the basis of the submitted proposals, field visits were carried out to see the condition of the object and at the same time conducting interviews with prospective beneficiaries so that the assistance was right on target.
- b. Take a photo of the object based on the proposal submitted.
- c. Check the reasonableness of the prices of materials/goods in the budget written in the proposal submitted.
- d. Determine the amount of assistance by selecting the items of material/goods needed according to the submission of the proposal.
- e. Disbursement/Delivery of assistance.

Mekanisme penyaluran dana PKBL menurut PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017 adalah sebagai berikut:

1. Tata cara pemberian pinjaman dana Program Kemitraan:
 - a. Calon Mitra Binaan menyampaikan rencana penggunaan dana pinjaman dalam rangka pengembangan usahanya untuk diajukan kepada BUMN Pembina atau penyalur, dengan memuat paling sedikit data sebagai berikut:
 - i. Nama dan alamat unit usaha
 - ii. Nama dan alamat pemilik/pengurus unit usaha
 - iii. Bukti identitas diri pemilik/pengurus
 - iv. Bidang usaha
 - v. Izin usaha atau surat keterangan usaha dari pihak yang berwenang
 - vi. Perkembangan kinerja usaha (arus kas, perhitungan pendapatan dan beban, neraca atau data yang menunjukkan keadaan keuangan serta hasil usaha)
 - vii. Rencana usaha dan kebutuhan dana
 - viii. Surat Pernyataan tidak sedang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
 - b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka (6), tidak diwajibkan bagi calon Mitra Binaan yang dibentuk atau berdiri sebagai pelaksanaan program BUMN Pembina, khusus untuk pengajuan pertama kali
 - c. BUMN Pembina atau penyalur melaksanakan evaluasi dan seleksi atas permohonan yang diajukan oleh calon Mitra Binaan.
 - d. Dalam hal BUMN Pembina atau penyalur memperoleh calon Mitra Binaan yang potensial, sebelum dilakukan perjanjian pinjaman, calon Mitra Binaan tersebut harus terlebih dahulu menyelesaikan proses administrasi terkait dengan rencana pemberian pinjaman oleh BUMN Pembina atau penyalur bersangkutan;
 - e. Pemberian pinjaman kepada calon Mitra Binaan dituangkan dalam surat perjanjian/kontrak yang paling sedikit memuat:
 - i. Nama dan alamat BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan
 - ii. Hak dan kewajiban BUMN Pembina atau penyalur dan Mitra Binaan
 - iii. Jumlah pinjaman dan peruntukannya

The mechanism for distributing PKBL funds according to PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises dated July 20, 2017 are as follows:

1. *Procedures for lending Partnership Program funds:*
 - a. *Prospective Foster Partners submit a plan to use loan funds in the context of developing their business to be submitted to the SOE Trustee or distributor, containing at least the following data:*
 - i. *Name and address of the business unit*
 - ii. *Name and address of the owner/manager of the business unit*
 - iii. *Proof of identity of the owner/manager*
 - iv. *Business fields*
 - v. *Business license or business certificate from the competent authority*
 - vi. *Business performance development (cash flow, calculation of income and expenses, balance sheet or data showing financial condition and results of operations)*
 - vii. *Business plan and funding requirements*
 - viii. *A statement letter that he is not currently being a partner of another SOE Trustee.*
 - b. *The provisions as referred to in letter a number (6), are not obligatory for Foster Partner candidates who are formed or established as the implementation of the SOE Trustee program, especially for first-time submissions*
 - c. *The SOE Trustee or distributor conducts an evaluation and selection of the applications submitted by the Foster Partner candidates.*
 - d. *In the event that the Trustee or channeling SOE obtains a potential Foster Partner, before the loan agreement is made, the Foster Partner candidate must first complete the administrative process related to the loan plan by the Trusting BUMN or the distributor concerned.*
 - e. *The provision of loans to prospective Foster Partners is stated in a letter of agreement / contract which at least contains:*
 - i. *Name and address of the trustee or channeling SOE and the fostered partners*
 - ii. *Rights and obligations of trustee or channeling SOEs and fostered partners*
 - iii. *Loan amount and allotment*

- iv. Syarat pinjaman (paling sedikit jangka waktu pinjaman, jadwal angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman)
 - f. BUMN Pembina atau Penyalur dilarang memberikan pinjaman kepada calon Mitra Binaan yang menjadi Mitra Binaan BUMN Pembina lain.
2. Besarnya jasa administrasi pinjaman dana Program Kemitraan sebesar 3% (tiga persen) per tahun dari saldo pinjaman awal tahun atau ditetapkan lain oleh Menteri.
 3. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip jual beli maka proyeksi margin yang dihasilkan disetarakan dengan margin sebesar jasa administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 4. Apabila pinjaman/pembiayaan diberikan berdasarkan prinsip bagi hasil maka rasio bagi hasilnya untuk BUMN Pembina adalah mulai dari 10% (sepuluh persen) (10:90) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen) (50 : 50) berdasarkan perjanjian. Adapun tata cara pemberian dana Program Bina Lingkungan di PT Jamkrindo sesuai Peraturan Direksi PT Jamkrindo Nomor 29/Per-Dir/VIII/2017 tanggal 25 Agustus 2017 tentang Pedoman Akuntansi dan *Standard Operating Procedure* (SOP). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jamkrindo adalah sebagai berikut:
 1. Setiap calon penerima Bantuan Program Bina Lingkungan harus mengajukan permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Direksi yang membawahi unit PKBL bagi calon penerima bantuan Program BL yang berdomisili di wilayah usaha Kantor Pusat atau Kantor Cabang. Untuk bantuan bencana alam dimungkinkan tidak menggunakan proposal tetapi didasarkan atas memorandum pengajuan Unit PKBL Kantor Pusat.
 2. Permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tujuan dan manfaat bantuan Program Bina Lingkungan bagi masyarakat, lingkungan dan/atau Perusahaan serta jumlah kebutuhan dana.
 3. Kantor Pusat atau kantor Cabang melakukan pengadministrasian permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan.

- iv. *Loan terms (at least the loan term, principal installment schedule and loan administration services)*
 - f. *Trustee or channelling SOEs are prohibited from providing loans to prospective foster partners who are fostered partners of other SOE Trustee*
2. *The amount of loan administration services for the Partnership Program funds is 3% (three percent) per year of the loan balance at the beginning of the year or otherwise determined by the Minister.*
 3. *If the loan/financing is given based on the principle of sale and purchase, the projection of the resulting margin is equivalent to a margin equal to that of administrative services as referred to in paragraph (2).*
 4. *If the loan/financing is provided based on the profit sharing principle, the profit sharing ratio for the Trustees SOE is starting from 10% (ten percent) (10:90) up to a maximum of 50% (fifty percent) (50: 50) based on the agreement. . The procedures for providing funds for the Community Development Program at PT Jamkrindo are in accordance with the Regulation of the Directors of PT Jamkrindo Number 29/Per-Dir/VIII/2017 dated August 25, 2017 concerning Accounting Guidelines and Standard Operating Procedures (SOP). PT Jamkrindo's Partnership and Community Development Program is as follows:*
 1. *Each prospective recipient of Community Development Program Assistance must submit an application for Community Development Program Assistance in the form of a proposal addressed to the Board of Directors in charge of the PKBL unit for BL Program beneficiary candidates who are domiciled in the business area of the Head Office or Branch Offices. For natural disaster relief it is possible not to use a proposal but based on the memorandum of submission of the PKBL Head Office Unit.*
 2. *Application for Community Development Program Assistance as referred to in point 1 shall at least contain information regarding the objectives and benefits of Community Development Program assistance for the community, the environment and/or the Company as well as the amount of funding required.*
 3. *The Head Office or Branch Office administers the application for Community Development Program Assistance.*

4. Kantor Pusat atau Kantor Cabang meneliti kelengkapan persyaratan permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dan memberitahukan kepada calon penerima Bantuan Program Bina Lingkungan apabila belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
5. Apabila permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan telah memenuhi persyaratan maka diproses lebih lanjut oleh Kantor Pusat atau Kantor Cabang dengan melakukan survei atas permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan dalam rangka menganalisa kelayakan kegiatan yang akan dilaksanakan calon penerima bantuan Program Bina Lingkungan dan menyampaikan laporan hasil analisa kelayakan kegiatan tersebut kepada Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang untuk mendapat rekomendasi.
6. Apabila Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang tidak menyetujui permohonan bantuan Program Bina Lingkungan, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat penolakan yang ditandatangani oleh Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang.
7. Apabila Direksi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang menyetujui permohonan Bantuan Program Bina Lingkungan, maka Kantor Pusat atau Kantor Cabang menerbitkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh Kepala Divisi yang membawahi Unit PKBL atau Kepala Cabang.

4. The Head Office or Branch Offices examine the completeness of the requirements for the application for Community Development Program Assistance and notify prospective recipients of Community Development Program Assistance if they do not meet the stipulated requirements.
5. If the application for Community Development Program Assistance meets the requirements, it is further processed by the Head Office or Branch Office by conducting a survey of the application for Community Development Program Assistance in order to analyze the feasibility of the activities to be carried out by prospective Community Development Program assistance recipients and submit a report on the results of the feasibility analysis for these activities to the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or the Branch Head for recommendations.
6. If the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or the Branch Head does not approve the application for Community Development Program assistance, the Head Office or Branch Office issues a rejection letter signed by the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or Branch Head.
7. If the Board of Directors in charge of the PKBL Unit or the Head of the Branch approves the application for Community Development Program Assistance, the Head Office or Branch Office issues an approval letter signed by the Head of the Division in charge of the PKBL Unit or the Branch Head.

Pembentukan Cluster Yang Dilaksanakan

Jamkrindo dalam penyaluran pinjaman Program Kemitraan dengan pola *Cluster* telah melaksanakan yaitu:

- a. *Cluster* di Semarang yaitu pinjaman untuk pengrajin Batik Tulis Bayat dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) pengrajin Batik.
- b. *Cluster* di Denpasar yaitu pinjaman untuk kelompok petani kopi di Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli kepada 2 (dua) Cluster sebanyak 20 (dua puluh) petani.
- c. *Cluster* di Padang yaitu pinjaman untuk pengrajin Songket dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) pengrajin.
- d. *Cluster* di Magelang yaitu pinjaman untuk peternak lebah madu dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) peternak lebah madu.
- e. *Cluster* di Garut yaitu pinjaman untuk petani kopi dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) petani kopi.

Formation of Clusters That Are Implemented

Jamkrindo in the distribution of Partnership Program loans with a cluster pattern has implemented, namely:

- a. The cluster in Semarang is a loan for Batik Tulis Bayat craftsmen by providing loans to 10 (ten) Batik craftsmen.
- b. The cluster in Denpasar is a loan for a group of coffee farmers in Kintamani District, Bangli Regency to 2 (two) clusters of 20 (twenty) farmers.
- c. The cluster in Padang is a loan for Songket craftsmen by providing loans to 10 (ten) craftsmen.
- d. The cluster in Magelang is a loan for honey bee breeders by providing loans to 10 (ten) honey bee breeders.
- e. The cluster in Garut is a loan for coffee farmers by providing loans to 10 (ten) coffee farmers.

- | | |
|---|--|
| <p>f. <i>Cluster</i> di Garut yaitu pinjaman untuk pengrajin kulit dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) pengrajin kulit.</p> <p>g. <i>Cluster</i> di Garut yaitu pinjaman untuk konveksi jaket dengan memberikan pinjaman kepada 9 (sembilan) pengrajin.</p> <p>h. <i>Cluster</i> di Yogyakarta yaitu pinjaman untuk pengrajin blangkon dengan memberikan pinjaman kepada 12 (dua belas) pengrajin.</p> <p>i. <i>Cluster</i> di Magelang yaitu pinjaman untuk petani lebah madu dengan memberikan pinjaman kepada 10 (sepuluh) peternak lebah madu.</p> <p>j. <i>Cluster</i> di Mojokerto yaitu pinjaman untuk pengrajin sepatu dengan memberikan pinjaman kepada 20 (dua puluh) pengrajin.</p> | <p>f. <i>The cluster in Garut is a loan for leather craftsmen by providing loans to 10 (ten) leather craftsmen.</i></p> <p>g. <i>The cluster in Garut is a loan for jacket convection by providing loans to 9 (nine) craftsmen.</i></p> <p>h. <i>The cluster in Yogyakarta is a loan for blangkon craftsmen by providing loans to 12 (twelve) craftsmen.</i></p> <p>i. <i>The cluster in Magelang is a loan for honey bee farmers by providing loans to 10 (ten) honey bee breeders.</i></p> <p>j. <i>The cluster in Mojokerto is a loan for shoe craftsmen by providing loans to 20 (twenty) craftsmen.</i></p> |
|---|--|



REALISASI PROGRAM PKBL

Realization of PKBL Program



GAMBARAN UMUM

General description

Implementasi PKBL dipahami secara luas oleh perusahaan, artinya pelaksanaan PKBL tidak hanya dalam ruang lingkup *corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relation* yang menekankan pada kegiatan amal dan pembangunan citra perusahaan di mata masyarakat atau bahkan *community development* yang sifatnya pemberdayaan. Jamkrindo berupaya secara maksimal memadukan keseluruhan dimensi melalui program-program yang dirancang secara komprehensif dengan target sasaran program yang tepat.

PKBL bukan hanya kegiatan yang dilakukan demi mematuhi peraturan semata, namun juga merupakan bentuk dari kegiatan CSR yang lebih mengarah kepada peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dengan pembinaan usaha kecil yang dibentuk bersama masyarakat.

Kegiatan PKBL terbagi menjadi dua program utama yakni Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. Program Kemitraan bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha kecil dengan skema dana bergulir sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha masing-masing mitra binaan.

Sementara itu Program Bina Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan dalam bentuk bantuan bagi penanggulangan bencana alam dan non alam termasuk wabah, bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, peningkatan kesehatan masyarakat sekitar, sarana parasarana umum dan kegiatan ibadah, pelestarian alam, dan bantuan sosial kemasyarakatan. Kegiatan PKBL diharapkan dapat mendorong terciptanya sinergi antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya serta dukungan positif dari masyarakat terhadap proses bisnis Perusahaan.

PKBL implementation is widely understood by companies, meaning that PKBL implementation is not only in the scope of corporate giving, corporate philanthropy, corporate community relations which emphasizes charity activities and building corporate image in the eyes of the community or even community development which is empowerment in nature. Jamkrindo strives to maximize all dimensions through programs that are designed comprehensively with the right target program targets.

PKBL is not only an activity carried out for the sake of complying with regulations, but is also a form of CSR activities that are more directed at improving the quality of life of the surrounding community by fostering small businesses that are formed together with the community.

PKBL activities are divided into two main programs, namely the Partnership Program and the Community Development Program. The Partnership Program aims to provide easy access to capital for small businesses with a revolving fund scheme while at the same time providing guidance in order to increase business growth and development of each fostered partner.

Meanwhile the Community Development Program aims to improve the quality of community life and the environment in the form of assistance for natural and non-natural disasters including epidemics, assistance in the field of education and training for the community, improving the health of the surrounding community, public infrastructure and worship activities, nature conservation, and social assistance. PKBL activities are expected to encourage synergy between the Company and the surrounding community so that it will indirectly foster a sense of trust and positive support from the community for the Company's business processes.

Penyaluran Program Kemitraan

Partnership Program Distribution

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara yang tertuang dalam PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 yang mengubah peraturan terkait PKBL sebelumnya dan merupakan peraturan yang berlaku untuk kegiatan PKBL tahun 2020, maka dibuatlah rencana program kemitraan PT Jamkrindo yang sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut. Rencana penyaluran pinjaman program kemitraan sebesar Rp4.208.000.000 dari dana tersedia didistribusikan kepada 152 mitra binaan baru yang bergerak di bidang industri, perdagangan, dan perkebunan.

Program kemitraan ini bertujuan guna meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi entitas yang tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Berdasarkan Permen No.PER-02/MBU/7/2017, usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sesuai dengan aturan dalam Permen No.PER-02/MBU/7/2017. Adapun usaha kecil tersebut dinamakan sebagai mitra binaan. Sumber dana untuk pembinaan mitra binaan adalah Dana Pembinaan Program Kemitraan, yaitu maksimal sebesar 20% dari dana Program Kemitraan yang disalurkan dalam tahun berjalan. PT Jamkrindo merencanakan program kemitraan antara lain meliputi pemberian pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan, pemberian bantuan dalam bentuk hibah untuk pembiayaan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan.

Bagi calon Mitra Binaan yang hendak mengajukan permohonan dana kemitraan, kriteria yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah)
2. Milik Warga Negara Indonesia
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises concerning the Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises as stated in PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020 which amends the previous regulations related to PKBL and is the applicable regulation for PKBL activities in 2020. , then a partnership program plan for PT Jamkrindo was made which is in line with these regulations. The partnership program loan distribution plan amounting to IDR4,208,000,000 of the available funds is distributed to 152 new fostered partners engaged in industry, trade, and plantations.

This partnership program aims to improve the ability of small businesses to become strong and independent entities by utilizing funds from the SOE profit share. Based on Permen No.PER-02/MBU/7/2017, small businesses are defined as small scale economic activities of the people and meet the criteria for net assets or annual sales proceeds and ownership in accordance with the regulations in Permen No.PER-02/MBU/7/2017. The small business is known as a foster partner. The source of funds for fostering partners is the Partnership Program Development Fund, which is a maximum of 20% of the Partnership Program funds disbursed in the current year. PT Jamkrindo plans a partnership program including providing loans to finance working capital and/or purchasing fixed assets in order to increase production and sales, providing assistance in the form of grants to finance education, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other matters relating to increasing the productivity of the Foster Partners.

For prospective Foster Partners who wish to apply for partnership funds, the criteria that must be met are as follows:

1. *Have a net worth of not more than IDR500,000,000 (five hundred million rupiah), excluding land and buildings for business premises or have annual sales proceeds of not more than IDR2,500,000,000 (two billion and five hundred million rupiah)*
2. *Belonging to Indonesian citizens*
3. *Stand alone, not a subsidiary or branch of a company that is owned, controlled, or affiliated directly or indirectly with a Medium or Large Business*

4. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk usaha mikro dan koperasi
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 6 (enam) bulan
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan atau Lembaga Keuangan Non-Bank.

Realisasi Program

PT Jamkrindo telah menyalurkan dana program kemitraan sebesar Rp4.372.000.000 di seluruh Kantor Cabang Perusahaan di Indonesia. Hal ini berarti penyaluran dana mengalami penurunan senilai 14.80% dibanding tahun 2019, yaitu sebesar Rp5.131.500.000. Dibandingkan dengan RKA Tahun 2020 sebesar Rp4.208.000.000 maka realisasi Program Kemitraan tahun 2020 tercatat sebesar 104%. Dana disalurkan kepada Mitra Binaan untuk berbagai sektor usaha. Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan. Dana Program Kemitraan disalurkan ke tujuh sektor usaha mitra binaan sebagai berikut:

1. Sektor Industri
2. Sektor Perdagangan
3. Sektor Pertanian
4. Sektor Peternakan
5. Sektor Perikanan
6. Sektor Jasa

4. *In the form of individual businesses, business entities that are not legal entities, or business entities with legal status, including micro-enterprises and cooperatives*
5. *Has the potential and business prospects to be developed*
6. *Has been conducting business activities for at least 6 (six) months*
7. *Has not met the requirements of banking or Non-Bank Financial Institutions.*

Program Realization

PT Jamkrindo has distributed partnership program funds amounting to IDR4,372,000,000 in all the Company's Branch Offices in Indonesia. This means that the distribution of funds decreased by 14.80% compared to 2019, which was IDR5,131,500,000. Compared to the 2020 RKA of IDR4,208,000,000, the realization of the 2020 Partnership Program was recorded at 104%. Funds are channeled to Foster Partners for various business sectors. In the implementation of the distribution of Partnership Program funds. Partnership Program funds are distributed to the seven business sectors of the fostered partners as follows:

1. *Industrial Sector*
2. *Trade Sector*
3. *Agricultural Sector*
4. *Animal Husbandry Sector*
5. *Fishery Sector*
6. *Service Sector*

Tabel Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan Tahun 2020

Table of Realization of Disbursement of Partnership Program Funds in 2020

Uraian Description	2020		2019	
	Mitra Binaan (MB) Foster Partner (FP)	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Mitra Binaan (MB) Foster Partner (FP)	Jumlah (Rp) Total (IDR)
Sektor Perdagangan Trade Sector	76	2.452.000.000	29	1.059.000.000
Sektor Jasa Service Sector	27	715.000.000	7	275.000.000
Sektor Peternakan Livestock Sector	14	420.000.000	15	750.000.000
Sektor Pertanian Agricultural Sector	21	395.000.000	23	1.115.000.000
Sektor Perikanan Fisheries Sector	11	330.000.000	-	-
Sektor Industri Industrial Sector	3	60.000.000	47	1.932.500.000
Jumlah Total	152	4.372.000.000	121	5.131.500.000

Program kemitraan pada tahun 2020 disalurkan oleh 23 (dua puluh tiga) kantor cabang. Berikut adalah realisasi penyaluran dana program kemitraan berdasarkan kantor cabang Jamkrindo:

The partnership program in 2020 is distributed by 23 (Twenty-three) branch offices. The following is the realization of the distribution of partnership program funds based on Jamkrindo branch offices:

No.	Kantor Cabang Branch Office	Realisasi Penyaluran/Realization of Distribution	
		Jumlah Unit Mitra Binaan Number of Foster Partner Units	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) Total (in millions rupiah)
1	DKI Jakarta/DKI Jakarta	8	375
2	Jawa Barat/West Java	21	630
3	Jawa Tengah/Central Java	7	240
4	Jawa Timur/East Java	2	100
5	Sulawesi Selatan/South Sulawesi	8	210
6	Riau/Riau	11	275
7	Sumatera Selatan/South Sulawesi	5	130
8	Kalimantan Barat/West Kalimantan	1	40
9	Kalimantan Timur/East Kalimantan	7	240
10	Bali/Bali	2	100
11	Sumatera Utara/North Sumatera	6	235
12	Nusa Tenggara Timur/East Nusa Tenggara	34	850
13	Sulawesi Utara/North Sulawesi	3	95
14	Kalimantan Selatan/South Borneo	5	140
15	Irian Jaya/Irian Jaya	2	60
16	Jambi/Jambi	1	25
17	Bandar Lampung/Bandar Lampung	1	38
18	Bengkulu/Bengkulu	1	30
19	Sulawesi Tengah/Central Sulawesi	1	40
20	Sulawesi Tenggara/South East Sulawesi	1	29

No.	Kantor Cabang Branch Office	Realisasi Penyaluran/Realization of Distribution	
		Jumlah Unit Mitra Binaan Number of Foster Partner Units	Jumlah (dalam jutaan Rupiah) Total (in millions rupiah)
21	Banten/Banten	2	50
22	Sukabumi/Sukabumi	8	150
23	Tangerang/Tangerang	15	290
	Sub jumlah/Sub Amount	152	4.372
	Dana Pembinaan Kemitraan/Partnership Coaching Fund	-	-
	Jumlah/Total	152	4.372

Jumlah Dana yang Disalurkan dan Penggunaan Dana (dalam Rp)

Amount of Funds Disbursed and Use of Funds (in IDR)

No	Uraian Description	Anggaran Tahun 2020 2020 Budget	Realisasi s.d 31 Des 2020 Realization until 31 Dec 2020	%
1	2	3	4	5 = 4/3 X 100
1	Saldo Awal Dana/Fund Beginning Balance			
a.	Kas/Cash	-	2.571.215	-
b.	Bank/Bank	0	1,463.978.113	-
	Jumlah Kas dan Bank/Total Cash and Bank	0	1,466,549,328	-
2	Penerimaan/Receipt			
a.	Alokasi Beban Perum Sarana/Cost Allocation of Perum Sarana	-	-	-
b.	Pengembalian Pinjaman/Loan Repayment	4,520,000,000	3.337.819.882	77.67
c.	Pendapatan Jasa Administrasi/Administration Service Revenue	248,000,000	207.596.019	81.53
	Jumlah sumber Dana (Penilaian)/Jumlah sumber Dana (Penilaian)	4,768,000,000	5.011.965.229	108.63
d.	Pendapatan Jasa Giro/Current Account Service Income		27.185.034	
e.	Transfer D. Pemb/Cluster Ke Kanca/Transfer of Development/Cluster Funds To Kanca	-	-	-
f.	Hutang Jangka Pendek PK/PK Short Term Debt	-	-	-
g.	Pendapatan Lain-lain/Other Income	-	-	-
	Jumlah Penerimaan/Amount of Receipt	0	27,040,473	
	Total Sumber Dana/Total Source of Funds	4,768,000,000	5.039.150.263	109.19
2	Penyaluran Pinjaman/Penyalaran Pinjaman			
a.	Sektor Industri/Industrial Sector	1,200,000,000	60,000,000	31.67
b.	Sektor Perdagangan/Trade Sector	1,200,000,000	2,452,000,000	159.33
c.	Sektor Pertanian/Agricultural Sector	400,000,000	395,000,000	-
d.	Sektor Peternakan/Animal Husbandry Sector	400,000,000	420,000,000	192.50
e.	Sektor Perkebunan/Plantation Sector	608,000,000	-	-
f.	Sektor Perikanan/Fishery Sector	-	330,000,000	-
g.	Sektor Jasa/Service Sector	400,000,000	715,000,000	221.25
h.	Sektor Lainnya/Other Sector	-	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana (Penilaian)/Amount of Fund Usage (Valuation)	4,208,000,000	4,372,000,000	103,90

No	Uraian Description	Anggaran Tahun 2020 2020 Budget	Realisasi s.d 31 Des 2020 Realization until 31 Dec 2020	%
3	Beban Operasional/ <i>Operating Expenses</i>			
a.	Survei/ <i>Survey</i>	-	-	-
b.	Monitoring/ <i>Monitoring</i>	-	-	-
c.	Penagihan/ <i>Billing</i>	-	-	-
d.	Administrasi/ <i>Administration</i>	-	18,651,791	-
e.	Pengembalian Kelebihan Angsuran/ <i>Return of Excess Installments</i>	-	-	-
f.	Beban Lain-lain/ <i>Other Expense</i>	-	-	-
	Jumlah Beban/ <i>Total Load</i>	-	18,651,791	-
4	Penyaluran melalui BUMN Khusus/ <i>Distribution through Special SOEs</i>	-	-	-
5	Penyaluran Dana Pembinaan Kemitraan/ <i>Distribution of Partnership Development Funds</i>	560,000,000	-	-
	Jumlah Penggunaan Dana/ <i>Total Use of Funds</i>	4,768,000,000	4,390,651,791	92,08
	Saldo Akhir/ <i>Total Balance</i>	-	856.152.342	-

Efektivitas Penyaluran (%)
Distribution Effectiveness (%)

Penyerapan (%) / usage (%)
Skor / Score

>90 **85-90** **80-85** **<80**
3 **2** **1** **0**

EFEKTIVITAS PEMBINAAN

Coaching Effectiveness

Efektivitas Penyaluran

Guna melihat efektivitas pembinaan dalam program kemitraan, maka Jamkrindo menggunakan 2 (dua) cara untuk mengukur hal tersebut, yaitu dilihat dari efektivitas penyaluran dana dan melihat tingkat kolektibilitas penyaluran. Penjelasan pengukuran dan hasil efektivitas penyaluran dana kemitraan Jamkrindo adalah sebagai berikut:

Distribution Effectiveness

In order to see the effectiveness of coaching in the partnership program, Jamkrindo uses 2 (two) ways to measure this, namely from the effectiveness of the distribution of funds, namely the percentage of the amount of funds disbursed to the total available funds, and looking at the collectability of the distribution. The explanation of the measurement and results of the effectiveness of the distribution of Jamkrindo's partnership funds are as follows: as follows

1. Efektivitas Penyaluran Dana

Aspek ini diukur menggunakan rasio jumlah dana yang disalurkan terhadap total dana yang tersedia

1. Effectiveness of Funding

This aspect is measured using the ratio of the amount of funds disbursed to the total available funds

$$\frac{\text{Jumlah dana yang disalurkan}}{\text{total funds distributed}} \times 100\% \\ \frac{\text{Jumlah dana yang tersedia}}{\text{total available funds}}$$

Jumlah Dana Yang Disalurkan

Total Funds Distributed

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019
Pinjaman Kemitraan BUMN Khusus Special SOE Partnership Loans	-	8.000.000.000
Penyaluran Pinjaman Loan Distribution	4.372.000.000	5.131.500.000
Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Fostering Fund	-	569.598.114
Jumlah Dana yang Disalurkan Total Distributed Fund	4.372.000.000	13.701.098.114

Jumlah Dana Yang Tersedia

Total Funds Distributed

dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Uraian Description	2020	2019
Saldo awal dana Initial balance of funds	1.466.549.328	9.181.850.097
Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan Returning loans from fostered partners	3.337.819.882	5.700.261.277
Pendapatan Jasa Administrasi Yang Disalurkan Income from loan administration services	207.596.019	319.484.177
Jumlah Dana Yang Tersedia Total available fund	5.011.965.229	15.201.595.551

2020

$$\frac{4.372.000.000}{5.011.965.229} \times 100\% = 87,23\%$$

2019

$$\frac{13.701.098.114}{15.201.595.551} \times 100\% = 90.13\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.198/KMK.016/1998 tanggal 24 Maret 1998 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN No.PER-10/MBU/2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, tingkat kinerja pelaksanaan Program Kemitraan memperoleh skor 2.

Based on the Decree of the Minister of Finance No.198/KMK.016/1998 dated March 24, 1998 which has been renewed by the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-10/MBU/ 2014 dated July 25, 2014 concerning Indicators for Assessment of Health Level of State-Owned Enterprises, the level of performance of the implementation of the Partnership Program obtained a score of 2.

Tabel Skor Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN

SOE Health Level Rating Score Table

Penyerapan (%) Usage (%)	>90	85-90	80-85	<10
Skor Score	3	2	1	0

Tingkat Kolektibilitas Penyaluran Piutang

Aspek ini diukur menggunakan rasio jumlah nilai tertimbang dan jumlah piutang mitra binaan. Nilai tertimbang didapatkan dari penjumlahan hasil perkalian nilai piutang mitra binaan dengan nilai bobot kolektibilitas masing-masing piutang. Sedangkan, indikator yang ditetapkan untuk menilai kinerja kolektibilitas ini adalah sebagai berikut:

Accounts Receivable Collectability Level

This aspect is measured using the ratio of the total weighted value and the total receivables of the foster partners. The weighted value is obtained from the sum of the multiplication of the foster partner's receivables value with the collectability weight value of each receivable. Meanwhile, the indicators established to assess the collectability performance are as follows:

Tingkat Pengembalian (%)

Return Rate (%)

>70 40-70 10-40 <10

Skor
Score

3 2 1 0

Saldo pinjaman per 31 Desember 2020 dan penyisihannya adalah sebagai berikut:

The loan balance as of December 31, 2020 and the allowance are as follows:

Kolektibilitas Piutang Collectibility of Receivables	Jumlah Piutang Amount of Receivables	Tarif Tarif	Penyisihan Allowance	Bersih Net
		Penyisihan Weight Value		
Lancar/Current	5.355.433.560	4,59%	245.857.115	5.109.576.445
Kurang Lancar/Substandard	2.335.045.963	9,15%	213.681.235	2.121.364.728
Diragukan/Doubtful	1.299.105.459	27,47%	356.840.994	942.264.465
Macet/Bad	7.885.327.103	100,00%	7.885.327.103	-
Jumlah/Total	16.874.912.085		8.701.706.447	8.173.205.638

Tingkat Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman adalah 51,57%

Berdasarkan perhitungan di atas, maka skor tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 51,57%. Hal ini berarti bahwa tingkat kinerja program pembinaan kemitraan pada tahun 2020 diperkirakan dengan total skor = 2.

The Collectability Rate of Loan Repayments Is 51.57%

Based on the above calculations, the score for the collectability rate of loan repayments is 51.57%. This means that the level of performance of the partnership coaching program in 2020 is estimated with a total score = 2.

KISAH SUKSES MITRA BINAAN

Success stories of Foster Partners

Kadek Trisnawati, Produsen Kain Grinsing (Batik Tulis)

Kadek Trisnawati, Manufacturer of Grinsing Fabrics (Written Batik)



“PT Jamkrindo dengan komitmennya mendorong pelaku usaha Indonesia dalam mengembangkan usahanya berhasil membidik usaha kain grinsing milik Ibu Kadek Trisnawati ini.”

“PT Jamkrindo with its commitment to encouraging Indonesian business actors in developing their business has succeeded in targeting the grinsing fabric business owned by Mrs. Kadek Trisnawati.”

Ibu Kadek Trisnawati, pemilik Tris Shop, tak menyangka usaha kain grinsing yang dikembangkannya 24 tahun yang lalu sukses di pasar lokal sejak tahun 2018. Usaha ini berlokasi di Desa Tenganan Pegringsingan, Kecamatan Manggis, Karangasem, Bali. Jalan lapang bisnisnya kian terbuka lebar setelah Ibu Kadek bergabung sebagai mitra binaan PT Jamkrindo pada tahun 2018 lalu. Usaha kain grinsing ini ia rintis dengan penuh ketekunan dan konsistensi membuat usaha ini dilirik oleh masyarakat lokal, turis domestik, dan turis mancanegara. PT Jamkrindo dengan komitmennya mendorong pelaku usaha Indonesia dalam mengembangkan usahanya berhasil membidik usaha kain grinsing milik Ibu Kadek Trisnawati ini. Kain grinsing adalah satu-satunya kain tenun tradisional Indonesia yang dibuat menggunakan teknik teknik dobel ikat dan memerlukan waktu 2-5 tahun. Kain ini berasal dari Desa Tenganan, Bali. Umumnya, masyarakat Tenganan menggunakan kain grinsing untuk upacara adat. Tidak hanya masyarakat lokal, melainkan turis domestik dan mancanegara pun tertarik untuk memiliki kain grinsing ini karena motif dan kualitas kain yang bagus.

Mrs. Kadek Trisnawati, owner of Tris Shop, did not expect the grinsing fabric business she developed 24 years ago to be successful in the local market since 2018. This business is located in Tenganan Pegringsingan Village, Manggis District, Karangasem, Bali. The business road is wide open after Mrs. Kadek joined as a foster partner of PT Jamkrindo in 2018. He pioneered this grinsing cloth business with great perseverance and consistency, making this business ogled by local people, domestic tourists, and foreign tourists. PT Jamkrindo with its commitment to encouraging Indonesian business actors in developing their business has succeeded in targeting the grinsing fabric business owned by Mrs. Kadek Trisnawati. Gringsing cloth is the only traditional Indonesian woven fabric that is made using the double ikat technique and takes 2-5 years. This cloth comes from Tenganan Village, Bali. Generally, the Tenganan people use grinsing cloth for traditional ceremonies. Not only local people, but domestic and foreign tourists are also interested in having this grinsing cloth because of the motif and good quality of the cloth.

Ibu Kadek bergabung menjadi mitra binaan PT Jamkrindo pada tahun 2018 dengan mengikuti alur seleksi mitra binaan yang dilakukan Jamkrindo Cabang Denpasar. Ibu Kadek mendapatkan pinjaman sebesar Rp20 juta dengan tujuan untuk menambah modal usaha dalam memproduksi kain grinsing. Pinjaman ini diberikan dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun, berakhir tepat pada Juni 2021. Sejak bergabung menjadi mitra binaan Jamkrindo, Ibu Kadek dapat meningkatkan jumlah produksi kain grinsing. Penambahan modal digunakan untuk ongkos tenun. Hal ini mengakibatkan semakin banyak modal untuk tenun, semakin banyak kain yang dapat diproduksi. Pada akhirnya, stock kain grinsing pun semakin banyak. Pergerakan kain grinsing di toko Ibu Kadek pun tergolong cepat mengingat masyarakat lokal memang membutuhkan kain grinsing ini untuk pelaksanaan upacara adat. Pengembangan lainnya dengan bantuan pinjaman modal dari Jamkrindo adalah Ibu Kadek memproduksi jenis kain lainnya, yaitu Plendoan. Plendoan ini diproduksi bermula di tahun 2020 dan mendapatkan respons pasar yang positif.

Di Tahun 2020, ketika pandemi terjadi produksi kain tetap berjalan. Ada penurunan produksi tetapi tidak begitu signifikan. Hal ini merupakan strategi usaha Ibu Kadek, di masa pandemi inilah Ibu Kadek menambah stok produknya untuk dapat dijual ketika situasi telah pulih kembali. Sedangkan, terkait penjualan memang mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya turis domestik dan mancanegara. Hal ini tercermin dengan jumlah omset di tahun 2020 sebesar Rp10 juta. Harapan Ibu Kadek ke depannya adalah usaha ini dapat menembus pasar mancanegara. Ibu Kadek mengapresiasi langkah Jamkrindo yang terus konsisten mendorong pelaku usaha, terutama ketika menghadapi tantangan pandemi COVID-19.

Mrs. Kadek joined as a foster partner of PT Jamkrindo in 2018 by following the development partner selection process conducted by Jamkrindo Denpasar Branch. Mrs. Kadek received a loan of IDR20 million with the aim of increasing business capital in producing grinding cloth. This loan is given for a period of 3 (three) years, ending on June 2021. Since joining Jamkrindo's fostered partner, Mrs. Kadek has been able to increase the amount of grinding fabric production. The additional capital is used for weaving costs. This resulted in the more capital for weaving, the more fabrics that could be produced. In the end, the stock of grinding cloth was increasing. The movement of the grinsing cloth at Mrs. Kadek's shop was quite fast considering that the local community really needed this grinsing cloth for the implementation of traditional ceremonies. Another development with the help of a capital loan from Jamkrindo is that Ibu Kadek produces another type of fabric, namely Plendoan. This plendoan was produced starting in 2020 and received a positive market response.

In 2020, when the pandemic occurred, fabric production continued. There is a decrease in production but not so significant. This is Mrs. Kadek's business strategy, during this pandemic, Mrs. Kadek adds to her stock of products to be sold when the situation has recovered. Meanwhile, related sales did experience a decline due to reduced domestic and foreign tourists. This is reflected in the total turnover in 2020 of IDR10 million. Ibu Kadek hopes that in the future this business can penetrate foreign markets. Mrs. Kadek appreciates Jamkrindo's steps that continue to consistently encourage business actors, especially when facing the challenges of the COVID-19 pandemic.

Cessbi, Brand Tas Yang Bertahan Menghadapi Tantangan COVID-19

Cessbi, The Bag Brand That Survives The Challenges Of COVID-19



"Jamkrindo yang berkomitmen untuk mendukung usaha produk lokal tertarik dengan CESSBI dan berharap usaha ini akan semakin berkembang dengan target pasar yang semakin meluas."

"Jamkrindo, which is committed to supporting local product businesses, is interested in CESSBI and hopes that this business will continue to grow with a wider target market."

Salah satu mitra binaan Jamkrindo adalah brand CESSBI, yang bergerak di bidang industri kerajinan tas. Tas yang diproduksi berupa tas anak, wanita, dan custom. Produksi tas ini berlokasi di daerah Cibubur, Jakarta Timur yang didirikan pada tahun 2016. Adapun pemasaran produk CESSBI dilakukan melalui media sosial online, seperti Facebook dan Instagram. Loyal customer yang sudah mengetahui kualitas dari CESSBI semakin berkembang yang disebabkan oleh *mouth-to-mouth power*. Hal ini juga membuat CESSBI semakin membesar dengan memproduksi secara luas tas custom, tas yang dibuat sesuai dengan permintaan customer. Tas custom ini seringkali dipesan untuk kegiatan seminar, pelatihan, dan sebagainya.

One of Jamkrindo's fostered partners is the CESSBI brand, which is engaged in the bag craft industry. The bags produced are children's, women's, and custom bags. The production of this bag is located in the Cibubur area, East Jakarta, which was established in 2016. The marketing of CESSBI products is carried out through online social media, such as Facebook and Instagram. Loyal customers who already know the quality of CESSBI are growing due to *mouth-to-mouth power*. This also makes CESSBI grow bigger by producing a wide range of custom bags, bags made according to customer requests. These custom bags are often ordered for seminars, training, and so on.

Pada tahun 2019, CESSBI menjalin kerja sama dengan Jamkrindo. Kerja sama ini berawal dari Pak Okal, selaku Production Head dan Public Relation yang mengajukan pinjaman ke Kantor Pusat Jamkrindo. Beliau menyatakan bahwa proses pendaftarannya tidaklah sulit. Informasi yang diberikan oleh Jamkrindo juga sangat lengkap dan *feedback*-nya tidak lama. Jamkrindo yang berkomitmen untuk mendukung usaha produk lokal tertarik dengan CESSBI dan berharap usaha ini akan semakin berkembang dengan target pasar yang semakin meluas.

In 2019, CESSBI collaborated with Jamkrindo. This collaboration started with Mr. Okal, as the Production Head and Public Relations, who applied for a loan to the Jamkrindo Head Office. He stated that the registration process was not difficult. The information provided by Jamkrindo is also very complete and the feedback does not take long. Jamkrindo, which is committed to supporting local product businesses, is interested in CESSBI and hopes that this business will continue to grow with a wider target market.

Setelah melalui proses penyaringan mitra binaan, Jamkrindo memberikan pinjaman kepada CESSBI sebesar Rp50 juta di Bulan Desember Tahun 2019 dengan waktu pengembalian 3 (tiga) tahun.

Setelah menjadi mitra binaan Jamkrindo, produk CESSBI semakin berkembang pesat. Di akhir tahun 2019, omset semakin naik mencapai Rp900 juta. Hanya saja pada tahun 2020 ketika masa pandemi terjadi, CESSBI mengalami penurunan omset penjualan. *Customer* yang sudah membuat kontrak dengan CESSBI seketika ditunda sampai waktu yang belum ditentukan. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi CESSBI. Namun, CESSBI tetap berusaha untuk terus bangkit dan mengubah kendala menjadi tantangan yang harus ditemukan solusinya. Jamkrindo juga salah satu yang berperan penting pada masa pandemi ini karena terus konsisten mendukung produksi CESSBI. Pinjaman modal dari Jamkrindo terus diberikan kepada CESSBI dan terdapat keringanan pembayaran cicilan di awal pandemi terjadi.

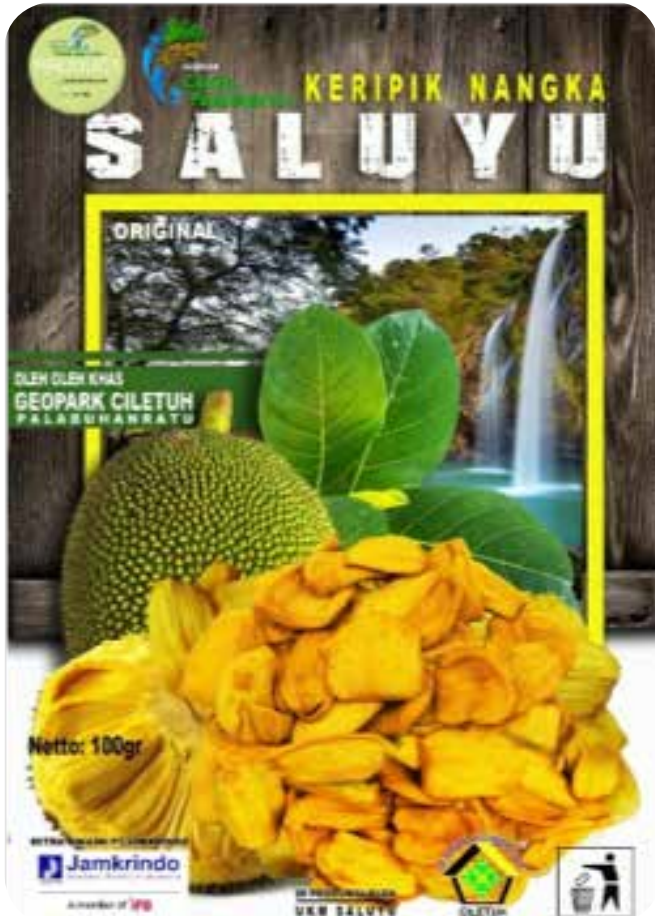
Harapan dari CESSBI yang disampaikan oleh Pak Okal adalah terus mencoba untuk bangkit dengan kondisi saat ini. Salah satunya dengan membangun nama brand kembali. Selain itu, beliau menyatakan sangat mengapresiasi langkah Jamkrindo yang mendukung usaha produk anak negeri. Adapun harapan ke depannya semoga diadakan lagi pameran-pameran di sejumlah wilayah Indonesia.

After going through the screening process of fostered partners, Jamkrindo provided a loan to CESSBI of IDR50 million in December 2019 with a repayment period of 3 (three) years.

After becoming Jamkrindo's foster partner, CESSBI's products have grown rapidly. At the end of 2019, the turnover increased to IDR900 million. It's just that in 2020 when the pandemic period occurred, CESSBI experienced a decline in sales turnover. Customers who have made a contract with CESSBI are immediately postponed until an undetermined time. This is a separate obstacle for CESSBI. However, CESSBI still strives to continue to rise and turn obstacles into challenges that must be found solutions. Jamkrindo is also one of those who play an important role during this pandemic because it continues to consistently support CESSBI production. Capital loans from Jamkrindo continue to be provided to CESSBI and there is relief in installment payments at the beginning of the pandemic.

The hope from CESSBI that was conveyed by Mr. Okal was to keep trying to get up with the current conditions. One of them is by building a brand name again. In addition, he expressed his appreciation for Jamkrindo's steps in supporting the business of domestic products. In the future, it is hoped that more exhibitions will be held in several regions of Indonesia.

Produk UKM Saluyu, Olahan Mangga Menjadi Buah Tangan yang Diminati



Saluyu UKM Product, Processed Mango Becomes Interested Handiwork

"Jamkrindo memberikan bantuan berupa mesin pengolah mangga, mesin vacuum, sealer, dan paket pelatihan senilai Rp15.950.000."

"Jamkrindo provided assistance in the form of mango processing machines, vacuum machines, sealers, and training packages worth IDR15,950,000."

Sukabumi menyimpan banyak daya tarik wisata, salah satunya adalah Geopark Ciletuh. Geopark ini sedang dinominasikan menjadi bagian dari Global Geopark Network UNESCO. Harapannya adalah Geopark Ciletuh ini akan semakin mendunia. Perlu diketahui bahwa objek wisata ini merupakan salah satu destinasi wisata baru di Sukabumi dengan 70 objek wisata. Geopark ini memiliki luas sekitar 128.000 hektar dan mencakup 74 (tujuh puluh empat) desa di 8 (delapan) kecamatan.

Salah satu kecamatan di kawasan Geopark Ciletuh, yaitu Kecamatan Ciemas memiliki potensi alam yang sangat besar. Kebun mangga milik masyarakat seluas 200 hektar menghasilkan ratusan ton buah mangga selama masa puncak panen. Ketika panen raya tiba, harga mangga selalu jatuh karena tidak terserap oleh pasar. Hal ini yang menjadi latar belakang ide usaha berbasis bahan baku lokal di Kawasan Geopark Ciletuh. Hal ini disepakati untuk memberikan nilai tambah pada bahan baku lokal tersebut.

Sukabumi has many tourist attractions, one of which is the Ciletuh Geopark. This geopark is being nominated to be part of the UNESCO Global Geopark Network. The hope is that the Ciletuh Geopark will become more global. Please note that this tourist attraction is one of the new tourist destinations in Sukabumi with 70 attractions. This geopark has an area of approximately 128,000 hectares and covers 74 (seventy four) villages in 8 (eight) sub-districts.

One of the sub-districts in the Ciletuh Geopark area, namely Ciemas District, has enormous natural potential. The community's 200-hectare mango orchard produces hundreds of tons of mangoes during peak harvest times. When the main harvest arrives, the price of mangoes always falls because it is not absorbed by the market. This is the background for business ideas based on local raw materials in the Ciletuh Geopark Area. It was agreed to provide added value to the local raw materials.

Adapun UKM Saluyu mengelola ide usaha tersebut menjadi kenyataan yang dibina oleh perangkat desa setempat. Melihat peluang tersebut, PT Jamkrindo ikut berkontribusi langsung dalam pemberdayaan masyarakat ini melalui pendistribusian bantuan program bina lingkungan.

Jamkrindo memberikan bantuan berupa mesin pengolah mangga, mesin vacuum, sealer, dan paket pelatihan senilai Rp15.950.000. Bantuan ini didistribusikan langsung pada bulan September 2020 yang dilanjutkan dengan pemberian pelatihan kepada anggota UKM Saluyu selama 3 (tiga) hari.

Pada awal produksi di masa pandemi tidak membuat anggota UKM menyerah begitu saja. Mereka melakukan produksi keripik dengan mematuhi protokol kesehatan dan bekerja berdasarkan sistem shift, yaitu 5 (lima) orang per *shift*. Usaha dan ketekunan dari UKM Saluyu berbuah manis. Olahan mangga yang berbentuk keripik ini ternyata mendapatkan respons positif dari pasar. UKM Saluyu mampu menjual lebih dari 1.000 *pack* keripik buah mangga. Adapun penjualan keripik ini dilakukan secara langsung, sistem konsinyasi dengan tempat oleh-oleh dan rumah makan, dan melalui media sosial *facebook*. Selain itu, hal yang unik ini adalah perangkat desa menjadikan proses pengolahan mangga ini sebagai atraksi wisatawan yang berkunjung ke kawasan Geopark Ciletuh. Pemanfaatan area produksi untuk kunjungan wisatawan menjadi ide cemerlang terkait pemasaran hasil olahan mangga kepada wisatawan yang datang.

Sebagai perusahaan yang berkomitmen untuk turut andil dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, Jamkrindo telah sukses berpartisipasi dalam memberikan bantuan yang dapat meningkatkan jumlah produksi olahan mangga di Kecamatan Ciemas, Sukabumi, Jawa Barat.

The Saluyu UKM manages the business idea into a reality which is fostered by local village officials. Seeing this opportunity, PT Jamkrindo directly contributed to the empowerment of this community through the distribution of assistance for the environmental development program.

Jamkrindo provided assistance in the form of mango processing machines, vacuum machines, sealers, and training packages worth IDR15,950,000. This assistance was distributed directly in September 2020 which was followed by providing training to members of the Saluyu UKM for 3 (three) days.

At the beginning of production during the pandemic, SME members did not just give up. They produce chips by complying with health protocols and working based on a shift system, which is 5 (five) people per shift. The efforts and perseverance of the Saluyu SMEs paid off. The processed mango in the form of chips has received a positive response from the market. UKM Saluyu is able to sell more than 1,000 packs of mango chips. The sales of these chips are carried out directly, on a consignment system with souvenir shops and restaurants, and through social media Facebook. In addition, this unique thing is that village officials make the mango processing process a tourist attraction visiting the Ciletuh Geopark area. Utilization of the production area for tourist visits is a brilliant idea regarding the marketing of processed mango products to tourists who come.

As a company that is committed to contributing to sustainable economic development, Jamkrindo has successfully participated in providing assistance that can increase the amount of processed mango production in Ciemas District, Sukabumi, West Java.

REALISASI PROGRAM BINA LINGKUNGAN

Realization of the Community Development Program

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No.PER-08/ MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No.PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, yang diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, diperbarui kembali dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-03/MBU/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 19 Desember 2016, dan terakhir diperbarui melalui Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara tanggal 20 Juli 2017, maka program bina lingkungan di PT Jamkrindo menetapkan rencana kerja yang sejalan dengan peraturan-peraturan tersebut.

Komitmen PT Jamkrindo untuk mendukung pembangunan berkelanjutan nasional diwujudkan dengan fokus perusahaan pada aktivitas bina lingkungan. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Kantor PT Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran perusahaan atas keberadaan masyarakat di sekitar perusahaan dan Permen BUMN No.PER-02/MBU/04/2020 2 April 2020

Adapun Program Bina Lingkungan yang direncanakan PT Jamkrindo meliputi 7 (tujuh) jenis bantuan sebagai berikut:

1. Bantuan sosial kemasyarakatan
2. Bantuan korban bencana alam dan non alam
3. Bantuan pendidikan dan /atau pelatihan
4. Bantuan sarana ibadah
5. Bantuan korban bencana alam dan non alam karena wabah
6. Bantuan pengembangan prasarana
7. Bantuan peningkatan kesehatan dan /atau sarana umum
8. Bantuan pelestarian alam

Based on the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-08/MBU/2013 dated September 10, 2013 concerning the Fourth Amendment to the Regulation of the State Minister for State-Owned Enterprises No.PER-05/MBU/2007 concerning the Partnership Program for State-Owned Enterprises with Small-scale Enterprises and Community Development Programs, which was updated through the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises, updated again with the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.PER-03/MBU/12/2016 concerning Amendments to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning the Partnership Program and Community Development Program for State-Owned Enterprises dated December 19, 2016, and most recently updated through the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No.PER-02/MBU/7/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister for State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/07/2015 concerning Partnership Programs and Community Development Programs for State-Owned Enterprises dated July 20, 2017, the environmental development program at PT Jamkrindo establishes a work plan that is in line with these regulations.

PT Jamkrindo's commitment to support national sustainable development is manifested by the company's focus on environmental development activities. The Community Development Program is a program to empower the social conditions of the community around the PT Jamkrindo office area, which is organized through the use of funds from the Company's profit share. This is motivated by the company's awareness of the existence of the community around the company and the BUMN Regulation No.PER-02/MBU/04/2020 April 2, 2020

The Community Development Program planned by PT Jamkrindo includes 7 (seven) types of assistance as follows:

1. *Social community assistance*
2. *Assistance for victims of natural and non-natural disasters*
3. *Educational and /or training assistance*
4. *Worship facilities assistance*
5. *Assistance for victims of natural and non-natural disasters due to epidemic*
6. *Public infrastructure assistance*
7. *Health improvement /or facilities development assistance*
8. *Nature preservation assistance*

Tabel Realisasi Program Bina Lingkungan

Realization Table of the Community Development Program

No.	Uraian Description	2020 (Rp/IDR)	2019 (Rp/IDR)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
1.	Bantuan sosial kemasyarakatan <i>Social Community Assistance</i>	4.000.358.220	2.973.553.093	34,53%
2.	Bantuan korban bencana alam dan non alam <i>Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters</i>	2.697.807.445	237.032.782	1038,16%
3.	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan <i>Educational and/or Training Assistance</i>	2.029.064.103	1.001.117.503	102,68%
4.	Bantuan Sarana Ibadah <i>Worship Facilities Assistance</i>	1.477.647.000	517.951.600	185,29%
5.	Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam Karena Wabah <i>Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters due to Epidemic</i>	815.610.623	-	-
6.	Bantuan pengembangan prasarana <i>Public Infrastructure Assistance</i>	584.710.000	233.414.000	150,50%
7.	Bantuan peningkatan kesehatan dan/atau sarana umum <i>Health Improvement /or Facilities Development Assistance</i>	166.680.000	201.539.566	(17,30%)
8.	Bantuan pelestarian alam <i>Nature Preservation Assistance</i>	117.750.000	137.793.333	(14,55%)
Jumlah/Total		11.889.627.391	5.302.401.877	124%

Jamkrindo terus membuktikan kepedulian terhadap upaya pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Melalui kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL), Jamkrindo telah melakukan serangkaian kegiatan yang mendapatkan apresiasi dari masyarakat di tahun 2020. Kegiatan yang dilakukan meliputi bidang pendidikan, pemberdayaan UMKM, dan kesehatan. Untuk bidang pendidikan, tahun lalu, Jamkrindo telah melakukan serangkaian renovasi bangunan sekolah, antara lain di Ciamis dan Kupang. Sementara di Tarakan, Lampung, dan Pandeglang, Jamkrindo melakukan pendirian 3 (tiga) Taman Bacaan Sekolah.

Jamkrindo continues to prove its concern for community empowerment efforts in various regions in Indonesia. Through the Partnership and Community Development Program (PKBL), Jamkrindo has carried out a series of activities that have received appreciation from the community in 2020. Activities carried out include the fields of education, empowerment of MSMEs, and health. For the education sector, last year, Jamkrindo carried out a series of renovations to school buildings, including in Ciamis and Kupang. Meanwhile, in Tarakan, Lampung, and Pandeglang, Jamkrindo established 3 (three) School Reading Gardens.

Untuk program beasiswa, Jamkrindo juga telah melaksanakan di Jakarta dan Sumenep. PT Jamkrindo memberikan kebahagiaan dengan menyalurkan bantuan program bina lingkungan (BL) pada tiga mushola dengan total Rp150 juta di berbagai wilayah di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Penyaluran dana Program Bina Lingkungan PT Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp11.889.627.391. Apabila dibandingkan dengan RKA tahun 2020 sebesar Rp11.760.500.000, maka realisasi dana Program Bina Lingkungan tercatat sebesar 101,09%.

Sebagai komitmen Jamkrindo terhadap program bina lingkungan, PT Jamkrindo melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan Geopark Ciletuh dalam rangka kampanye anti sampah plastik untuk meningkatkan kesadaran kepedulian lingkungan.

For the scholarship program, Jamkrindo has also implemented it in Jakarta and Sumenep. PT Jamkrindo gave happiness by distributing the environmental development program (BL) assistance to three prayer rooms with a total of IDR150 million in various areas in Banyumas Regency, Central Java.

The distribution of funds for the PT Jamkrindo Community Development Program in 2020 was recorded at IDR11,889,627,391. When compared with the 2020 RKA of IDR11,760,500,000, the realization of Community Development Program funds was recorded at 101.09%.

As Jamkrindo's commitment to the environmental development program, PT Jamkrindo conducts community empowerment activities in the Ciletuh Geopark area in the context of an anti-plastic waste campaign to increase awareness of environmental care.

DAMPAK BANTUAN BINA LINGKUNGAN TERHADAP MASYARAKAT

Impact of Community Development Assistance on the Communities

Fasilitas Sumber Air Bersih di Kampung Lame, Jambe, Tangerang

Clean Water Source Facilities in Lame Village, Jambe, Tangerang



"Jamkrindo senantiasa menyeimbangkan kinerja usaha dengan tetap memperhatikan lingkungannya."

"Jamkrindo always balances business performance while paying attention to the environment."

Perusahaan telah menyalurkan bantuan dana bina lingkungan yang ditujukan ke beberapa sektor diantaranya bencana alam dan non bencana alam, pendidikan dan pelatihan, kesehatan, sarana dan prasarana umum. Berikut adalah program bina lingkungan yang bersinergi dengan Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Cabang Banten. Program ini dimulai pada bulan Desember 2020. Dengan pelaksanaan PKBL yang baik dan efektif, Jamkrindo senantiasa menyeimbangkan kinerja usaha dengan tetap memperhatikan lingkungannya. Jamkrindo senantiasa mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dalam lingkup sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan.

The company has distributed environmental development funds aimed at several sectors including natural and non-natural disasters, education and training, health, public facilities and infrastructure. The following is a community development program that synergizes with Daarut Tauhid Peduli (DT Peduli) Banten Branch. This program started in December 2020. With a good and effective PKBL implementation, Jamkrindo always balances business performance while paying attention to the environment. Jamkrindo always encourages the creation of sustainable development in the social, cultural, economic and environmental spheres.

Program bina lingkungan di Kampung Lame RT 020/010 Desa Taban, Kecamatan Jambe, Tangerang ini bermula dari kisah relawan DT yang melihat terdapat sebuah masalah masyarakat terkait air bersih. Masyarakat di daerah tersebut mengalami kesulitan mendapatkan air bersih untuk kegiatan sehari-hari dikarenakan jarak rumah warga ke sumber air jauh. Selain itu, rumah warga tidak dilengkapi dengan toilet untuk buang air dan sarana MCK (mandi, cuci, kakus) yang tidak layak. Seperti kita ketahui bahwa MCK merupakan sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air di lokasi permukiman yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya rendah. Hal ini yang menjadi latar belakang DT Peduli menawarkan program pembangunan fasilitas air bersih kepada Jamkrindo. Jamkrindo yang berkomitmen untuk turut mensukseskan program pembangunan berkelanjutan tentu mendukung sekali program seperti ini.

The environmental development program in Kampung Lame RT 020/010 Taban Village, Jambe District, Tangerang started from the story of a DT volunteer who saw a community problem related to clean water. People in the area have difficulty getting clean water for their daily activities due to the distance from their homes to water sources. In addition, residents' homes are not equipped with toilets for defecation and inadequate toilet facilities (bathing, washing, latrine). As we know, MCK is a public facility that is shared by several families for the purposes of bathing, washing, and defecating in residential locations which are considered to have a fairly dense population and low level of economic capacity. This is the background for DT Peduli to offer a clean water facility development program to Jamkrindo. Jamkrindo, which is committed to participating in the success of sustainable development programs, certainly supports programs like this.

Dan, pada akhirnya pada bulan Desember 2020 terealisasi pembangunan MCK berjumlah 2 (dua) buah di Masjid Jami Al-Rohman Kampung Lame RT 020/010 Desa Taban, Kecamatan Jambe, Tangerang. Pemasangan ini termasuk keran air, keran air untuk wudhu, toilet, dan bak mandi. Bantuan bina lingkungan dari Jamkrindo ini senilai Rp75 juta.

Masyarakat Kampung Lame sangat mengapresiasi program bantuan lingkungan dari Jamkrindo yang bersinergi dengan DT Peduli Banten. Hal ini membuat lingkungan mereka semakin bersih dan layak untuk ditempati.

And, in the end, in December 2020, 2 (two) MCK construction was realized at the Jami Al-Rohman Mosque in Kampung Lame RT 020/010 Taban Village, Jambe District, Tangerang. This installation includes water taps, water taps for ablution, toilets, and bathtubs. This environmental development assistance from Jamkrindo is worth IDR75 million.

The people of Kampung Lame really appreciate the environmental assistance program from Jamkrindo which is in synergy with DT Peduli Banten. This makes their environment cleaner and more livable.





PENUTUP

Closing



OPINI AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN PKBL

Audit Opinion on PKBL Financial Statements

Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jamkrindo 2020 telah diaudit oleh Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (terafiliasi dengan Price Waterhouse and Coopers/ PwC) dengan pendapat opini “Wajar dalam semua hal yang material”.

PT Jamkrindo's 2020 Partnership and Community Development Program Financial Report has been audited by Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Partners (affiliated with Price Waterhouse and Coopers/ PwC) with the opinion opinion “Fair in all material matters”.

TANTANGAN DAN SOLUSI PELAKSANAAN PKBL

Challenges and Solutions for the Implementation of PKBL

Masalah yang dihadapi dalam pengelolaan PKBL antara lain

- Kendala dalam mencari calon mitra binaan yang tepat sasaran dan amanah
- Keterbatasan SDM yang mengelola PKBL.

The problems faced in PKBL management, among others

- Constraints in finding prospective partners who are right on target and trustworthy*
- Limited human resources who manage PKBL.*

Tindakan untuk mengatasi kendala tersebut di atas:

- Menjalin kerja sama dengan lembaga penyalur dana kemitraan atau melakukan sinergi BUMN.
- Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dengan mengikutsertakan personil mengikuti *Workshop* atau pelatihan yang berhubungan dengan kegiatan PKBL.

Actions to overcome the aforementioned constraints:

- Collaborating with institutions distributing partnership funds or synergizing SOEs.*
- Increasing the quantity and quality of human resources by involving personnel in workshops or training related to PKBL activities.*

Solusi yang Dicanangkan Dalam Pengelolaan PKBL ke Depan

Dalam pengelolaan PKBL ke depan, perlu adanya kerja sama penyaluran dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang merupakan program nasional hasil sinergi beberapa departemen/BUMN yang terkait dalam pengembangan UMK, pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan penyediaan lapangan kerja baru.

Solutions Proposed in Future Management of PKBL

In future PKBL management, there is a need for cooperation in channeling funds for the Partnership and Community Development Program, which is a national program resulting from the synergy of several departments / BUMNs that are involved in developing MSEs, alleviating poverty, increasing welfare, and providing new jobs.

LAMPIRAN - LAPORAN KEUANGAN PKBL

PKBL Financial Report

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN
BINA LINGKUNGAN**

LAPORAN KEUANGAN

31 DESEMBER 2020



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
PADA TANGGAL SERTA UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Putrama Wahyu Setyawan
Alamat kantor : Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Nomor telepon : 021- 6540335
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : I. Rusdonobanu
Alamat kantor : Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6, Gunung Sahari Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat 10610
Nomor telepon : 021- 6540335
Jabatan : Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL") PT Jaminan Kredit Indonesia;
2. Laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik ("SAK ETAP");
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia; telah dimuat secara lengkap dan benar;
b. Laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; dan
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Atas nama dan mewakili Direksi
Jakarta, 23 November 2021





Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama

I. Rusdonobanu
Direktur Keuangan, Investasi dan
Manajemen Risiko

Kantor Pusat

Gedung Jamkrindo, Jl. Angkasa B-9 Kav.6 Kemayoran Jakarta Pusat, 10610
Tel. (62-21) 654 0335, Fax.(62-21) 654 0344/48
www.jamkrindo.co.id

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN
PT JAMINAN KREDIT INDONESIA**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2020, serta laporan aktivitas dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, laporan posisi keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia pada tanggal 31 Desember 2020, laporan aktivitas dan laporan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

JAKARTA,
23 November 2021



Drs. M. Jusuf Wibisona, M.Ec., CPA
Ijin Akuntan Publik No. AP.0222

Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia,

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, www.pwc.com/id

Nomor Izin Usaha: KEP-241/KM.1/2015.

01626/2.1025/AU.2/09/0222-1/1/XI/2021

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Halaman 1

LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	3	856.152.342	1.466.549.328
Piutang pinjaman mitra binaan - bersih (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 8.701.706.447 dan Rp 6.243.539.288)	4, 15		
Piutang lain-lain	5	8.173.205.638 <u>6.580.027</u>	9.597.192.679 <u>51.080.032</u>
Jumlah aset lancar		<u>9.035.983.007</u>	<u>11.114.822.039</u>
ASET TIDAK LANCAR			
Aset tetap - bersih (setelah dikurangi akumulasi penyusutan pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 10.896.500)	6	-	-
Aset lain-lain	7		
Piutang bermasalah (setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai pada 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp 1.617.485.210)		<u>-</u>	<u>-</u>
Jumlah aset tidak lancar		<u>-</u>	<u>-</u>
JUMLAH ASET		<u>9.035.938.007</u>	<u>11.114.822.039</u>
LIABILITAS DAN ASET NETO			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Kelebihan pembayaran angsuran	9	156.397.131	-
Utang lain-lain	9	<u>10.690.734</u>	<u>3.934.000</u>
JUMLAH LIABILITAS		<u>167.087.865</u>	<u>3.934.000</u>
ASET NETO			
Aset neto tidak terikat	8	<u>8.868.850.142</u>	<u>11.110.888.039</u>
JUMLAH ASET NETO		<u>8.868.850.142</u>	<u>11.110.888.039</u>
JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO		<u>9.035.938.007</u>	<u>11.114.822.039</u>

Catatan atas laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

**LAPORAN AKTIVITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020**
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
PERUBAHAN ASET NETO TIDAK TERIKAT			
PENDAPATAN			
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	10	207.596.019	319.484.177
Pendapatan jasa giro	10	<u>27.185.034</u>	<u>66.491.040</u>
JUMLAH PENDAPATAN		<u>234.781.053</u>	<u>385.975.217</u>
BEBAN			
Beban cadangan kerugian penurunan nilai	13	2.458.167.159	1.164.021.876
Beban administrasi dan umum	13	18.651.791	21.290.002
Pengembalian alokasi dana Bina Lingkungan	13	-	4.424.147
Penyaluran hibah kepada BUMN Khusus		-	8.000.000.000
Penyaluran dana pembinaan kemitraan		<u>-</u>	<u>569.598.114</u>
JUMLAH BEBAN		<u>2.476.818.950</u>	<u>9.759.334.139</u>
PENURUNAN ASET NETO TIDAK TERIKAT		(2.242.037.897)	(9.373.358.922)
ASET NETO AWAL TAHUN		<u>11.110.888.039</u>	<u>20.484.246.961</u>
ASET NETO AKHIR TAHUN		<u>8.868.850.142</u>	<u>11.110.888.039</u>

Catatan atas laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Halaman 3

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020
 (Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2020	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Pengembalian pokok pinjaman mitra binaan	4	3.337.819.882	5.700.261.277
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	10	207.596.019	319.484.177
Kelebihan pengembalian angsuran	9	156.397.131	-
Piutang lain-lain	5	44.500.005	(48.659.000)
Pendapatan jasa giro	10	27.185.034	66.491.040
Utang lain-lain	9	6.756.734	(26.066.000)
Beban administrasi dan umum	13	(18.651.791)	(21.290.002)
Penyaluran pinjaman kemitraan	11	(4.372.000.000)	(5.131.500.000)
Pengembalian alokasi dana BUMN Pembina	10	-	(4.424.147)
Penyaluran dana pembinaan kemitraan	13	-	(569.598.114)
Penyaluran hibah kepada BUMN Khusus	13	-	(8.000.000.000)
KAS NETO YANG DIGUNAKAN			
UNTUK AKTIVITAS OPERASI		<u>(610.396.986)</u>	<u>(7.715.300.769)</u>
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		<u>(610.396.986)</u>	<u>(7.715.300.769)</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN	3	<u>1.466.549.328</u>	<u>9.181.850.097</u>
KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN	3	<u>856.152.342</u>	<u>1.466.549.328</u>

Catatan atas laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT Jaminan Kredit Indonesia ("Perusahaan") didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1981 dengan nama Perum Pengembangan Keuangan Koperasi, yang sebelumnya merupakan Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 tahun 1981, disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1985 selanjutnya dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 95 tahun 2000 tanggal 7 November 2000, Perum Pengembangan Keuangan Koperasi diubah menjadi Perum Sarana Pengembangan Usaha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018, Perum Sarana Pengembangan Usaha diubah menjadi Perum Jaminan Kredit Indonesia. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020, bentuk badan hukum Perum Jaminan Kredit Indonesia menjadi perseroan terbatas bernama PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) atau PT Jamkrindo (Persero) berdasarkan Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., No. 25 tanggal 24 Februari 2020.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, anggaran dasar terakhir disahkan oleh Akta Notaris Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H. No. 02 tanggal 9 April 2020 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0028854.AH.01.02 tanggal 9 April 2020. Perubahan Anggaran Dasar terakhir ini adalah perubahan struktur pemegang saham akibat dari pengalihan seluruh saham seri B Negara Republik Indonesia dan dalam rangka penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia pada PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) ("BPUI"), dan mengenai nama Perusahaan dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) menjadi PT Jaminan Kredit Indonesia.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Jalan Angkasa Blok 9-Kav.6, Kota Baru Bandar Kemayoran, Jakarta dan mempunyai 9 Kantor Wilayah, 1 kantor cabang khusus, 55 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia (tidak diaudit).

Entitas induk langsung dan entitas induk utama Perusahaan adalah PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) yang didirikan dan berdomisili di Indonesia.

Landasan Hukum

- 1) Ketetapan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
- 2) Surat Edaran PT Jaminan Kredit Indonesia No. 113/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, tentang Kebijakan Akuntansi dan Standard Operating Procedure Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.
- 3) Surat Edaran PT Jaminan Kredit Indonesia No. 114/SE/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 4) Surat Keputusan Menteri BUMN RI No. KEP-236/MBU/2003 (KEP-236) tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL).
- 5) Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan (RKA PKBL) Tahun 2020.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

a. Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)

Landasan Hukum (lanjutan)

- 6) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- 7) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.
- 8) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.
- 9) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang perubahan keempat Atas Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, dan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013.
- 10) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, mencabut Peraturan Menteri Negara BUMN RI No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007, Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012, Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013, Peraturan Menteri BUMN RI No. 07/MBU/2013 tanggal 27 Juni 2013, Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-08/MBU/2013 tanggal 10 September 2013 dan Surat Deputi Bidang Restrukturisasi dan Perencanaan Strategis BUMN RI No. S-92/D5.MBU/2013 tanggal 3 April 2013.
- 11) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, mencabut Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 akan mulai diberlakukan pada tahun 2016.
- 12) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, merupakan perubahan pertama atas Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- 13) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, merupakan perubahan kedua Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-07/MBU/05/2015 tanggal 22 Mei 2015.
- 14) Surat Edaran Menteri Negara BUMN RI No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
- 15) Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN, merupakan perubahan ketiga Surat Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. **UMUM** (lanjutan)

a. **Pendirian dan Informasi Umum** (lanjutan)

Landasan Hukum (lanjutan)

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, Perusahaan telah membuat suatu kebijakan tentang Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("Bagian PKBL") yang dituangkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("RKA PKBL").

b. **Kegiatan Utama**

Program Kemitraan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Kemitraan meliputi:

- 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan;
- 2) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan; dan
- 3) Beban pembinaan untuk membiayai bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.

Program Bina Lingkungan

Kegiatan utama yang dilakukan oleh Program Bina Lingkungan adalah penyaluran bantuan, meliputi:

- 1) Bantuan bencana alam dan bencana non alam;
- 2) Bantuan bencana alam dan bencana non alam yang disebabkan oleh wabah;
- 3) Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan;
- 4) Bantuan peningkatan kesehatan;
- 5) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum;
- 6) Bantuan sarana ibadah;
- 7) Bantuan pelestarian alam; dan
- 8) Bantuan sosial kemasyarakatan untuk pengentasan kemiskinan;

Berdasarkan rencana kerja, penyaluran Program Bina Lingkungan dapat disalurkan untuk kegiatan dengan ruang lingkup seperti tersebut di atas, sedangkan dalam realisasinya, penyaluran Program Bina Lingkungan disesuaikan dengan permohonan yang diterima dan kondisi masyarakat di lingkungan operasional PT Jaminan Kredit Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Republik Indonesia No. PER-08/MBU/2014 tanggal 10 September 2014, program Bina Lingkungan BUMN Peduli telah dihapuskan. Sisa alokasi dana program Bina Lingkungan BUMN Peduli digunakan seluruhnya untuk program Bina Lingkungan BUMN Pembina.

c. **Sumber Pendanaan**

Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

- 1) Penyisihan laba bersih setelah pajak yang ditetapkan dalam RUPS pengesahan Laporan Tahunan BUMN Pembina maksimum sebesar 4% (empat persen) dari laba setelah pajak tahun buku sebelumnya;
- 2) Jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil dari Program Kemitraan;
- 3) Hasil bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang ditempatkan; dan
- 4) Sumber lain yang sah.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

Halaman 7

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (lanjutan)

d. Susunan Pengurus

Struktur Organisasi PKBL pada PT Jaminan Kredit Indonesia dilaksanakan oleh Bagian PKBL di bawah Direktorat Utama sesuai dengan Keputusan Direksi No. 01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 perihal Struktur Organisasi Perusahaan Umum (Perum).

Selanjutnya diikuti dengan penempatan pejabat dan pegawai, deskripsi jabatan dan analisis jabatan serta *Standard Operating Procedure (SOP)* untuk pelaksanaan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT Jaminan Kredit Indonesia.

Susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola Bagian PKBL pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Sri Mulyanto	Sri Mulyanto
Komisaris	Diah Natalisa	Diah Natalisa
Komisaris	Noor Ida Khomsiyati	Noor Ida Khomsiyati
Komisaris	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni
Komisaris	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Putrama Wahyu Setyawan ⁴⁾	Randi Anto ¹⁾
Direktur Bisnis Penjaminan	Kadar Wisnuwarman ⁵⁾	Amin Mas'udi ²⁾
Direktur Operasional dan Jaringan	Kadar Wisnuwarman	Kadar Wisnuwarman
Direktur Manajemen Sumber Daya Manusia Umum dan Kepatuhan	Sulis Usdoko	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu	I. Rusdonobanu

Struktur Organisasi Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan

	2020	2019
Direktur Utama	Putrama Wahyu Setyawan ⁴⁾	Randi Anto ¹⁾
Sekretaris Perusahaan	Abdul Bari	Abdul Bari
Kepala Bagian	Nenden Kania Puji Asri ⁶⁾	Wildan R Firdaus ³⁾
Kepala Seksi PK	-	Irma Hartati
Kepala Seksi BL	-	Erna Nova
Staff PKBL	Retno Indriani	Retno Indriani

¹⁾ diberhentikan dengan hormat pada tanggal 26 Oktober 2020

²⁾ diberhentikan dengan hormat pada tanggal 7 November 2020

³⁾ dipindahtugaskan pada tanggal 16 Juli 2020

⁴⁾ diangkat pada tanggal 26 Oktober 2020

⁵⁾ diangkat untuk melaksanakan tugas sementara pada tanggal 2 November 2020

⁶⁾ diangkat untuk melaksanakan tugas sementara pada tanggal 16 July 2020

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Laporan keuangan ini disusun dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Pengelola Bagian PKBL Perusahaan pada tanggal 23 November 2021.

Kebijakan akuntansi penting yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan Bagian PKBL adalah sebagai berikut:

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) dan Surat Edaran Menteri BUMN Republik Indonesia No. SE-02/MBU/Wk/2012 tanggal 23 Februari 2012 tentang Penetapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Laporan keuangan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, kecuali untuk laporan arus kas, disajikan berdasarkan konsep biaya historis dan konsep akrual.

Laporan arus kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan, dan disajikan dengan menggunakan metode langsung.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan adalah mata uang Rupiah yang juga merupakan mata uang fungsionalnya. Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan secara khusus.

b. Kas dan Setara Kas

Kas terdiri dari kas dan bank, setara kas terdiri deposito bersifat jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya, dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

c. Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain/lembaga penyalur

Piutang pinjaman BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain merupakan pinjaman yang diberikan kepada BUMN/Lembaga Penyalur lain untuk memfasilitasi kegiatan atau program Pemerintah. Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Bagian PKBL Perusahaan kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang pinjaman Program Kemitraan diakui pada saat pinjaman disalurkan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih yang dapat ditagih dari BUMN Pembina/Lembaga Penyalur lain, ataupun mitra binaan.

d. Piutang Pinjaman Mitra Binaan

Piutang pinjaman mitra binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Bagian PKBL Perusahaan kepada mitra binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Piutang pinjaman mitra binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada mitra binaan dan diukur serta dicatat sebesar jumlah bersih yang diharapkan dapat ditagih dari mitra binaan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

d. Piutang Pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)

Penggolongan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- Lancar, apabila pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman dilakukan tepat waktu atau terjadi keterlambatan pembayaran pokok dan/atau jasa administrasi selambat-lambatnya 30 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Kurang lancar, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 hari dan belum melampaui 180 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati;
- Diragukan, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 hari dan belum melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati; dan
- Macet, apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Piutang bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak dapat dipulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman yang besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah. Piutang bermasalah dengan penyisihan sebesar 100% ini diklasifikasikan sebagai aset lain-lain.

e. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Cadangan kerugian penurunan nilai pinjaman diakui saat akhir periode pelaporan akuntansi serta diukur dan dicatat sebesar nilai estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Penyisihan penurunan nilai dihitung secara kolektif berdasarkan persentase tertentu dengan tingkat ketertagihan (*collection*) dengan menggunakan data historis yang ada (minimal 2 tahun).

f. Aset Lain-Lain

Aset lain-lain terdiri dari piutang bermasalah. Piutang bermasalah merupakan pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya dengan penjadwalan kembali (*rescheduling*) dan peninjauan kembali persyaratan (*reconditioning*), namun tidak dapat dipulihkan. Piutang bermasalah disajikan sebesar nilai pokok pinjaman yang besarnya alokasi penyisihan sebesar 100% dari saldo pinjaman bermasalah.

g. Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang pinjaman.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

h. Aset Tetap

Aset tetap diakui berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Aset tetap disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset tetap dengan tarif penyusutan sebagai berikut:

	<u>Masa Manfaat</u>
Inventaris kantor	4 tahun

Pengeluaran untuk perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan aktivitas pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang umur, manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi pada jumlah tercatat aset tetap tersebut.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomi masa depan yang diekspektasikan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian atas penghentian pengakuan aset tetap dalam laporan aktivitas dilakukan ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

i. Kelebihan Pembayaran Angsuran

Kelebihan pembayaran angsuran adalah penerimaan angsuran yang melebihi saldo piutang mitra binaan. Kelebihan pembayaran angsuran diakui sebagai liabilitas pada saat setoran tersebut diterima, serta diukur dan dicatat sebesar nilai nominal kelebihan pembayaran angsuran.

j. Aset Neto

Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat. Aset neto tidak terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

k. Pengakuan Penerimaan, Pendapatan, Penyaluran, Beban dan Pengeluaran

Alokasi dana dari BUMN Pembina merupakan dana yang diperoleh dari BUMN Pembina yang diperuntukan baik untuk Program Kemitraan maupun Program Bina Lingkungan.

Pendapatan jasa administrasi pinjaman adalah pendapatan jasa yang dipungut atas pinjaman dana Program Kemitraan yang disalurkan kepada mitra binaan. Jasa administrasi pinjaman diakui sebagai pendapatan saat dibayarkan.

Pendapatan jasa giro merupakan penerimaan jasa giro setelah dikurangi pajak yang bersifat final.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

k. Pengakuan Penerimaan, Pendapatan, Penyaluran, Beban dan Pengeluaran (lanjutan)

Pendapatan lain-lain adalah penerimaan kembali yang diperoleh dari pengembalian Program Bina Lingkungan. Penerimaan kembali diakui sebagai pendapatan pada saat pengembalian dana telah diterima.

Beban dan pengeluaran diakui sesuai dengan basis akrual.

l. Transaksi dengan Pihak-Pihak Berelasi

PKBL Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi seperti yang didefinisikan dalam SAK-ETAP tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa", yang didefinisikan antara lain:

- 1) Pihak yang memiliki pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas entitas;
- 2) Entitas anak, *joint venture*, entitas asosiasi dari entitas;
- 3) Personel manajemen kunci dari entitas dan entitas induknya (secara agregat); dan
- 4) Pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa lainnya.

m. Penilaian Kinerja

Atas pelaksanaan Bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. KEP-100/MBU/2002, tanggal 4 Juni 2002 dan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-04/MBU/2011 tanggal 19 Agustus 2011, tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjamin yang telah diperbaharui dengan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-10/MBU/2014 tertanggal 25 Juli 2014.

1) Efektivitas Penyaluran Dana

Efektivitas penyaluran dana diukur melalui rasio jumlah dana yang disalurkan dibagi jumlah dana yang tersedia.

Bobot yang ditetapkan untuk menilai kinerja penyaluran dana tersebut adalah sebagai berikut:

Efektivitas penyaluran dana	Bobot
> 90%	3
85% - 90%	2
80% - 85%	1
< 80%	0

2) Tingkat Kolektibilitas Piutang

Tingkat kolektibilitas piutang diukur melalui rasio jumlah nilai tertimbang kolektibilitas pinjaman dibagi jumlah piutang Program Kemitraan.

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Penilaian Kinerja (lanjutan)

2) Tingkat Kolektibilitas Piutang (lanjutan)

Bobot yang ditetapkan untuk menilai kinerja kolektibilitas piutang tersebut adalah sebagai berikut:

Tingkat kolektibilitas piutang	Bobot
> 70%	3
40% - 70%	2
10% - 40%	1
> 10%	0

Nilai tertimbang kolektibilitas pinjaman diperoleh dari nilai piutang dikurangi penyisihan piutang. Nilai penyisihan piutang merupakan penjumlahan hasil perkalian nilai piutang Program Kemitraan dengan tarif penyisihan sesuai dengan masing-masing kualitas piutang.

3. KAS DAN SETARA KAS

Saldo kas dan setara kas per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Kas	6.061.216	2.571.215
Kas pada Bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	832.899.775	919.266.037
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.689.772	95.012.314
PT Bank Bukopin Tbk	1.501.579	59.176.239
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah	-	258.449.188
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	94.409.891
PT Bank Muamalat	-	17.510.000
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	12.846.193
PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk	-	7.308.251
	<u>850.091.126</u>	<u>1.463.978.113</u>
	<u>856.152.342</u>	<u>1.466.549.328</u>

Kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2020 mencakup saldo untuk Program Kemitraan sebesar Rp 856.152.342 (2019: Rp 1.466.549.328) dan Program Bina Lingkungan sebesar nihil (2019: nihil). Tidak terdapat kas pada bank yang digunakan sebagai jaminan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Lihat Catatan 15 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi.

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

Halaman 13

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH

a. Rincian piutang pinjaman mitra binaan per sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Perdagangan	7.674.736.316	6.908.095.416
Pertanian	3.701.916.030	3.366.095.096
Industri	2.494.216.043	2.484.242.260
Jasa	1.755.078.509	2.072.141.679
Peternakan	775.518.024	893.238.135
Perikanan	473.447.163	116.919.380
	16.874.912.085	15.840.731.967
Cadangan kerugian penurunan nilai	(8.701.706.447)	(6.243.539.288)
	<u>8.173.205.638</u>	<u>9.597.192.679</u>

b. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut:

	2020	2019
<u>Piutang pinjaman mitra binaan jangka pendek</u>		
Piutang pinjaman mitra binaan	3.626.717.550	2.913.230.388
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.174.280.888)	(1.148.234.085)
	<u>2.452.436.662</u>	<u>1.764.996.303</u>
	2020	2019
<u>Piutang pinjaman mitra binaan jangka panjang</u>		
Piutang pinjaman mitra binaan	13.248.194.535	12.927.501.579
Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.527.425.559)	(5.095.305.203)
	<u>5.720.768.976</u>	<u>7.832.196.376</u>

Piutang pinjaman mitra binaan tersebut berjangka waktu antara 12 bulan sampai dengan 36 bulan. Pengembalian pokok pinjaman untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sejumlah Rp 3.337.819.882 dan Rp 5.700.261.277.

Pada tahun 2020 terjadinya Pandemi COVID-19 yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada penurunan kinerja keuangan pelaku usaha golongan ekonomi lemah khususnya mitra binaan Program Kemitraan. Dengan adanya kondisi tersebut BUMN turut serta mendukung pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik dengan cara memberikan kebijakan stimulus kepada mitra binaan yang terdampak perkembangan penyebaran COVID-19. Kebijakan ini berdasarkan Surat Kementerian BUMN Nomor: S-142/MBU/DSI/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Stimulus untuk mitra binaan Program Kemitraan atas Terjadinya COVID-19.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

- b. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan jatuh tempo adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Adapun maksud dan tujuan BUMN dalam hal ini adalah PT Jaminan Kredit Indonesia turut memberikan kebijakan stimulus kepada mitra binaan antara lain untuk:

1. Meringankan beban mitra binaan agar dapat bertahan di tengah kondisi ekonomi yang melemah akibat pandemik COVID-19;
2. Sebagai bentuk upaya BUMN untuk menjaga keberlangsungan usaha mitra binaan;
3. Memperkuat peran BUMN sebagai salah satu pilar ekonomi nasional melalui pemberdayaan kondisi ekonomi masyarakat.

Penerapan kebijakan yang mendukung stimulus untuk mitra binaan Program Kemitraan dapat berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.

- c. Rincian jumlah mitra binaan (tidak diaudit) dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut:

	2020	
	Jumlah Mitra Binaan	Piutang Pinjaman
Jawa Barat	110	2.407.375.970
Bali	40	1.754.392.864
Nusa Tenggara Timur	74	1.518.936.582
Sulawesi Selatan	48	1.507.808.128
Riau	82	1.301.473.273
DKI Jakarta	74	1.204.405.500
Jawa Timur	33	1.152.779.667
Jawa Tengah	44	949.611.629
Kalimantan Timur	37	837.691.913
Sumatera Selatan	63	816.673.862
Kalimantan Barat	59	751.285.621
D.I. Yogyakarta	23	697.068.781
Sumatera Utara	18	354.717.060
Banten	17	338.055.555
Kalimantan Tengah	22	246.611.177
Kalimantan Selatan	10	241.121.901
Sumatera Barat	10	212.083.349
Jambi	9	166.497.192
Sulawesi Utara	14	152.603.983
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	14	263.718.078
	801	16.874.912.085
Cadangan kerugian penurunan nilai		(8.701.706.447)
		<u>8.173.205.638</u>

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

- c. Rincian jumlah mitra binaan (tidak diaudit) dan jumlah piutang berdasarkan provinsi adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	2019	
	Jumlah Mitra Binaan	Piutang Pinjaman
Bali	44	2.195.985.000
Jawa barat	82	1.846.345.470
Jawa Timur	52	1.414.129.178
Riau	116	1.294.435.569
DKI Jakarta	85	1.191.821.297
Jawa Tengah	82	1.109.277.000
D.I. Yogyakarta	23	1.093.528.140
Sumatera Selatan	60	1.010.124.337
Kalimantan Barat	119	849.846.583
Kalimantan Timur	43	816.314.921
Nusa Tenggara Barat	41	769.399.527
Sulawesi Selatan	80	739.696.272
Sumatera Barat	10	333.333.329
Kalimantan Tengah	28	285.132.851
Sumatera Utara	21	281.567.177
Jambi	11	158.354.859
Kalimantan Selatan	6	152.305.000
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	26	299.135.457
	929	15.840.731.967
Cadangan kerugian penurunan nilai		(6.243.539.288)
		<u>9.597.192.679</u>

- d. Rincian piutang pinjaman mitra binaan berdasarkan kolektibilitas adalah sebagai berikut:

2020				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	5.355.433.560	4,59%	245.857.115	5.109.576.445
Kurang Lancar	2.335.045.963	9,15%	213.681.235	2.121.364.728
Diragukan	1.299.105.459	27,47%	356.840.994	942.264.465
Macet	7.885.327.103	100,00%	7.885.327.103	-
	<u>16.874.912.085</u>		<u>8.701.706.447</u>	<u>8.173.205.638</u>
2019				
Kolektibilitas	Jumlah Piutang	Tarif Penyisihan (%)	Penyisihan	Bersih
Lancar	7.234.963.496	1,37%	99.027.986	7.135.935.510
Kurang Lancar	2.282.274.530	3,34%	76.162.996	2.206.111.534
Diragukan	434.643.485	41,30%	179.497.850	255.145.635
Macet	5.888.850.456	100,00%	5.888.850.456	-
	<u>15.840.731.967</u>		<u>6.243.539.288</u>	<u>9.597.192.679</u>

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - BERSIH (lanjutan)

e. Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai

	2020	2019
Saldo awal	6.243.539.288	5.079.517.412
Penambahan cadangan kerugian penurunan nilai selama tahun berjalan	2.458.167.159	1.164.021.876
Saldo akhir	8.701.706.447	6.243.539.288

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan kerugian penurunan nilai yang telah dibentuk telah memadai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang pinjaman mitra binaan di masa yang akan datang.

5. PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang lain-lain adalah piutang yang tidak dapat dikelompokkan pada kategori piutang diatas. Jumlah piutang lain-lain tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
DKI Jakarta	2.659.000	2.659.000
Jawa Tengah	2.421.027	2.421.032
Kantor Pusat	1.500.000	1.000.000
Sumatera Barat	-	45.000.000
	6.580.027	51.080.032

6. ASET TETAP

2020 dan 2019

	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir
<u>Harga perolehan</u>				
Peralatan kantor	10.896.500	-	-	10.896.500
<u>Akumulasi penyusutan</u>				
Peralatan kantor	10.896.500	-	-	10.896.500
Nilai buku - bersih	-			-

7. ASET LAIN-LAIN

	2020	2019
Piutang Bermasalah		
Jumlah piutang bermasalah	1.617.485.210	1.617.485.210
Cadangan penyisihan piutang bermasalah	(1.617.485.210)	(1.617.485.210)
Jumlah piutang bermasalah - bersih	-	-

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

7. ASET LAIN-LAIN (lanjutan)

Piutang bermasalah merupakan saldo piutang pinjaman dari 102 mitra binaan (tidak diaudit) pada Program Kemitraan yang masih terbuka (*outstanding*). Piutang bermasalah terdiri dari pinjaman macet penyaluran tahun 1992 sampai dengan 2012, penyaluran kepada provinsi yang terkena musibah, serta penyaluran pinjaman pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, pinjaman dengan kategori macet yang telah diupayakan pemulihannya namun tidak terpulihkan, dikelompokkan dalam aset lain-lain sebagai piutang bermasalah.

8. ASET NETO

Aset neto terdiri dari aset neto tidak terikat dan aset neto terikat, namun pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tidak terdapat aset neto terikat. Bagian aset neto tidak terikat pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	2020	2019
Aset Neto Tidak Terikat		
Saldo awal tahun	11.110.888.039	20.484.246.961
Penurunan aset neto	<u>(2.242.037.897)</u>	<u>(9.373.358.922)</u>
Saldo akhir tahun	<u>8.868.850.142</u>	<u>11.110.888.039</u>

Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional normal. Aset neto terikat adalah sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu atau dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

9. UTANG JANGKA PENDEK

	2020	2019
Kelebihan pembayaran angsuran	156.397.131	-
Utang lain-lain	<u>10.690.734</u>	<u>3.934.000</u>
	<u>167.087.865</u>	<u>3.934.000</u>

10. PENDAPATAN

	2020	2019
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	207.596.019	319.484.177
Pendapatan jasa giro	<u>27.185.034</u>	<u>66.491.040</u>
	<u>234.781.053</u>	<u>385.975.217</u>

Pendapatan jasa administrasi pinjaman Program Kemitraan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 207.596.019 dan Rp 319.484.177.

Pendapatan jasa giro untuk Program Kemitraan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah masing-masing sebesar Rp 27.185.034 dan Rp 66.491.040 (Lihat Catatan 15 untuk rincian transaksi dengan pihak-pihak berelasi).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

10. PENDAPATAN (lanjutan)

Berdasarkan Surat Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015, Surat Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-03/MBU/12/2016 (Perubahan Pertama) tanggal 16 Desember 2016, dan Surat Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. PER-02/MBU/7/2017 (Perubahan Kedua) tanggal 5 Juli 2017, tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL), seluruh pendapatan jasa administrasi pinjaman tersebut diperuntukkan sebagai dana penyaluran.

11. PENYALURAN PINJAMAN KEMITRAAN

a. Penyaluran pinjaman kemitraan berdasarkan jenis sektor usaha

	2020		2019	
	Jumlah Mitra Binaan (tidak diaudit)	Jumlah Dana Disalurkan	Jumlah Mitra Binaan (tidak diaudit)	Jumlah Dana Disalurkan
Perdagangan	76	2.452.000.000	29	1.059.000.000
Jasa	27	715.000.000	7	275.000.000
Peternakan	14	420.000.000	15	750.000.000
Pertanian	21	395.000.000	23	1.115.000.000
Perikanan	11	330.000.000	-	-
Industri	3	60.000.000	47	1.932.500.000
	152	4.372.000.000	121	5.131.500.000

b. Penyaluran pinjaman kemitraan berdasarkan provinsi

	2020	2019
Nusa Tenggara Timur	850.000.000	80.000.000
Jawa Barat	780.000.000	230.000.000
DKI Jakarta	375.000.000	80.000.000
Banten	340.000.000	-
Riau	275.000.000	517.500.000
Jawa Tengah	240.000.000	705.000.000
Kalimantan Timur	240.000.000	40.000.000
Sumatera Utara	235.000.000	117.000.000
Sulawesi Selatan	210.000.000	-
Kalimantan Selatan	140.000.000	25.000.000
Sumatera Selatan	130.000.000	-
Bali	100.000.000	1.000.000.000
Jawa Timur	100.000.000	1.020.000.000
Sulawesi Utara	95.000.000	50.000.000
Papua	60.000.000	-
Kalimantan Barat	40.000.000	135.000.000
Sulawesi Tengah	40.000.000	-
Lampung	38.000.000	-
Bengkulu	30.000.000	-
Sulawesi Tenggara	29.000.000	87.000.000
Jambi	25.000.000	-
Daerah Istimewa Yogyakarta	-	1.000.000.000
Kalimantan Tengah	-	30.000.000
Nusa Tenggara Barat	-	15.000.000
	4.372.000.000	5.131.500.000

**PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN**

Halaman 19

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020**

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

11. PENYALURAN PINJAMAN KEMITRAAN (lanjutan)

c. Penyaluran dana pembinaan kemitraan berdasarkan jenis biaya

	2020	2019
Pameran dan promosi	-	569.598.114
	-	569.598.114

d. Penyaluran dana pembinaan kemitraan berdasarkan provinsi

	2020	2019
DKI Jakarta	-	569.598.114
	-	569.598.114

12. PENYALURAN BINA LINGKUNGAN

Penyaluran dana Bina Lingkungan yang ditanggung Perusahaan berdasarkan jenis bantuan

	2020	2019
Bantuan sosial kemasyarakatan	4.000.358.220	2.973.553.093
Bantuan korban bencana alam dan non alam	2.697.807.445	237.032.782
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan	2.029.064.103	1.001.117.503
Bantuan sarana ibadah	1.477.647.000	517.951.600
Bantuan korban bencana alam dan non alam karena wabah	815.610.623	-
Bantuan pengembangan prasarana	584.710.000	233.414.000
Bantuan peningkatan kesehatan dan/atau sarana umum	166.680.000	201.539.566
Bantuan pelestarian alam	117.750.000	137.793.333
	11.889.627.391	5.302.401.877

Penyaluran dana Bina Lingkungan yang ditanggung Perusahaan telah dianggarkan berdasarkan Risalah Rapat No. RIS-39/D7.MBU.3/11/2019, tentang Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran tanggal 21 November 2019.

Sampai dengan 31 Desember 2020, biaya penyaluran dana Bina Lingkungan yang ditanggung Perusahaan sebesar Rp 11.889.627.391, dilaporkan sebagai biaya/beban Bina Lingkungan di dalam laporan keuangan Perusahaan.

13. BEBAN DAN PENGELUARAN

	2020	2019
Beban penyisihan piutang	2.458.167.159	1.164.021.876
Beban administrasi dan umum	18.651.791	21.290.002
Penyaluran hibah kepada BUMN Khusus	-	8.000.000.000
Beban pembinaan kemitraan	-	569.598.114
Pengembalian alokasi dana Bina Lingkungan	-	4.424.147
	2.476.818.950	9.759.334.139

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

13. BEBAN DAN PENGELUARAN (lanjutan)

Penyaluran hibah dana Program Kemitraan merupakan penyaluran dana Program Kemitraan kepada BUMN Khusus yaitu PT Permodalan Nasional Madani dengan nilai nominal dana hibah sebesar Rp 8.000.000.000 yang telah disetujui berdasarkan Memo No. B.644/INT/SPR/PKL/II/2019 pada 18 Februari 2019 merujuk pada Surat Keputusan Kementerian BUMN Republik Indonesia No. S-74/MBU/01/2019 tanggal 30 Januari 2019.

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

a. Jenis hubungan dan unsur transaksi dengan pihak berelasi

<u>Pihak Berelasi</u>	<u>Jenis Hubungan</u>	<u>Unsur Transaksi Pihak Berelasi</u>
PT Jaminan Kredit Indonesia	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Alokasi dana dari BUMN Pembina
PT Sang Hyang Seri (Persero)	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Piutang pinjaman kepada BUMN Pembina lain/lembaga penyalur
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Penempatan dana dan pendapatan jasa giro
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Entitas sepengendali melalui Pemerintah Pusat Republik Indonesia	Beban hibah penyaluran dana Program Kemitraan

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Aset		
Kas pada bank		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	832.899.775	919.266.037
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	15.689.772	95.012.314
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	-	94.409.891
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	12.846.193
PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk	-	7.308.251
	<u>848.589.547</u>	<u>1.128.842.686</u>
Piutang pinjaman kepada BUMN lain/ lembaga penyalur		
PT Sang Hyang Seri (Persero)	1.700.237.472	1.700.237.472
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	<u>(1.700.237.472)</u>	<u>(1.700.237.472)</u>
	<u>-</u>	<u>-</u>
	<u>848.589.547</u>	<u>1.128.842.686</u>
Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah aset	<u>9,39%</u>	<u>10,16%</u>

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA
BAGIAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Halaman 21

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian saldo transaksi dengan pihak-pihak berelasi (lanjutan)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Pendapatan		
Pendapatan jasa giro	24.993.770	65.422.430
	<u>24.993.770</u>	<u>65.422.430</u>
Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah pendapatan	<u>10,65%</u>	<u>16,95%</u>
Beban		
Penyaluran hibah kepada BUMN Khusus		
PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	-	8.000.000.000
Beban administrasi dan umum		
Beban administrasi bank	15.253.468	18.732.256
	<u>15.253.468</u>	<u>8.018.732.256</u>
Persentase jumlah pendapatan kepada pihak berelasi terhadap jumlah beban	<u>0,62%</u>	<u>82,16%</u>

15. PENILAIAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN

Merujuk pada Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL No. RIS-39/D7.MBU.3/11/2019 perhitungan kolektibilitas dan efektivitas penyaluran program PKBL akan merujuk pada Surat Menteri BUMN Republik Indonesia No. S/564/MBU/08/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Aspirasi Pemegang Saham/Pemilik Modal serta merujuk pada Keputusan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Kep-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta merujuk pada Peraturan Menteri BUMN Republik Indonesia No. Per-10/MBU/2014 tentang Indikator Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara Jasa Keuangan Bidang Usaha Perasuransian dan Jasa Penjaminan.

Tingkat efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dan Program Kemitraan adalah sebagai berikut:

a. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang pinjaman kepada BUMN lain/lembaga penyaluran dan mitra binaan	16.874.912.085	15.840.731.967
Cadangan kerugian penurunan nilai	<u>(8.701.706.447)</u>	<u>(6.243.539.288)</u>
	<u>8.173.205.638</u>	<u>9.597.192.679</u>
Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman	44,04%	57,16%
Skor indikator tingkat kolektibilitas	2	2

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

15. PENILAIAN TINGKAT KOLEKTIBILITAS DAN EFEKTIVITAS PENYALURAN (lanjutan)

Tingkat efektivitas penyaluran dana dan tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman dan Program Kemitraan adalah sebagai berikut : (lanjutan)

a. Tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman (lanjutan)

Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 44,04%, maka skor untuk indikator tingkat kolektibilitas pengembalian pinjaman adalah 2 (dua) (Lihat Catatan No. 2k).

b. Tingkat efektivitas penyaluran dana

Dana yang disalurkan:

	2020	2019
Penyaluran pinjaman	4.372.000.000	5.131.500.000
Penyaluran hibah kepada BUMN Khusus	-	8.000.000.000
Dana pembinaan kemitraan	-	569.598.114
	<u>4.372.000.000</u>	<u>13.701.098.114</u>

Dana yang tersedia:

	2020	2019
Saldo dana awal tahun	1.466.549.328	9.181.850.097
Pengembalian pinjaman mitra binaan	3.337.819.882	5.700.261.277
Pendapatan jasa administrasi pinjaman	207.596.019	319.484.177
Kelebihan pengembalian angsuran	156.397.131	-
Piutang lain-lain	44.500.005	(48.659.000)
Penerimaan jasa giro	27.185.034	66.491.040
Utang lain-lain	6.756.734	(26.066.000)
Beban administrasi dan umum	(18.651.791)	(21.290.002)
Pengembalian alokasi dana BUMN Pembina	-	(4.424.147)
	<u>5.228.152.342</u>	<u>15.167.647.442</u>

Tingkat efektivitas penyaluran dana	83,62%	90,33%
Skor indikator efektivitas	1	3

Sesuai dengan hasil perhitungan tersebut di atas, maka persentase tingkat efektivitas penyaluran dana adalah 83,62%, maka skor untuk indikator tingkat efektivitas penyaluran dana adalah 1 (satu) (Lihat Catatan No. 2k).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

a. Perubahan komposisi Dewan Direksi

Pada tanggal 22 Maret 2021, Surat Keputusan Kementerian BUMN No. SK-93/MBU/03/2021 dan No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 memutuskan untuk memberhentikan Kadar Wisnuwarman dan mengangkat Suwarsito sebagai Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo yang telah memenuhi uji kelayakan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No. S-3020/NB.111/2021. Berikut adalah komposisi anggota Dewan Direksi:

	2021	2020
Dewan Direksi		
Direktur Utama	Putrama Wahyu Setyawan	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan	Suwarsito	Kadar Wisnuwarman
Direktur Operasional & Jaringan	Kadar Wisnuwarman	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan	Sulis Usdoko	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan Investasi, & Manajemen Risiko	I. Rusdonobanu	I. Rusdonobanu

b. Perubahan komposisi Dewan Komisaris

Pada tanggal 18 Januari 2021, Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-19/MBU/01/2021 dan 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021, memutuskan untuk memberhentikan Diah Natalisa dengan hormat dan mengangkat Hernita Alius sebagai Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia yang telah memenuhi uji kelayakan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No. KEP-17/KDK.05/2021.

Pada tanggal 2 Juni 2021, Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-182/MBU/06/2021 dan 05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021, memutuskan untuk memberhentikan Noor Ida Khomsiyati dengan hormat dan mengangkat Desty Airlaini sebagai Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia yang telah memenuhi uji kelayakan dan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan No. KEP-50/KDK.05/2021. Berikut adalah komposisi anggota Dewan Komisaris:

	2021	2020
Dewan Komisaris		
Komisaris Utama	Sri Mulyanto	Sri Mulyanto
Komisaris	Hernita Alius	Diah Natalisa
Komisaris	Desty Airlaini	Noor Ida Khomsiyati
Komisaris	Ari Wahyuni	Ari Wahyuni
Komisaris	Muhammad Muchlas Rowi	Muhammad Muchlas Rowi

c. Perubahan dari PKBL menjadi TJSL

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN RI, telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN RI No. PER-05/MBU/04/2021 tanggal 20 April 2021, tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN. Berdasarkan Peraturan ini, nama PKBL diubah menjadi TJSL (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan).

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2020

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

16. KEJADIAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)

c. Perubahan dari PKBL menjadi TJSL (lanjutan)

Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN ("TJSL BUMN") adalah kegiatan yang merupakan komitmen perusahaan terhadap pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat pada ekonomi, sosial, lingkungan serta hukum dan tata kelola dengan prinsip yang lebih terintegrasi, terarah, terukur dampaknya serta dapat dipertanggungjawabkan dan merupakan bagian dari pendekatan bisnis perusahaan.

1. Program TJSL BUMN bertujuan untuk:

- a. Memberikan kemanfaatan bagi pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola bagi perusahaan.
- b. Berkontribusi pada penciptaan nilai tambah bagi perusahaan dengan prinsip yang terintegrasi, terarah dan terukur dampaknya serta akuntabel.
- c. Membina usaha mikro dan usaha kecil agar lebih tangguh dan mandiri serta masyarakat sekitar perusahaan.

2. Program TJSL BUMN dilaksanakan berdasarkan 4 pilar utama:

- a. Sosial, untuk tercapainya pemenuhan hak dasar manusia yang berkualitas secara adil dan setara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat;
- b. Lingkungan, untuk pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan sebagai penyangga seluruh kehidupan;
- c. Ekonomi, untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi berkualitas melalui keberlanjutan peluang kerja dan usaha, inovasi, industri inklusif, infrastruktur memadai, energi bersih yang terjangkau dan didukung kemitraan; dan
- d. Hukum dan tata kelola, untuk terwujudnya kepastian hukum dan tata kelola yang efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif untuk menciptakan stabilitas keamanan dan mencapai negara berdasarkan hukum.

3. Selanjutnya dibentuk Komite Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN oleh Direksi pada tingkat induk BUMN dan BUMN. Komite TJSL BUMN berfungsi:

- a. Melakukan koordinasi antar unit/direktorat untuk merumuskan tujuan dan petunjuk pelaksanaan Program TJSL BUMN;
- b. Pemetaan dan penyusunan Program TJSL BUMN; dan
- c. Membantu Direksi dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Program TJSL BUMN.

Berdasarkan Peraturan ini, peraturan pendahulu yakni Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri BUMN RI Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan BUMN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2020

LAPORAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL)*PARTNERSHIP AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM REPORT*A member of **IFG****Gedung Jamkrindo**

Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar - Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610

 (021) 6540335 (021) 6540335 contact@jamkrindo.co.id www.jamkrindo.co.id